



MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Keuangan

KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2016

(Audited)



KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

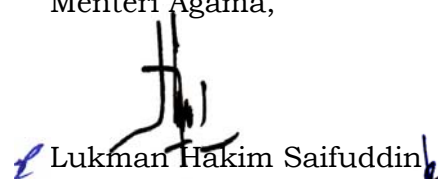
Kementerian Agama adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Agama mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Agama. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 28 April 2017

Menteri Agama,


Lukman Hakim Saifuddin

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	vii
Pernyataan Telah direviu	x
Pernyataan Tanggung Jawab	xi
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Agama	8
A.2. Dasar Hukum	15
A.3. Profil Kementerian Agama	16
A.4. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	29
A.5. Basis Akuntansi	30
A.6. Dasar Pengukuran	30
A.7. Kebijakan Akuntansi	30
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	39
B.1. Pendapatan	40
B.2. Belanja	44
B.3. Belanja Pegawai	47
B.4. Belanja Barang	47
B.5. Belanja Modal	48
B.6. Belanja Bantuan Sosial	54
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	55
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	55
C.2. Kas di Bendahara Penerimaan	56
C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas	56
C.4. Kas pada Badan Layanan Umum	57
C.5. Investasi Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum	57
C.6. Belanja Dibayar Di Muka	58
C.7. Pendapatan yang Masih Harus Diterima	59

C.8. Piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	59
C.9. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	60
C.10. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	61
C.11. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Bagian Lancar Tagihan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	62
C.12. Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	63
C.13. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	63
C.14. Piutang Dari Kegiatan Non Operasional BLU	64
C.15. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang dari Kegiatan- Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	65
C.16. Persediaan	66
C.17. Persediaan Badan Layanan Umum	67
C.18. Tanah	68
C.19. Peralatan dan Mesin	70
C.20. Gedung dan Bangunan	72
C.21. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	73
C.22. Aset Tetap Lainnya	75
C.23. Konstruksi Dalam Pengerjaan	76
C.24. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	77
C.25. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	78
C.26. Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	78
C.27. Aset Tak Berwujud	79
C.28. Aset Lain-Lain	80
C.29. Dana yang Dibatasi Penggunaannya	81
C.30. Dana Kelolaan Badan Layanan Umum	82
C.31. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	82
C.32. Utang kepada Pihak Ketiga	83
C.33. Hibah yang Belum Disahkan	86
C.34. Pendapatan Diterima Di Muka	86
C.35. Uang Muka dari KPPN	86
C.36. Utang Jangka Pendek Lainnya	87

C.37. Ekuitas	87
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	88
D.1. Pendapaan Negara Bukan Pajak Lainnya	88
D.2. Beban Pegawai	89
D.3. Beban Persediaan	92
D.4. Beban Barang dan Jasa	92
D.5. Beban Pemeliharaan	94
D.6. Beban Perjalanan Dinas	95
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	96
D.8. Beban Bantuan Sosial	97
D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi	98
D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	99
D.11. Beban Lain-Lain	100
D.12. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	100
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	103
E.1. Ekuitas Awal	103
E.2. Surplus/Defisit LO	103
E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	103
E.4. Transaksi Antar Entitas	105
E.5. Ekuitas Akhir	107
F. Pengungkapan Penting Lainnya	108
F.1. Selisih Neraca SAIBA dengan SIMAK BMN	108
F.2. Bank Garansi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU)	109
VI. Lampiran	
A. Lampiran CaLK LRA	
1. Rincian Anggaran Berdasarkan Eselon I	
2. Rincian Realisasi Belanja Berdasarkan Eselon I	
B. Lampiran CaLK Neraca	
1. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2016 dan 2015 Berdasarkan Eselon I	
2. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2016 dan 2015 Berdasarkan Eselon I	

3. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2016 dan 2015 Berdasarkan Eselon I
4. Rincian Belanja Dibayar Di Muka TA 2016 dan 2015 Berdasarkan Eselon I
5. Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2016 dan 2015 Berdasarkan Eselon I
6. Rincian Piutang PNBK TA 2016 dan 2015 Berdasarkan Eselon I
7. Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2016 dan 2015 Berdasarkan Eselon I
8. Rincian Persediaan TA 2016 dan 2015 Berdasarkan Eselon I
9. Rincian Tanah TA 2016 dan 2015 Berdasarkan Eselon I
10. Rincian Peralatan dan Mesin TA 2016 dan 2015 Berdasarkan Eselon I
11. Rincian Gedung dan Bangunan TA 2016 dan 2015 Berdasarkan Eselon I
12. Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2016 dan 2015 Berdasarkan Eselon I
13. Rincian Aset Tetap Lainnya TA 2016 dan 2015 Berdasarkan Eselon I
14. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2016 dan 2015 Berdasarkan Eselon
15. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2016 Berdasarkan Eselon I
16. Rincian Aset Tak Berwujud TA 2016 dan 2015 Berdasarkan Eselon I
17. Rincian Aset Lain-Lain TA 2016 dan 2015 Berdasarkan Eselon I
18. Rincian Hutang TPG PNS dan Non PNS Tahun 2013 s.d. 2015 (Verifikasi BPKP)
19. Rincian Hutang TPG Non PNS Inpassing Tahun 2016 (Verifikasi Itjen Kemenag)
20. Rincian Hutang TPG PNS TA 2015 dan 2016 (Verifikasi Itjen Kemenag)
21. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga TA 2016 dan 2015 Berdasarkan Eselon I
22. Rincian Hibah yang Belum Disahkan TA 2016 dan 2015 Berdasarkan Eselon I
23. Rincian Pendapatan yang Diterima Di Muka TA 2016 dan 2015 Berdasarkan Eselon I
24. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya TA 2016 dan 2015 Berdasarkan Eselon I

- C. Lampiran Aplikasi E-Rekon
 - I. Laporan Realisasi Anggaran
 - II. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
 - III. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
 - IV. Neraca
 - V. Laporan Operasional
 - VI. Laporan Perubahan Ekuitas
 - VII. Neraca Percobaan Akrua
- D. Lampiran Ikhtisar Badan Layanan Umum

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Rincian Instansi Vertikal Kementerian Agama Berdasarkan Satker	10
Tabel 2	: Rincian Instansi Vertikal Kementerian Agama Berdasarkan DIPA	10
Tabel 3	: Jumlah Pegawai Kementerian Agama Tahun 2015 - 2016 Berdasarkan Jabatan	13
Tabel 4	: Rincian Program Kementerian Agama	14
Tabel 5	: Rincian Jumlah Penyuluh Kementerian Agama	17
Tabel 6	: Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang	33
Tabel 7	: Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	35
Tabel 8	: Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	37
Tabel 9	: Perbandingan Anggaran Awal dengan Anggaran Setelah Revisi Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2016	39
Tabel 10	: Perbandingan Anggaran Awal dengan Anggaran Setelah Revisi Berdasarkan Program Tahun 2016	39
Tabel 11	: Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2016	40
Tabel 12	: Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2016 dan 2015	40
Tabel 13	: Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP Lainnya	41
Tabel 14	: Perbandingan Realisasi PNBP Lainnya TA 2016 dan 2015	41
Tabel 15	: Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP BLU	43
Tabel 16	: Perbandingan Realisasi PNBP BLU TA 2016 dan 2015	43
Tabel 17	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2016 Berdasarkan Jenis Belanja	45
Tabel 18	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2016 Berdasarkan Program	46
Tabel 19	: Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 dan 2015	46
Tabel 20	: Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015	47
Tabel 21	: Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2016 dan 2015	48
Tabel 22	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015	49
Tabel 23	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2016 dan 2015	49
Tabel 24	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesi TA 2016 dan 2015	50
Tabel 25	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2016 dan 2015	51
Tabel 26	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2016 dan 2015	52
Tabel 27	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2016 dan 2015	53
Tabel 28	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal BLU TA 2016 dan 2015	53
Tabel 29	: Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2016 dan 2015	54
Tabel 30	: Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2016 dan 2015	55
Tabel 31	: Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2016 dan 2015	56

Tabel 32	: Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2016 dan 2015	57
Tabel 33	: Perbandingan Rincian Kas pada BLU TA 2016 dan 2015	57
Tabel 34	: Perbandingan Investasi Jangka Pendek BLU TA 2016 dan 2015	58
Tabel 35	: Rincian Investasi Jangka Pendek BLU TA 2016	58
Tabel 36	: Perbandingan Rincian Belanja yang Dibayar Di Muka TA 2016 dan 2015	58
Tabel 37	: Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2016 dan 2015	59
Tabel 38	: Perbandingan Rincian Piutang PNPB TA 2016 dan 2015	60
Tabel 39	: Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak TA 2016	61
Tabel 40	: Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2016 dan 2015	62
Tabel 41	: Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar TP/TGR 2016	62
Tabel 42	: Perbandingan Rincian Piutang Kegiatan Operasional BLU TA 2016 dan 2015	63
Tabel 43	: Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Operasional BLU TA 2016	64
Tabel 44	: Perbandingan Rincian Piutang Kegiatan Non Operasional BLU TA 2016 dan 2015	64
Tabel 45	: Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU TA 2016	65
Tabel 46	: Perbandingan Rincian Persediaan TA 2016 dan 2015	67
Tabel 47	: Perbandingan Rincian Persediaan BLU TA 2016 dan 2015	68
Tabel 48	: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	78
Tabel 49	: Rincian Aset Tak Berwujud	80
Tabel 50	: Rincian Aset Lain-Lain	81
Tabel 51	: Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya	82
Tabel 52	: Perbandingan Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga TA 2016 dan 2015	83
Tabel 53	: Perbandingan Rincian Pendapatan TA 2016 dan 2015	88
Tabel 54	: Perbandingan Rincian Beban Pegawai TA 2016 dan 2015	90
Tabel 55	: Perbandingan Rincian Beban Persediaan TA 2016 dan 2015	92
Tabel 56	: Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2016 dan 2015	93
Tabel 57	: Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan TA 2016 dan 2015	95
Tabel 58	: Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2016 dan 2015	96
Tabel 59	: Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2016 dan 2015	96
Tabel 60	: Perbandingan Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2016 dan 2015	97
Tabel 61	: Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2016 dan 2015	98
Tabel 62	: Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2016 dan 2015	99

Tabel 63	: Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2016 dan 2015	100
Tabel 64	: Perbandingan Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar TA 2016 dan 2015	100
Tabel 65	: Perbandingan Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2016 dan 2015	101
Tabel 66	: Perbandingan Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2016 dan 2015	102
Tabel 67	: Rincian Penyesuaian Nilai Aset TA 2016	103
Tabel 68	: Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2016	104
Tabel 69	: Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas	105
Tabel 70	: Selisih Neraca SAIBA dengan SIMAK BMN	108



PERNYATAAN TELAH DIREVIU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN RS FATMAWATI Nomor 33A CIPETE PO BOX 3687
TELEPON 021-75916038,7697853,7691849 FAX 021-7692112
JAKARTA 12420

PERNYATAAN TELAH DIREVIU OLEH
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
LAPORAN KEUANGAN AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2016


Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Agama untuk tahun anggaran 2016 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Kementerian Agama.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 28 April 2017

Plt. Inspektur Jenderal


Nur Syam



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2016 *Audited* yang terdiri atas: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut, telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan Kementerian Agama secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 28 April 2017

Menteri Agama



Lukman Hakim Saifuddin



RINGKASAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.355.473.077.982,00 atau mencapai 104,93 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp2.244.893.434.499,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2016 adalah sebesar Rp53.108.455.908.487,00 atau mencapai 93,48 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp56.815.475.045.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2016.

Nilai Aset per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp41.926.066.030.741,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp940.614.123.611,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp39.437.849.876.431,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp770.979.593,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.546.831.051.106,00; Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp4.673.169.470.676,00 dan Rp37.252.896.560.065,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2.306.116.936.811,00,

sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp53.979.065.161.056,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp51.672.948.224.245,00. Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp115.355.470.576,00 sehingga entitas mengalami Defisit LO sebesar Rp51.557.592.753.669,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp37.752.024.774.205,00, ditambah Defisit LO sebesar Rp51.557.592.753.669,00, ditambah dengan koreksi-koreksi yang mempengaruhi ekuitas sebesar Rp134.636.039.170,00 dan transaksi antarentitas senilai total Rp50.923.828.500.359,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp37.252.896.560.065,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2016 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KEMENTERIAN AGAMA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2016		% TERHADAP ANGGARAN	TA 2015	
		ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	2.244.893.434.499,00	2.355.473.077.982,00	104,93	2.019.877.460.038,00	
JUMLAH PENDAPATAN		2.244.893.434.499,00	2.355.473.077.982,00	104,93	2.019.877.460.038,00	
BELANJA	B.2					
Belanja Operasi						
Belanja Pegawai	B.3	36.158.094.537.000,00	34.541.164.145.141,00	95,53	32.270.917.657.206,00	
Belanja Barang	B.4	16.293.063.059.000,00	14.601.876.037.416,00	89,62	15.930.199.356.610,00	
Belanja Modal	B.5	3.085.627.064.000,00	2.775.928.613.052,00	89,96	4.035.683.467.597,00	
Belanja Bantuan Sosial	B.6	1.278.690.385.000,00	1.189.487.112.878,00	93,02	1.589.768.441.287,00	
JUMLAH BELANJA		56.815.475.045.000,00	53.108.455.908.487,00	93,48	53.826.568.922.700,00	

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



NERACA

II. NERACA

KEMENTERIAN AGAMA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam.Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2016	2015
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	2.675.693.411,00	12.466.714.369,00
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	15.182.173.448,00	4.689.631.678,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	35.835.312.489,00	27.119.291.379,00
Kas pada Badan Layanan Umum	C.4	746.624.184.795,00	620.506.163.294,00
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	C.5	24.154.970.314,00	22.000.000.000,00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.6	274.207.240,00	1.935.774.562,00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.7	13.830.032.136,00	11.368.913.052,00
Piutang Bukan Pajak	C.8	7.173.062.113,00	27.321.686.073,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.9	(1.934.053.371,00)	(1.433.713.723,00)
Piutang Bukan Pajak (Netto)		5.239.008.742,00	25.887.972.350,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.10	15.000.000,00	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.11	(75.000,00)	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		14.925.000,00	-
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.12	18.975.977.875,00	22.844.460.027,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.13	(2.837.499.476,00)	(1.407.195.110,00)
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)		16.138.478.399,00	21.437.264.917,00
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	C.14	2.845.061.482,00	5.465.610.192,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.15	(944.620.841,00)	(459.858.064,00)
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)		1.900.440.641,00	5.005.752.128,00
Persediaan	C.16	68.155.779.272,00	92.213.683.492,00
Persediaan Badan Layanan Umum	C.17	10.588.917.724,00	8.948.855.328,00
Jumlah Aset Lancar		940.614.123.611,00	853.580.016.549,00
ASET TETAP			
Tanah	C.18	12.279.674.359.187,00	12.066.004.403.231,00
Tanah Badan Layanan Umum	C.18	3.675.865.583.641,00	3.608.861.460.401,00
Peralatan dan Mesin	C.19	5.159.599.558.394,00	4.850.510.141.566,00
Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum	C.19	1.823.494.750.742,00	1.527.707.753.396,00
Gedung dan Bangunan	C.20	17.924.371.686.921,00	16.636.965.153.797,00
Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum	C.20	4.413.693.193.811,00	3.387.111.494.329,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.21	326.170.714.206,00	338.143.940.333,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan Badan Layanan Umum	C.21	233.264.568.318,00	173.538.253.567,00
Aset Tetap Lainnya	C.22	1.070.385.200.110,00	981.525.550.714,00
Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum	C.22	132.540.512.717,00	148.123.052.581,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.23	844.211.818.789,00	744.966.878.706,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum	C.23	512.694.922.591,00	1.036.776.910.692,00
Akumulasi Penyusutan	C.24	(8.958.116.992.996,00)	(7.915.511.916.097,00)
Jumlah Aset Tetap		39.437.849.876.431,00	37.584.723.077.216,00

URAIAN	CATATAN	2016	2015
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.25	771.071.926,00	(21.758.102,00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.26	(92.333,00)	(742.730,00)
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		770.979.593,00	(22.500.832,00)
Jumlah Piutang Jangka Panjang		770.979.593,00	(22.500.832,00)
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.27	89.965.331.268,00	87.533.022.965,00
Aset Tak Berwujud- Badan Layanan Umum	C.27	39.815.164.793,00	34.255.714.111,00
Aset Lain-lain	C.28	175.506.784.055,00	138.316.764.424,00
Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum	C.28	23.729.640.783,00	26.203.937.931,00
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	C.29	1.439.575.404.223,00	1.505.597.044.704,00
Dana Kelola Badan Layanan Umum	C.30	3.406.023.750,00	-
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.31	(225.167.297.766,00)	(107.330.885.658,00)
Jumlah Aset Lainnya		1.546.831.051.106,00	1.684.575.598.477,00
JUMLAH ASET		41.926.066.030.741,00	40.122.856.191.410,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.32	4.637.682.250.697,00	2.303.205.177.801,00
Hibah Yang Belum Disahkan	C.33	7.955.774.000,00	35.342.855.000,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C.34	23.515.800.440,00	19.650.705.177,00
Uang Muka dari KPPN	C.35	2.675.693.411,00	12.466.714.369,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.36	1.339.952.128,00	165.964.858,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		4.673.169.470.676,00	2.370.831.417.205,00
JUMLAH KEWAJIBAN		4.673.169.470.676,00	2.370.831.417.205,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.37	37.252.896.560.065,00	37.752.024.774.205,00
JUMLAH EKUITAS		37.252.896.560.065,00	37.752.024.774.205,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		41.926.066.030.741,00	40.122.856.191.410,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



LAPORAN OPERASIONAL FACE

III. LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN AGAMA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2016	2015
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	D.1		
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		2.306.116.936.811,00	1.905.820.326.505,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.306.116.936.811,00	1.905.820.326.505,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	37.167.875.137.967,00	32.686.059.428.307,00
Beban Persediaan	D.3	286.604.966.611,00	332.124.014.892,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	11.237.073.422.550,00	12.477.588.790.387,00
Beban Pemeliharaan	D.5	567.474.854.017,00	672.309.838.562,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.925.440.174.185,00	1.640.817.337.061,00
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	355.071.767.116,00	561.545.903.106,00
Beban Bantuan Sosial	D.8	1.188.200.289.835,00	1.599.185.342.852,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1.250.966.880.395,00	1.186.927.433.529,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	354.521.480,00	4.604.013.428,00
Beban Lain-lain	D.11	3.146.900,00	(37.490.912,00)
JUMLAH BEBAN		53.979.065.161.056,00	51.161.124.611.212,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(51.672.948.224.245,00)	(49.255.304.284.707,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR		(14.941.602.663,00)	(11.256.378.864,00)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		3.769.161.202,00	2.478.168.506,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		18.710.763.865,00	13.734.547.370,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		130.297.073.239,00	130.244.183.211,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		173.539.965.775,00	133.562.245.766,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		43.242.892.536,00	3.318.062.555,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		115.355.470.576,00	118.987.804.347,00
SURPLUS/DEFISIT LO		(51.557.592.753.669,00)	(49.136.316.480.360,00)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS FACE

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KEMENTERIAN AGAMA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2016	2015
EKUITAS AWAL	E.1	37.752.024.774.205,00	34.945.301.997.964,00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(51.557.592.753.669,00)	(49.136.316.480.360,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/ KESALAHAN MENDASAR			
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	300.797.775,00	104.283.703.894,00
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	(5.426.787.442,00)	2.826.008.701,00
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	-	(4.529.615.787,00)
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.4	93.691.987.143,00	(38.145.851.772,00)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	46.070.041.694,00	22.471.644.386,00
JUMLAH		134.636.039.170,00	86.905.889.422,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	50.923.828.500.359,00	51.856.133.367.179,00
EKUITAS AKHIR	E.5	37.252.896.560.065,00	37.752.024.774.205,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



CALK

PENDAHULUAN

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Agama

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 9 ayat (g) mengamanatkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Laporan Keuangan adalah wujud pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Menteri Agama sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Agama berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN di lingkungan kementerian yang dipimpinnya.

Dalam melaksanakan APBN, Menteri Agama telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama yang diberi pendelegasian wewenang kepada pimpinan satuan kerja (Satker) selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama.

Struktur Organisasi Kementerian Agama telah mengalami perubahan yaitu dengan adanya perubahan PMA 10 Tahun 2010 menjadi PMA 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Sebagaimana dijabarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 42 Tahun 2016 bahwa Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut maka dalam Pasal 2 PMA Nomor 42 Tahun 2016, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang

- bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi pada Kementerian Agama;
 - c. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
 - d. pengawasan atas pelaksanaan tugas pada Kementerian Agama;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
 - f. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
 - g. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan;
 - h. pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan
 - i. pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi pada Kementerian Agama.

Sedangkan susunan Organisasi Kementerian Agama terdiri atas 11 (sebelas) unit Kerja, antara lain:

- a. Sekretaris Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ;
- c. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh;
- d. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
- e. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
- f. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
- g. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
- h. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha;
- i. Inspektorat Jenderal;
- j. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan;
- k. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Kementerian Agama telah berupaya memberikan pelayanan secara maksimal pada masyarakat di bidang Keagamaan, maka Kementerian Agama dibantu oleh Unit Vertikal di tingkat Wilayah, Kabupaten/Kota dan Kecamatan sebagai Satuan Kerja yang tidak

dapat dipisahkan. Adapun Instansi Vertikal yang membentuk Satuan Kerja berjumlah 4.520 Satker yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Rincian Instansi Vertikal Kementerian Agama
Berdasarkan Satker

No.	Uraian Satuan Kerja	Jumlah
1.	Satker Unit Eselon I Pusat	10
2.	Kanwil Kementerian Agama Provinsi	33
3.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota	493
4.	Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri	68
5.	Madrasah (MIN, MTsN, MAN)	3.888
6.	Lajnah Pentasihan Al Qur'an	1
7.	Balai Diklat	13
8.	Balai Litbang	3
9.	Asrama Haji	9
10.	Atase Haji	1
11.	UPQ	1
	Jumlah	4.520

Sedangkan Selaku Entitas Akuntansi Kementerian Agama terbentuk 7.026 DIPA, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2
Rincian Instansi Vertikal Kementerian Agama
Berdasarkan DIPA

No.	Uraian Satuan Kerja	Jumlah
1.	Satker Unit Eselon I Pusat	10
2.	Kanwil Kementerian Agama Provinsi	264
3.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota	2.768
4.	Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri	68
5.	Madrasah (MIN, MTsN, MAN)	3.888
6.	Lajnah Pentasihan Al Qur'an	1
7.	Balai Diklat	13
8.	Balai Litbang	3
9.	Asrama Haji	9
10.	Atase Haji	1
11.	UPQ	1
	Jumlah	7.026

Struktur Kementerian Agama yang telah dibentuk merupakan sarana untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dibidang keagamaan. Strategi dalam mendukung pembangunan Agama dan Keagamaan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun, telah tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra) sebagaimana Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 s.d. 2019. Dan dalam Renstra Jangka menengah Kementerian Agama mempunyai misi: **“Terwujudnya Masyarakat Indonesia Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Dan Sejahtera Lahir Bathin Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka misi yang diemban Kementerian Agama adalah :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

Sedangkan tujuan pembangunan bidang agama (TA) untuk periode 2015- 2019 adalah:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
2. Penguatan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional.
3. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama

yang berkualitas dan merata.

4. Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan.
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel untuk pelayanan ibadah haji yang prima.
6. Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan pembangunan bidang pendidikan (TP), adalah:

1. Peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu terhadap pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun).
2. Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan.
3. Penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun).
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan.
5. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam melakukan proses mendidik yang profesional di seluruh satuan pendidikan.
6. Peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas.
7. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian Agama sampai dengan tahun 2016 didukung oleh 232.257 orang PNS yang memiliki berbagai kompetensi sesuai dengan bidang yang dibutuhkan, sebagai berikut:

Tabel 3
Jumlah Pegawai Kementerian Agama Tahun 2015-2016
Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	2012	2013	2014	2015	2016
1	Struktural	8.072	9.794	12.372	14.001	13.954
2	Fungsional Umum	53.395	47.505	43.210	46.504	47.642
3	Analisis Kepegawaian	439	354	337	314	309
4	Arsiparis	778	142	130	128	120
5	Auditor	147	172	204	309	314
6	Dokter	37	34	51	29	32
7	Perawat	11	10	6	6	8
8	Dosen	8.956	9.925	11.327	12.397	12.363
9	Guru	142.925	140.936	138.203	140.839	139.926
10	Litkayasa	48	42	39	28	26
11	Peneliti	119	146	153	166	158
12	Pengawas	4.693	5.177	5.837	6.076	6.314
13	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa				177	166
14	Penghulu	5.087	6.078	4.653	3.621	3.558
15	Penyuluh	4.302	4.534	4.641	5.608	6.196
16	Perencana	352	307	274	296	324
17	Pranata Humas	135	113	100	88	88
18	Pranata Komputer	233	146	113	71	80
19	Pranata Laboratorium Pendidikan				27	38
20	Pustakawan	244	257	268	282	291
21	Widyaiswara	323	345	355	14	14
22	Statistisi	12	10	16	342	336
	JUMLAH	230.308	226.027	222.289	231.323	232.257

Sedangkan program yang akan dilaksanakan dalam mendukung tugas dan fungsi kementerian Agama adalah :

Tabel 4
Rincian Program Kementerian Agama

No	Kode prog.	Uraian
1.	01	Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama
2.	03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara
3.	04	Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama
4.	06	Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah
5.	08	Program Bimbingan Masyarakat Islam
6.	07	Program Pendidikan Islam
7.	09	Program Bimbingan Masyarakat Kristen
8.	10	Program Bimbingan Masyarakat Katolik
9.	11	Program Bimbingan Masyarakat Hindu
10.	12	Program Bimbingan Masyarakat Budha
11.	13	Program Kerukunan Umat Beragama

Kebijakan teknis penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2016 telah mengalami perubahan, tahun 2015 penyusunan LKKA menggunakan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) yang dikonsolidasikan secara manual dan berjenjang dari SAIBA UAKPA, SAIBA UAPPAW, SAIBA UAPPA-E1 dan SAIBA UAPA. Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4839/PB/2016 tanggal 14 Juni 2016 perihal Pelaksanaan Rekonsiliasi Ekternal tingkat KPPN bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2016 bahwa pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga menggunakan aplikasi e-Rekon-LK berbasis *web* yang dapat diakses oleh seluruh Satker Kementerian Agama. Dimana penggabungan/konsolidasi dilakukan dengan *single database* dalam aplikasi E-rekon LK.

Data LKKA tingkat UAPPA-W, UAPPA-E1 dan UAPA yang telah terkonsolidasi dalam E-rekon dapat disajikan dengan cara *download* data LK, sedangkan Laporan Keuangan tingkat UAKPA menggunakan data yang berasal dari aplikasi SAIBA Satker. Dengan

perubahan sistem rekonsiliasi dan konsolidasi ini, maka diharapkan tidak terjadi kesalahan penyajian yang diakibatkan karena konsolidasi secara manual dan berjenjang, dengan sistem *single database* unit akuntansi di atasnya dapat melakukan monitoring secara berkala terhadap penyajian LK yang tidak sesuai dengan SAP.

Pedoman penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2016 juga telah mengalami perubahan, yaitu dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2011 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan PMK Nomor 177/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara dan Lembaga.
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama.
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 2015 tentang Penerapan Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Kementerian Agama
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.3. Profil Kementerian Agama

A.3.1. Kondisi Umum

Kondisi umum pembangunan Bidang Agama dan Bidang Pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mengacu pada upaya pencapaian tujuan Kementerian Agama yang mencakup 7 (tujuh) hal, yaitu:

- (1) Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
 - a. Penyediaan Penyuluh Agama
Upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan agama antara lain dilakukan melalui peningkatan kualitas tenaga penyuluh agama, penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan, dan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan.

Tabel 5

Rincian Jumlah Penyuluh Kementerian Agama

NO	PENYULUH AGAMA	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH PENYULUH			RASIO
			PNS	NON PNS	TOTAL	
1	Agama Islam	207.176.162	4.016	75.313	79.329	1 : 2612
2	Agama Kristen	16.528.513	264	17.208	17.472	1 : 946
3	Agama Katolik	6.907.873	224	4.000	4.224	1 : 1635
4	Agama Hindu	4.012.116	198	3.789	3.987	1 : 1006
5	Agama Budha	1.703.254	60	1.722	1.782	1 : 956
6	Agama Konghucu	117.091		100	100	1 : 1171
7	Agama Lainnya	299.617				
		236.744.626	4.762	102.132	106.894	

b. Festival Keagamaan

Penyelenggaraan festival keagamaan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan ritual keagamaan bagi umat beragama yang berperan penting dalam penanaman nilai-nilai ajaran agama. Kementerian Agama telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan, termasuk penyelenggaraan lomba membaca kitab suci tiap agama, seperti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ), Pesparawi, Utsawa Dharma Gita, dan Swayamwara Tripitaka Gatha (STG), Sippa Dhamma Samajja dan Mahaniti Loka Dhamma.

c. Pemberdayaan Lembaga Sosial Keagamaan

Diperhitungkan ada 7.444 lembaga sosial keagamaan Islam, 900 lembaga persekutuan gerejawi/sinode gereja/yayasan Kristen, 1.900 keuskupan/paroki/lembaga keagamaan Katolik, 1.122 lembaga keagamaan Hindu, 419 lembaga keagamaan Buddha dan 242 lembaga keagamaan Khonghucu yang turut berperan serta dalam melayani umat beragama sesuai dengan bidangnya masing-masing.

(2) Peningkatan kualitas pelayanan kerukunan beragama;

a. Penguatan Aspek Regulasi dan Kebijakan.

Kebebasan beragama sebagaimana diamanatkan oleh

konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 29 ayat (2), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) yang diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum, terutama bagi agama-agama yang baru dipeluk oleh penduduk Indonesia atau kepercayaan yang diklaim sebagai agama baru di Indonesia.

b. Peningkatan Kapasitas Aktor-aktor Kerukunan Umat Beragama.

Pemerintah khususnya Kementerian Agama telah berupaya memfasilitasi program maupun kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara kerukunan umat beragama melalui kemitraan dengan seluruh komponen masyarakat yang terdiri atas tokoh masyarakat-tokoh agama (toma-toga), tokoh perempuan, insan jurnalis, serta unsur pemuda yang berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar. Kapasitas personal mereka juga terus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan kerukunan, seperti peningkatkan wawasan multikultur, kemampuan manajemen pencegahan dan penanganan konflik, maupun kegiatan promosi kerukunan beragama maupun penyiaran media yang berorientasi pada jurnalisme damai (*peace journalism*).

c. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Lembaga Keagamaan dan Institusi Media.

Sampai saat ini, FKUB telah terbentuk hampir di semua provinsi dan kabupaten/kota. Dari 34 provinsi yang ada, hanya satu FKUB provinsi yang belum terbentuk, yakni di provinsi Kalimantan Utara, sebuah provinsi yang baru lahir. Sementara dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, telah terdapat 465 FKUB kabupaten/kota yang telah dibentuk. Dengan jumlah tersebut di seluruh Indonesia, tidak terlalu berlebihan jika organisasi kemasyarakatan ini bisa disebut sebagai organisasi kemasyarakatan lintas agama terbesar

sedunia. Untuk itu, Pemerintah telah menyelenggarakan Kongres FKUB secara nasional dan regional yang diikuti oleh FKUB Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota secara berkala sebagai bagian dari upaya penguatan fungsi FKUB.

d. Pengembangan dan penguatan Kesadaran Kerukunan Umat Beragama.

Keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam upaya pemeliharaan kerukunan juga memiliki urgensi yang sangat tinggi, khususnya dari kalangan pemuda, mahasiswa, dan pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, berbagai kegiatan yang memiliki unsur pelibatan masyarakat akar rumput telah dilakukan, seperti dalam bentuk pemberian Anugerah Bidang Kerukunan (*Harmony Award*) bagi tokoh agama, individu yang berjasa, dan insan jurnalis; Karnaval Kerukunan (*Inter-Religious Harmony Carnival*); Kemah Pemuda Lintas Agama (*Interfaith Youth Camp*) ataupun berbagai ajang kompetisi/lomba lainnya terkait kerukunan beragama bagi kalangan masyarakat.

Di tingkat pusat, Kementerian Agama juga membangun Pusat Harmoni Lintas Iman (*Inter-Religious Harmony Centre*). Di samping itu dalam rangka turut serta mewujudkan ketertiban dunia, Pemerintah juga berperan serta dalam kegiatan *Interfaith and Intercultural Dialogue* baik secara regional, bilateral, maupun multilateral. Kementerian Agama RI bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI secara rutin merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan *Interfaith Dialogue* sebagai “*soft power diplomacy*” dalam mempromosikan perdamaian dunia.

e. Pembinaan Aliran Keagamaan

Selama lima tahun terakhir, aliran-aliran keagamaan masih menjadi salah satu fenomena yang mewarnai kehidupan keagamaan di Indonesia. Kementerian Agama secara proaktif melakukan berbagai langkah penanganan dengan tetap menjamin hak-hak dasar warga negara, antara lain sosialisasi

pentingnya menjaga kemerdekaan beragama dan berkeyakinan dengan tidak melakukan penodaan agama, mendorong dan memfasilitasi tokoh-tokoh agama agar melakukan pembinaan terhadap umatnya secara intens dan simultan, serta memberikan pemahaman dan pencegahan dini agar masyarakat tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam menangani berbagai permasalahan paham keagamaan.

(3) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama;

a. Pelayanan administrasi keagamaan.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama yang menempati posisi terdepan dalam pelayanan administrasi keagamaan umat Islam. Jumlah KUA pada Tahun 2014 adalah 5.497 KUA menyesuaikan pemekaran wilayah di beberapa daerah dan masih terdapat 501 KUA baru yang diusulkan untuk mendapat persetujuan dari Kemenpan RB agar pelayanan masyarakat di wilayah pemekaran dapat terselenggara. Dari seluruh KUA yang definitif tersebut baru tersedia 1.741 atau 32% KUA yang telah memenuhi standard pelayanan masyarakat.

Di samping pelayanan administrasi keagamaan, di KUA juga terdapat berbagai bentuk dan jenis layanan lain, seperti layanan perwakafan, produk halal, layanan hisab rukyat, layanan data dan informasi keagamaan, bimbingan manasik haji, konsultasi keluarga sakinah, dan lain-lain. Kini KUA telah menjadi lembaga publik yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas aplikasi layanan berbasis IT, seperti Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), Sistem Informasi Masjid (SIMAS), Sistem Informasi Manajemen Penerangan Agama Islam (SIMPENAIIS), dan Sistem Informasi Manajemen Penghulu (SIM Penghulu). Satu langkah penting capaian dalam pelayanan keagamaan adalah telah terjalinnya kerja sama (MoU) dengan Kemendagri dan MA dalam integrasi pengelolaan data kependudukan.

b. Penyediaan kitab suci.

Kementerian Agama telah melakukan penggandaan kitab suci

Al-Qur'an sebanyak 3.480.250 eksemplar yang didistribusikan ke 33 provinsi. Penggandaan Al-Qur'an terdiri dari Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Juz Amma dan Terjemahnya, Tafsir Al-Qur'an, Surah Yasin, Al-Qur'an Saku, Tafsir Ilmi, dan Tafsir Tematik. Kitab suci Al-Qur'an tersebut didistribusikan kepada individu, rumah tangga muslim, lembaga pendidikan Islam, majelis taklim, serta masjid dan mushalla.

Kementerian Agama juga telah mengadakan kitab suci/buku keagamaan umat Kristen sebanyak 216.343 eksemplar dan untuk umat Katolik sebanyak 169.450 eksemplar. Untuk umat Hindu, Kitab suci Hindu yang sudah dicetak sebanyak 38 judul buku keagamaan/kitab suci dengan jumlah 201.293 eksemplar yang konsep pengadaannya diarahkan pada buku-buku yang tergolong dalam kodifikasi Weda yang telah direkomendasikan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat. Sementara untuk umat Buddha, Kementerian Agama telah melakukan pengadaan kitab suci Tipitaka/Tripitaka sebanyak 21.798 eksemplar berupa beberapa bagian dari kitab suci Sutta Pitaka, yaitu Abhidhamma Pitaka dan Millinda Panha, Petavathu, riwayat Buddha Gautama bergambar, dan Dhammapada sebanyak 5.000 eksemplar serta Buku Tuntunan Puja Bhakti sebanyak 5000 eksemplar dan buku-buku keagamaan lainnya. Selanjutnya buku-buku tersebut telah didistribusikan kepada masing-masing komunitas umat beragama.

c. Pengembangan rumah ibadah;

Berdasarkan jumlah pemeluk agama dan jumlah rumah ibadah tampak bahwa semua pemeluk agama telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan rumah ibadah (masjid, mushalla, gereja, pura, cetiya, vihara, dan klenteng), meski dalam rasio yang bervariasi. Satu masjid, misalnya, secara rata-rata digunakan oleh 715 pemeluk muslim, sementara satu gereja Kristen melayani 267 pemeluk Kristen, satu gereja Katolik melayani 874 pemeluk Katolik, satu pura digunakan

162 pemeluk Hindu, satu vihara melayani 510 pemeluk Buddha, dan satu kelenteng melayani 180 umat Khonghucu.

(4) Peningkatan pemanfaatan dan kualitas Pengelolaan potensi Ekonomi Keagamaan;

a. Pengelolaan dan pendayagunaan zakat;

Untuk mengoptimalkan potensi zakat beberapa kebijakan telah dilakukan pemerintah antara lain, menerbitkan UU Nomor 23 Tahun 2011 sebagai revisi UU No. 38 Tahun 1999 sejalan dengan semangat integrasi pengelolaan zakat. Selanjutnya telah diterbitkan juga Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat dan Inpres No 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat. Pembayaran zakat orang pribadi pada BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat yang disahkan pemerintah memperoleh insentif dari negara, yaitu sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

b. Pengelolaan dan Pendayagunaan wakaf;

Untuk wakaf, Kementerian Agama telah melakukan pengembangan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) sebagai database aset wakaf, dan pemetaan dan identifikasi potensi harta wakaf di seluruh tanah air. Berdasarkan data Kementerian Agama tahun 2014, tanah wakaf tersebar di 435.395 lokasi dengan luas total 4.142.464.787,906 m² di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 67,22% telah bersertifikat, sedangkan 32,78% masih belum bersertifikat. Data tersebut memperlihatkan masih cukup banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat sehingga berpotensi mengalami sengketa di kemudian hari.

c. Pengelolaan dan pendayagunaan dana kolekte umat Kristen;

Gereja juga berperan dalam pelayanan sosial (diakonia) yang dimanfaatkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi gereja yaitu membantu fakir-miskin, orang jompo, penanggulangan bencana alam, pendidikan dan kesehatan yang pendanaannya bersumber dari kolekte.

d. Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana Punia;

Untuk agama Hindu pengelolaan Dana Punia dikelola langsung

oleh Badan Dharma Dana Nasional (BDDN). BDDN ini merupakan lembaga yang didirikan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) melalui Bhisama No. IV/TAP/M.Sabha tentang Dharma Dana Nasional yang keberadaannya diperkuat dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu No : 43 tahun 2012 tentang Badan Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisada sebagai Lembaga yang sah menerima dan Mengelola Dharma Dana Hindu Indonesia.

e. Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana Paramita.

Peran umat Buddha dalam membiayai kebutuhan operasional harian rumah ibadah dilakukan salah satunya melalui pengelolaan Dana Paramita yang dikumpulkan secara sukarela.

Pengelolaan Dana Paramita dilakukan oleh pengurus rumah ibadah yang langsung dikelola masyarakat Buddha.

(5) Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;

a. Revitalisasi Asrama Haji.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) sudah menyetujui 9 (sembilan) asrama haji yang akan ditetapkan sebagai UPT, hanya tinggal menunggu terbitnya Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri PAN & RB. Sembilan asrama haji yang akan ditetapkan sebagai UPT yakni asrama haji Aceh, Medan, Padang, Jakarta (Pondok Gede), Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar dan Nusa Tenggara Barat.

b. Pengembangan Sistem Pendaftaran Haji.

Pengembangan pendaftaran haji sistem online juga telah dilakukan secara bertahap yang diawali memanfaatkan main system milik Garuda Indonesia sebagai host Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang tersambung dengan Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH, yang dimulai sejak tahun 1996.

Siskohat pada awalnya didesain berbasis Green Screen (Aplikasi Power Term) dimana pengguna dan lisensi yang

terbatas yaitu pengguna harus meng-install aplikasi khusus. Namun semakin berkembangnya teknologi, Siskohat yang dikembangkan sudah berbasis website yang dapat diakses dimanapun dengan menggunakan browser internet seperti Google Chrome, Internet Explorer dan Mozilla Firefox.

c. Pengembangan Pelayanan Haji.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Jemaah haji, telah ditempuh langkah-langkah perbaikan berupa pengembangan Sistem Manajemen Mutu (SMM), penyusunan dan penerbitan ISO:9001 dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010 yang telah diperoleh sejak Tahun 2010. Penerapan ISO 9001 diterapkan pada pada unit pelayanan haji di pusat, sebagian daerah dan Arab Saudi. Untuk menjamin terlaksananya sistem ISO 9001 dilakukan internal audit dan eksternal audit (*surveillance*), untuk memungkinkan melakukan penyempurnaan SMM dan pembaruan *Standart Operating Procedure* (SOP) apabila diperlukan. Salah satu tuntutan penerapansistem ISO 9001 adalah keharusan pengukuran terhadap kepuasan pelanggan (jemaah haji).

d. Optimalisasi Dana Haji dan Reformasi Keuangan Haji.

untuk memperjelas sumber pemenuhan biaya penyelenggaraan ibadah haji, Kementerian Agama telah melakukan pemilahan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu *Direct Cost* dan *Indirect Cost*. *Direct Cost* adalah komponen BPIH yang dibebankan langsung kepada jemaah haji dan *Indirect Cost* adalah komponen BPIH yang dibebankan kepada nilai manfaat dari setoran awal BPIH. Sejak tahun 2007, dengan meningkatnya setoran awal dan nilai manfaat, atas dukungan dan persetujuan DPR RI, nilai manfaat telah digunakan untuk mengurangi beban jemaah haji (*Direct Cost*).

e. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Haji.

Sejak tahun buku 2011, untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan BPIH, Kementerian Agama telah melakukan beberapa langkah, yaitu rekrutmen tenaga akuntan, sosialisasi

dan pelatihan akuntansi keuangan, serta menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan menggunakan referensi utama Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

f. Akuntabilitas Dana Abadi Umat (DAU).

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Laporan Keuangan DAU telah diaudit oleh BPK RI dan memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan DAU, yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, agar pengelolaan keuangan haji akan dikelola secara independen oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPKH memiliki posisi yang strategis karena merupakan badan independen penampung setoran awal BPIH yang bertanggungjawab ke Presiden melalui Menteri Agama. Untuk operasionalisasi BPKH, saat ini sedang dipersiapkan instrumen pendukung dan turunan UU 34 tahun 2014 tersebut.

g. Pengembangan Pelayanan Umrah.

Ditjen PHU tidak menyelenggarakan ibadah umrah secara langsung, namun tugas dan fungsi Kementerian Agama adalah sebagai pemegang otoritas perizinan dan melakukan pengawasan dalam rangka perlindungan dan kelancaran jamaah umrah. Para pejabat dan jajaran Kementerian Agama berperan dalam mengarahkan masyarakat agar berhati-hati sehingga tidak tertipu oleh biro perjalanan umrah yang tidak memiliki izin resmi dari Kementerian Agama. Untuk telah dilakukan peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan umrah dan akreditasi terhadap PPIU.

(6) Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;

a. Peningkatan Akses Pendidikan Madrasah.

Dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah, Kementerian Agama telah melaksanakan upaya antara lain pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS), penyaluran bantuan siswa miskin (BSM), rehabilitasi ruang kelas rusak berat, pemberian bantuan ruang kelas baru (RKB), dan pendirian unit sekolah baru (USB). Selain itu, juga dilakukan upaya peningkatan kemitraan bersama masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan pendidikan yaitu melalui pendirian madrasah swasta. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah telah berlangsung sejak awal berdirinya madrasah dan telah mendorong meningkatnya jumlah lembaga pendidikan madrasah. Pada tahun 2014 tercatat bahwa sebanyak 91,8% MI/MTs/MA merupakan madrasah yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat.

b. Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah;

Kementerian Agama secara konsisten berusaha meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di madrasah meliputi seluruh jenjang. Salah satu yang ditempuh adalah dengan menyelenggarakan program sertifikasi guru dan dosen. Sampai dengan 2014, jumlah guru yang sudah bersertifikasi sebanyak 245.326 orang, meningkat sebesar 265,27 persen dibandingkan tahun 2010 yang hanya sebanyak 67.163 orang. Sinergi dengan itu dilaksanakan pula program peningkatan kualifikasi guru madrasah untuk S1 dan S2.

c. Peningkatan Akses dan Kualitas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

d. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Pasca lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diniyah dan pondok pesantren sebagai pendidikan keagamaan Islam mendapatkan momentumnya tersendiri. Momentum itu kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam yang kemudian disusul dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren. Dengan lahirnya sejumlah aturan tersebut, pendidikan diniyah dan pondok pesantren mendapatkan penguatan kesetaraan, baik pada aspek kesetaraan regulasi, kesetaraan program maupun kesetaraan anggaran.

e. Peningkatan Pendidikan Agama Islam

Kementerian Agama juga terus melakukan upaya pengembangan kurikulum. Terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang kemudian melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, menjadi momentum yang sangat penting bagi posisi PAI. Menindaklanjuti momentum tersebut, Kementerian Agama menerbitkan PMA Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, dan KMA Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, yang juga mengatur masalah standarisasi kurikulum PAI.

f. Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Islam

Ditjen Pendidikan Islam terus melakukan upaya strategis dalam rangka menciptakan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan yang baik. Berkaitan dengan kegiatan ini ada 2 (dua) aspek pokok yang dikembangkan Ditjen Pendidikan Islam, yaitu melalui aspek kelembagaan dan aspek kerjasama.

g. Pendidikan Agama dan Pendidikan Agama Kristen

Di lingkungan Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama, Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen meningkat dengan tersedianya layanan pendidikan keagamaan pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan

tinggi. Hingga tahun 2014, Pendidikan keagamaan Kristen pada setiap jenjang yang dibina Ditjen Bimas Kristen yaitu : Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) sebanyak 15 lembaga, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) sebanyak 29 lembaga, Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) sebanyak 138 lembaga, Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) sebanyak 5 lembaga, dan Perguruan Tinggi Teologi/Agama Kristen (PTT/AK) sebanyak 351 lembaga.

h. Pendidikan Agama dan Pendidikan Agama Katolik

Upaya peningkatan kualitas pendidikan juga terus didorong melalui upaya peningkatan kualitas tenaga pengajar, antara lain dengan memberikan bantuan peningkatan kualifikasi pendidikan kepada 5.115 guru/dosen agama Katolik terdiri 5.041 Guru untuk Pendidikan S1, 68 Dosen untuk Pendidikan S2, dan 6 orang Dosen untuk Pendidikan S3. Selanjutnya telah dilaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru pendidikan agama Katolik yang diberi tugas tambahan sebagai pengawas pendidikan agama Katolik bagi 6.453 guru.

i. Pendidikan Agama dan Pendidikan Agama Hindu

Dalam rangka efektifitas pencetakan ahli agama melalui lembaga pendidikan keagamaan, maka telah dirintis pengembangan pendidikan keagamaan formal agama Hindu. Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan pada pasraman formal diselenggarakan berjenjang: pratama, adi, madyama, utama dan maha widyapasraman.

Untuk meningkatkan kualifikasi guru Agama Hindu sebanyak 6.826 guru telah dilakukan kualifikasi Guru Agama Hindu sebanyak 919 guru dari guru yang belum S1/DIV sebanyak 2.988 guru. Dari guru sebanyak 6.826 telah disertifikasi dan menerima tunjangan Profesi guru sebanyak 5.985 guru.

j. Pendidikan Agama dan Pendidikan Agama Budha

Pembinaan pendidikan keagamaan Buddha difokuskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang penyelenggaraanya dilakukan di Sekolah Minggu Buddha (SMB/Vijjalaya) dan Dhammasekha dengan jenjang Nava,

Mula, Muda dan Utama Dhamma Sekha. Kehadiran SMB/Vijjalaya di Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya siswa yang beragama Buddha yang tidak mendapatkan pelajaran agama Buddha di sekolah umum yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam rangka menjamin mutu layanan pendidikan keagamaan, Kementerian Agama telah menetapkan peraturan yang mengatur kelembangaan dan program pendidikan keagamaan dalam kerangka sistem pendidikan nasional melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Buddha. Sampai dengan tahun 2014 Pendidikan Keagamaan Buddha non formal telah berdiri sebanyak 783 SMB/Vijjalaya, 32 Dhammasekha, dan 5 Pabbajja Samanera.

k. Pendidikan Agama dan Pendidikan Agama Konghucu.

Di lingkungan agama Khonghucu, pengembangan pendidikan yang dilakukan Kementerian Agama antara lain berupa pengembangan kurikulum pendidikan agama Khonghucu, pelatihan bagi guru agama Khonghucu, dan pembentukan Sekolah Tinggi Agama Khonghucu. Pengembangan pendidikan agama dan keagamaan Khonghucu berjalan seiring dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Agama Nomor SJ/B.VII/1/BA.02/704/2010 tentang Pelayanan Hak Sipil dan Pendidikan Agama Konghucu.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.4. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Agama. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis

A.5. Basis Akuntansi

Akuntansi

Kementerian Agama menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

A.6. Dasar Pengukuran

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Agama dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

A.7. Kebijakan Akuntansi

Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian

laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Khusus pendapatan PNBPF fungsional di Kementerian Agama, pengakuan PNBPF Pendidikan dan Nikah Rujuk mengacu pada KMA 350 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Agama Negeri, Jasa Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan Umum pada Kementerian Agama, bahwa pendapatan fungsional dicatat sebesar nilai rupiah berdasarkan SSBP dan saldo yang berada di bendahara penerimaan tahun anggaran yang lalu dan saldo kas di bendahara penerimaan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan

hukum tetap.

- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 6

Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik

pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang

pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan
Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 7

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 8

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban (6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



CALK LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kementerian Agama telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 9

Perbandingan Anggaran Awal dengan Anggaran Setelah Revisi Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2016

URAIAN	2016	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Belanja		
Belanja Pegawai	35.509.418.890.000,00	36.158.094.537.000,00
Belanja Barang	17.072.952.022.000,00	16.293.063.059.000,00
Belanja Modal	2.999.685.949.000,00	3.085.627.064.000,00
Belanja Bantuan Sosial	1.246.985.450.000,00	1.278.690.385.000,00
Jumlah Belanja	56.829.042.311.000,00	56.815.475.045.000,00

Sedangkan apabila dilihat dari program maka perubahannya adalah sebagai berikut:

Tabel 10

Perbandingan Anggaran Awal dengan Anggaran Setelah Revisi Berdasarkan Program Tahun 2016

PROGRAM	2016	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Kementerian Agama	2.545.290.318.000,00	2.224.878.007.000,00
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	90.577.210.000,00	96.778.272.000,00
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	140.097.161.000,00	139.810.164.000,00
Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	611.414.792.000,00	574.045.616.000,00
Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	1.069.552.804.000,00	1.100.716.913.000,00
Program Pendidikan Islam	44.195.771.941.000,00	44.240.451.758.000,00
Program Bimbingan Masyarakat Islam	5.016.056.572.000,00	5.200.480.519.000,00
Program Bimbingan Masyarakat Kristen	1.413.063.771.000,00	1.499.158.317.000,00
Program Bimbingan Masyarakat Katolik	819.531.222.000,00	817.918.504.000,00
Program Bimbingan Masyarakat Hindu	627.695.159.000,00	634.664.130.000,00
Program Bimbingan Masyarakat Buddha	299.991.361.000,00	286.572.845.000,00
Total Belanja	56.829.042.311.000,00	56.815.475.045.000,00

Rincian atas Anggaran berdasarkan eselon I disajikan dalam lampiran 1.

Realisasi

Pendapatan

Rp2.355.473.077.982,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2.355.473.077.982,00 atau mencapai 104,93 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.244.893.434.499,00. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

Tabel 11

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

URAIAN	2016		
	ESTIMASI	REALISASI	% REAL ANGGARAN
Pendapatan			
PNBP Lainnya	1.348.334.790.939,00	1.285.006.009.646,00	95,30
PNBP BLU	896.558.643.560,00	1.070.467.068.336,00	119,40
Jumlah Pendapatan	2.244.893.434.499,00	2.355.473.077.982,00	104,93

Realisasi Pendapatan TA 2016 di atas estimasi pendapatan disebabkan oleh adanya pelampauan realisasi PNBPN BLU dari yang direncanakan.

Sedangkan Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2016 dengan TA 2015 Kementerian Agama adalah Sebagai Berikut:

Tabel 12

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Pendapatan			
PNBP Lainnya	1.285.006.009.646,00	1.221.834.051.434,00	5,17
PNBP BLU	1.070.467.068.336,00	798.043.408.604,00	34,14
Jumlah Pendapatan	2.355.473.077.982,00	2.019.877.460.038,00	16,61

Realisasi Pendapatan untuk periode TA 2016 dibandingkan dengan TA 2015 terdapat kenaikan sebesar 16,61 persen. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan PNBPN BLU yang cukup signifikan di tahun 2016 dibandingkan tahun 2015.

Realisasi
Pendapatan
Negara Bukan
Pajak Lainnya
Rp1.285.006.009.646,00

B.1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.285.006.009.646,00 atau 95,30 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.348.334.790.939,00. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

Tabel 13

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN Lainnya

No.	Uraian	2016		% Realisasi Anggaran
		Estimasi	Realisasi	
1	Pendapatan Jasa KUA	923.532.158.595,00	737.557.198.340,00	79,86
2	Pendapatan Pendidikan	424.779.232.344,00	404.462.171.326,00	95,22
3	Pendapatan Umum	23.400.000,00	142.986.639.980,00	611.054,02
	Jumlah Pendapatan	1.348.334.790.939,00	1.285.006.009.646,00	95,30

Sedangkan Perbandingan Realisasi Pendapatan PNBPN Lainnya TA 2016 dengan TA 2015 Kementerian Agama adalah Sebagai Berikut:

Tabel 14

Perbandingan Realisasi PNBPN Lainnya TA 2016 dan 2015

No.	Uraian	Realisasi Pendapatan		Naik/ Turun	
		TA 2016	TA 2015	Jumlah	%
1	Pendapatan Jasa KUA	737.557.198.340,00	733.105.375.793,00	4.451.822.547,00	0,61
2	Pendapatan Pendidikan	404.462.171.326,00	327.034.625.314,00	77.427.546.012,00	23,68
3	Pendapatan Umum	142.986.639.980,00	161.694.050.327,00	(18.707.410.347,00)	(11,57)
	Jumlah Pendapatan	1.285.006.009.646,00	1.221.834.051.434,00	63.171.958.212,00	5,17

Dari data di atas terlihat bahwa realisasi PNBK Lainnya di bawah dari estimasinya karena tidak tercapainya target pendapatan jasa KUA yang hanya tercapai 79,86%. Hal ini disebabkan oleh estimasi Pendapatan Jasa KUA yang disusun tanpa melihat atau mempertimbangkan proposal yang masuk, sehingga menyebabkan estimasi yang sangat tinggi.

B.1.2. Pendapatan Badan Layanan Umum

*Realisasi
Pendapatan
Badan Layanan
Umum
Rp1.070.467.068.336,00*

Pendapatan BLU adalah pendapatan dari Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Agama yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Sampai dengan tahun 2016, Satuan Kerja yang telah menerapkan PPK-BLU adalah 16 (enam belas) yang semuanya merupakan Satuan Kerja PTKN.

No.	Nama PTAN
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung
5	UIN Alaudin Makassar
6	UIN Walisongo Semarang
7	UIN Sumatera Utara
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau
9	IAIN Sulthan Thaha Jambi
10	UIN Sunan Ampel Surabaya
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
12	IAIN Raden Intan Lampung
13	UIN Raden Fatah Palembang
14	IAIN Mataram
15	UIN Ar Raniry Banda Aceh
16	IAIN Imam Bonjol Padang

Pendapatan BLU terdiri dari :

- a. Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan,
- b. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya,
- c. Pendapatan Hibah BLU,
- d. Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan,
- e. Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha
- f. Pendapatan Hasil Kerjasama Pemerintah Daerah
- g. Pendapatan BLU Lainnya.

Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.070.467.068.336,00 atau mencapai 119,40 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp896.558.643.560,00. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

Tabel 15

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan BLU

No.	Uraian	2016		% Realisasi Anggaran
		Estimasi	Realisasi	
1	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	856.080.688.084,00	964.107.703.968,00	112,62
2	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	19.227.436.000,00	36.492.635.841,00	189,79
3	Pendapatan Hibah BLU	-	23.023.382.700,00	-
4	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	-	3.524.801.184,00	-
5	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/ Badan Usaha	14.474.864.000,00	18.657.460.854,00	128,90
6	Pendapatan Hasil Kerjasama Pemerintah Daerah	0	365.000.000,00	-
7	Pendapatan BLU Lainnya	6.775.655.476,00	24.296.083.789,00	358,58
	Jumlah Pendapatan	896.558.643.560,00	1.070.467.068.336,00	119,40

Sedangkan Perbandingan Realisasi Pendapatan PNPB BLU TA 2016 dengan TA 2015 Kementerian Agama adalah Sebagai Berikut:

Tabel 16

Perbandingan Realisasi PNPB BLU TA 2016 dan 2015

No.	Uraian	Realisasi Pendapatan		Naik/ Turun	
		TA 2016	TA 2015	Jumlah	%
1	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	964.107.703.968,00	726.332.282.180,00	237.775.421.788,00	32,74
2	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	36.492.635.841,00	26.556.504.014,00	9.936.131.827,00	37,42
3	Pendapatan Hibah BLU	23.023.382.700,00	-	23.023.382.700,00	-
4	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	3.524.801.184,00	2.763.282.057,00	761.519.127,00	27,56
5	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/ Badan Usaha	18.657.460.854,00	21.634.884.927,00	(2.977.424.073,00)	(13,76)
6	Pendapatan Hasil Kerjasama Pemerintah Daerah	365.000.000,00	-	365.000.000,00	-
7	Pendapatan BLU Lainnya	24.296.083.789,00	20.756.455.426,00	3.539.628.363,00	17,05
	Jumlah Pendapatan	1.070.467.068.336,00	798.043.408.604,00	272.423.659.732,00	34,14

Pada tahun 2016 realisasi pendapatan BLU mengalami kenaikan sejumlah 34,14 persen. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Terdapat tambahan dua jenis pendapatan BLU yaitu Pendapatan Hibah BLU dan Pendapatan Hasil Kerjasama Pemerintah Daerah. Adapun pendapatan hibah BLU berupa hibah uang dari Pemerintah Provinsi dan diberikan kepada tiga satker yaitu:

BAES1-SATKER	NAMA SATKER	NILAI HIBAH
02504.423523	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG JATI BANDUNG	999.965.000,00
02504.424260	IAIN RADEN INTAN BANDAR LAMPUNG	300.000.000,00
02504.423770	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA	21.723.417.700,00
	JUMLAH	23.023.382.700,00

Dan pendapatan hasil kerjasama pemerintah daerah didapat dari sewa lahan Sayyida In (hotel), pusat Bahasa dan pusat laboratorium terpadu.

2. Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan karena meningkatnya jumlah mahasiswa sehingga meningkat juga pendapatan SPP dan Praktikum.
3. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya dikarenakan meningkatnya biaya konsultasi dosen, sewa gedung dan jasa giro.
4. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU dikarenakan meningkatnya pendapatan bunga bank dan bunga deposito.
5. Penambahan pendapatan dari Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Realisasi

Belanja

Rp53.108.455.908.487,00

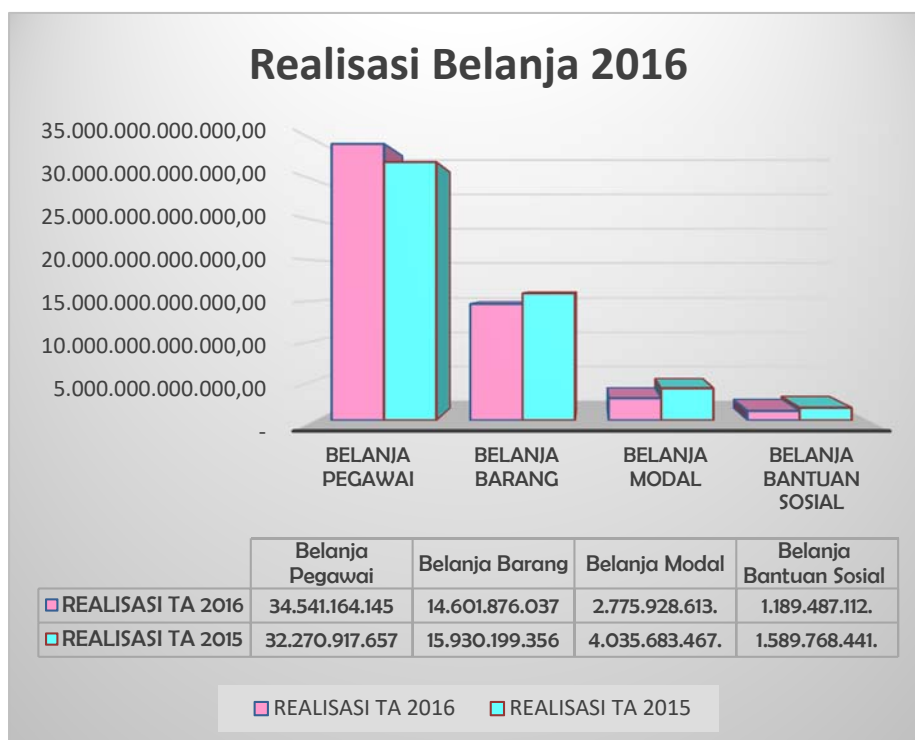
B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Kementerian Agama pada TA 2016 adalah sebesar Rp53.108.455.908.487,00 atau 93,48 persen dari anggaran belanja sebesar Rp56.815.475.045.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2016 tersaji sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2016
Berdasarkan Jenis Belanja

URAIAN	2016		
	ANGGARAN	REALISASI	% REAL ANGGARAN
Belanja			
Belanja Pegawai	36.158.094.537.000,00	34.574.136.903.785,00	95,62
Belanja Barang	16.293.063.059.000,00	14.658.125.233.818,00	89,97
Belanja Modal	3.085.627.064.000,00	2.776.599.901.990,00	89,98
Belanja Bantuan Sosial	1.278.690.385.000,00	1.189.793.236.182,00	93,05
Total Belanja Kotor	56.815.475.045.000,00	53.198.655.275.775,00	93,63
Pengembalian Belanja		(90.199.367.288,00)	
Total Belanja	56.815.475.045.000,00	53.108.455.908.487,00	93,48

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2016
Berdasarkan Program

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Kementerian Agama	2.224.878.007.000,00	1.973.511.297.321,00	88,70
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	96.778.272.000,00	81.558.439.256,00	84,27
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	139.810.164.000,00	130.810.780.005,00	93,56
Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	574.045.616.000,00	492.376.464.166,00	85,77
Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	1.100.716.913.000,00	956.311.325.877,00	86,88
Program Pendidikan Islam	44.240.451.758.000,00	41.971.764.080.074,00	94,87
Program Bimbingan Masyarakat Islam	5.200.480.519.000,00	4.497.744.114.664,00	86,49
Program Bimbingan Masyarakat Kristen	1.499.158.317.000,00	1.426.110.868.335,00	95,13
Program Bimbingan Masyarakat Katolik	817.918.504.000,00	737.808.188.577,00	90,21
Program Bimbingan Masyarakat Hindu	634.664.130.000,00	591.899.414.350,00	93,26
Program Bimbingan Masyarakat Buddha	286.572.845.000,00	248.560.935.862,00	86,74
Total Belanja	56.815.475.045.000,00	53.108.455.908.487,00	93,48

Realisasi Belanja TA 2016 mengalami penurunan sebesar 1,33 persen dibandingkan pada TA 2015. Hal ini disebabkan adanya moratorium untuk belanja modal dan penghematan anggaran untuk belanja barang. Rincian atas Anggaran pada eselon I disajikan dalam lampiran 2.

Rincian perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 dengan TA 2015 tersaji sebagai berikut:

Tabel 19
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	34.541.164.145.141,00	32.270.917.657.206,00	7,03
Belanja Barang	14.601.876.037.416,00	15.930.199.356.610,00	(8,34)
Belanja Modal	2.775.928.613.052,00	4.035.683.467.597,00	(31,22)
Belanja Bantuan Sosial	1.189.487.112.878,00	1.589.768.441.287,00	(25,18)
Jumlah	53.108.455.908.487,00	53.826.568.922.700,00	(1,33)

Belanja Pegawai
Rp34.541.164.145.141,00

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp34.541.164.145.141,00 dan Rp32.270.917.657.206,00 atau terjadi kenaikan sebesar 7,03 persen dari TA yang lalu. Hal ini disebabkan adanya pembayaran tunjangan kinerja tahun 2015 yang masih terhutang sehingga dibayarkan pada tahun 2016 dan adanya kenaikan pembayaran gaji dan tunjangan untuk pegawai non PNS serta bertambahnya jumlah pegawai PNS. Rincian perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dengan TA 2015 tersaji sebagai berikut:

Tabel 20

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	26.139.711.475.829,00	25.173.030.435.405,00	3,84
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	5.688.742.165.553,00	4.781.351.763.351,00	18,98
Belanja Honorarium	183.949.683.254,00	175.641.090.522,00	4,73
Belanja Lembur	57.065.668.154,00	60.941.646.797,00	(6,36)
Belanja Vakasi	-	13.535.500,00	(100,00)
Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	2.504.667.910.995,00	2.116.865.836.005,00	18,32
Jumlah Belanja Kotor	34.574.136.903.785,00	32.307.844.307.580,00	7,01
Pengembalian Belanja Pegawai	(32.972.758.644,00)	(36.926.650.374,00)	(10,71)
Jumlah Belanja	34.541.164.145.141,00	32.270.917.657.206,00	7,03

Belanja Barang
Rp14.601.876.037.416,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp14.601.876.037.416,00 dan Rp15.930.199.356.610,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 8,34 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2015. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penghematan anggaran untuk belanja barang. Rincian perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2016 dengan TA 2015 tersaji sebagai berikut:

Tabel 21

Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.186.901.133.402,00	1.179.691.260.718,00	0,61
Belanja Barang Non Operasional	8.852.079.888.608,00	9.945.150.256.683,00	(10,99)
Belanja Barang Persediaan	241.792.129.412,00	142.449.312.174,00	69,74
Belanja Jasa	800.751.573.918,00	1.035.288.608.766,00	(22,65)
Belanja Pemeliharaan	544.429.236.892,00	598.444.591.513,00	(9,03)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.794.862.094.961,00	1.502.019.210.842,00	19,50
Belanja Perjalanan Luar Negeri	129.391.592.022,00	116.224.854.094,00	11,33
Belanja Barang BLU	755.738.916.374,00	529.805.852.621,00	42,64
Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas	62.743.000,00	-	-
Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	187.241.677.965,00	508.621.802.495,00	(63,19)
Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	164.874.247.264,00	414.424.782.650,00	(60,22)
Jumlah Belanja Kotor	14.658.125.233.818,00	15.972.120.532.556,00	(8,23)
Pengembalian Belanja Barang	(56.249.196.402,00)	(41.921.175.946,00)	34,18
Jumlah Belanja	14.601.876.037.416,00	15.930.199.356.610,00	(8,34)

Belanja Modal
Rp.2.775.928.613.052,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2.775.928.613.052,00 dan Rp4.035.683.467.597,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2016 mengalami penurunan sebesar 31,22 persen dibandingkan TA 2015 disebabkan adanya instruksi presiden terkait moratorium belanja tanah serta gedung dan bangunan. Rincian perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dengan TA 2015 tersaji sebagai berikut:

Tabel 22

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	96.734.906.820,00	229.416.261.775,00	(57,83)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	528.409.130.182,00	973.781.409.069,00	(45,74)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.839.398.634.816,00	2.572.772.928.537,00	(28,51)
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	16.676.064.494,00	24.431.753.559,00	(31,74)
Belanja Modal Lainnya	110.431.421.413,00	156.501.815.626,00	(29,44)
Belanja Modal BLU	184.949.744.265,00	79.301.929.446,00	133,22
Jumlah Belanja Kotor	2.776.599.901.990,00	4.036.206.098.012,00	(31,21)
Pengembalian Belanja Modal	(671.288.938,00)	(522.630.415,00)	28,44
Jumlah Belanja	2.775.928.613.052,00	4.035.683.467.597,00	(31,22)

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp96.605.184.960,00 dan Rp229.416.261.775,00. Realisasi Belanja Modal Tanah pada TA 2016 mengalami penurunan sebesar 57,89 persen dibandingkan TA 2015 disebabkan adanya instruksi presiden terkait moratorium belanja tanah serta gedung dan bangunan. Rincian perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2016 dengan TA 2015 tersaji sebagai berikut:

Tabel 23

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah
TA 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	83.515.602.040,00	203.765.723.395,00	(59,01)
Belanja Modal Pembebasan Tanah	5.222.902.000,00	2.171.417.770,00	140,53
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	633.080.000,00	817.637.520,00	(22,57)
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat	1.002.503.580,00	1.247.827.990,00	(19,66)
Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah	6.253.119.200,00	20.825.227.300,00	(69,97)
Belanja Modal Pengukuran Tanah	70.300.000,00	128.861.600,00	(45,45)
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	37.400.000,00	459.566.200,00	(91,86)
Jumlah Belanja Kotor	96.734.906.820,00	229.416.261.775,00	(57,83)
Pengembalian Belanja Modal	(129.721.860,00)	-	-
Jumlah Belanja	96.605.184.960,00	229.416.261.775,00	(57,89)

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp528.312.028.110,00 dan Rp973.672.027.905,00. Realisasi Belanja Modal TA 2016 mengalami penurunan sebesar 45,74 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya disebabkan adanya pengurangan dan penghematan anggaran belanja modal peralatan dan mesin dengan *self blocking*. Rincian perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016 dengan TA 2015 tersaji sebagai berikut:

Tabel 24

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2016 dan 2015*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	526.718.031.646,00	964.735.113.104,00	(45,40)
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	116.770.000,00	303.637.500,00	(61,54)
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	578.148.936,00	127.195.580,00	354,54
Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin	162.750.000,00	28.000.000,00	481,25
Belanja Modal Perencana dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	23.000.000,00	855.835.700,00	(97,31)
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	327.446.000,00	582.318.220,00	(43,77)
Belanja Modal Perijinan Peralatan dan Mesin	-	167.095.000,00	(100,00)
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	-	35.669.000,00	(100,00)
Belanja Modal Peningkatan Nilai Peralatan dan Mesin	482.983.600,00	6.946.544.965,00	(93,05)
Jumlah Belanja Kotor	528.409.130.182,00	973.781.409.069,00	(45,74)
Pengembalian Belanja Modal	(97.102.072,00)	(109.381.164,00)	(11,23)
Jumlah Belanja	528.312.028.110,00	973.672.027.905,00	(45,74)

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.838.981.713.746,00 dan Rp2.572.455.532.058,00. Realisasi Belanja Modal TA 2016 mengalami penurunan sebesar 28,51 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2015 disebabkan adanya instruksi presiden terkait moratorium belanja tanah serta gedung dan bangunan.

Rincian perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2016 dengan TA 2015 tersaji sebagai berikut:

Tabel 25

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
TA 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.674.010.589.097,00	2.213.235.477.599,00	(24,36)
Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	175.301.564,00	427.239.000,00	(58,97)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	3.736.620.223,00	6.621.749.486,00	(43,57)
Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan	167.396.650,00	4.200.000,00	3.885,63
Belanja Modal Perencana dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	21.163.724.326,00	28.958.499.935,00	(26,92)
Belanja Modal Perijinan Gedung dan Bangunan	557.950.000,00	775.065.000,00	(28,01)
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	774.891.914,00	289.487.400,00	167,68
Belanja Modal Peningkatan Nilai Gedung dan Bangunan	138.812.161.042,00	322.461.210.117,00	(56,95)
Jumlah Belanja Kotor	1.839.398.634.816,00	2.572.772.928.537,00	(28,51)
Pengembalian Belanja Modal	(416.921.070,00)	(317.396.479,00)	31,36
Jumlah Belanja	1.838.981.713.746,00	2.572.455.532.058,00	(28,51)

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp16.676.064.494,00 dan Rp24.431.753.559,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2016 mengalami penurunan sebesar 31,74 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2015 disebabkan adanya pengurangan dan penghematan anggaran belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan. Rincian perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2016 dengan TA 2015 tersaji sebagai berikut:

Tabel 26
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	8.624.698.350,00	14.730.887.927,00	(41,45)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan		20.160.000,00	(100,00)
Belanja Modal Perencana dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	64.720.000,00	343.765.000,00	(81,17)
Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan	-	29.680.817,00	(100,00)
Belanja Modal Irigasi	1.393.285.600,00	1.311.528.300,00	6,23
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi	-	6.880.000,00	(100,00)
Belanja Modal Perencana dan Pengawasan Irigasi	-	80.975.000,00	(100,00)
Belanja Modal Perjalanan Irigasi	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Jaringan	5.212.709.304,00	5.587.455.715,00	(6,71)
Belanja Modal Bahan Baku Jaringan	-	-	
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	-	-	
Belanja Modal Perencana dan Pengawasan Jaringan	-	10.465.400,00	(100,00)
Belanja Modal Penambahan Nilai Irigasi	95.014.400,00	-	
Belanja Modal Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	612.420.000,00	534.200.000,00	14,64
Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan	673.216.840,00	1.775.755.400,00	(62,09)
Jumlah Belanja Kotor	16.676.064.494,00	24.431.753.559,00	(31,74)
Pengembalian Belanja Modal	-	-	
Jumlah Belanja	16.676.064.494,00	24.431.753.559,00	(31,74)

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp110.403.877.477,00 dan Rp156.405.962.854,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2016 mengalami penurunan sebesar 29,41 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2015 disebabkan adanya pengurangan dan penghematan anggaran belanja modal lainnya. Rincian perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2016 dengan TA 2015 tersaji sebagai berikut:

Tabel 27
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
TA 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	109.811.544.613,00	155.044.234.326,00	(29,17)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan /atau Aset Lainnya	619.876.800,00	1.457.581.300,00	(57,47)
Jumlah Belanja Kotor	110.431.421.413,00	156.501.815.626,00	(29,44)
Pengembalian Belanja Modal	(27.543.936,00)	(95.852.772,00)	(71,26)
Jumlah Belanja	110.403.877.477,00	156.405.962.854,00	(29,41)

B.5. Belanja Modal BLU

Realisasi Belanja Modal BLU untuk TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp184.949.744.265,00 dan Rp79.301.929.446,00. Realisasi Belanja Modal BLU TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 133,22 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal BLU TA 2015 disebabkan adanya kenaikan yang signifikan pada belanja modal tanah BLU dan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan BLU. Rincian perbandingan Realisasi Belanja Modal BLU TA 2016 dengan TA 2015 tersaji sebagai berikut:

Tabel 28
Perbandingan Realisasi Belanja Modal BLU
TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah BLU	51.202.331.618,00	4.146.147.000,00	1.134,94
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU	84.637.796.363,00	47.800.842.776,00	77,06
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU	38.317.389.916,00	23.197.996.910,00	65,18
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU	2.710.813.960,00	232.902.400,00	1.063,93
Belanja Modal Lainnya BLU	8.081.412.408,00	3.924.040.360,00	105,95
Jumlah Belanja Kotor	184.949.744.265,00	79.301.929.446,00	133,22
Pengembalian Belanja Modal BLU	-	-	-
Jumlah Belanja	184.949.744.265,00	79.301.929.446,00	133,22

Belanja Bantuan Sosial **B.6 Belanja Bantuan Sosial**

Rp1.189.487.112.878,00

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.189.487.112.878,00 dan Rp1.589.768.441.287,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2016 mengalami penurunan sebesar 25,18 persen dibandingkan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2015 disebabkan pada tahun 2016 terjadi penghematan anggaran *Self Blocking* dan belanja bantuan sosial salah satu yang terkena dampak dari penghematan anggaran tersebut dan disebabkan terbatasnya calon penerima bantuan yang memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan. Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk menghindari terjadinya resiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Belanja Bantuan Sosial untuk Tahun Anggaran 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 29
Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	70.200.000,00		
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	40.724.700.000,00	95.401.247.500,00	(57,31)
Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	56.015.575.000,00	85.251.751.100,00	(34,29)
Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial	1.045.651.336.182,00	1.203.773.912.670,00	(13,14)
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan	47.331.425.000,00	212.586.765.945,00	(77,74)
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana	-	1.385.200.000,00	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	1.189.793.236.182,00	1.598.398.877.215,00	(25,56)
Pengembalian Belanja Bantuan Sosial	(306.123.304,00)	(8.630.435.928,00)	(96,45)
Jumlah Belanja	1.189.487.112.878,00	1.589.768.441.287,00	(25,18)



CALK NERACA

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp2.675.693.411,00*

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/ TambahanUang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Agama per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp2.675.693.411,00 dan Rp12.466.714.369,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran

TA 2016 dan 2015

KETERANGAN	TAHUN 2016	TAHUN 2015
Bank dan uang tunai	Rp -	Rp 12.466.714.369,00
Uang tunai	Rp 2.349.035.815,00	Rp -
Bank	Rp 326.657.596,00	Rp -
JUMLAH	Rp 2.675.693.411,00	Rp 12.466.714.369,00

Berdasarkan hasil penelusuran atas Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) antara SAI dan SAU, terdapat perbedaan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada satker-satker sebagai berikut:

1. Kanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp48.690.620,00;
2. Kankemenag Kota Tanjungpinang sebesar Rp.9.385.193,00; dan
3. Kankemenag Kabupaten Bintan sebesar Rp10.136.136,00.

Namun atas penelusuran LPJ Bendahara Pengeluaran pada satker tersebut di atas menunjukkan bahwa saldo akhir per 31 Desember 2016 adalah nihil dan sudah sesuai dengan data KPPN. Hal ini berarti semua UP dan TUP telah dinihilkan dan sisanya telah dikembalikan ke kas negara.

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada masing-masing eselon I disajikan pada lampiran 1.

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp15.182.173.448,00*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar masing-masing Rp15.182.173.448,00 dan Rp4.689.631.678,00 yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel 31

*Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA
2016 dan 2015*

KETERANGAN	TAHUN 2016	TAHUN 2015
Bank dan uang tunai	Rp -	Rp 4.689.631.678,00
Uang tunai	Rp 3.944.284.727,00	Rp -
Bank	Rp 11.237.888.721,00	Rp -
JUMLAH	Rp 15.182.173.448,00	Rp 4.689.631.678,00

Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada masing-masing eselon I disajikan pada lampiran 2.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp35.835.312.489,00*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp35.835.312.489,00 dan Rp27.119.291.379,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 32
Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
TA 2016 dan 2015

KETERANGAN	TAHUN 2016	TAHUN 2015
Surat Berharga	Rp -	Rp (882.000.000,00)
Setara Kas lainnya	Rp -	Rp 355.562.250,00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp 26.963.730.735,00	Rp 20.848.393.532,00
Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	Rp 464.238.820,00	Rp 953.646.655,00
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	Rp 7.730.298.628,00	Rp 5.283.171.942,00
Kas Lainnya di BLU	Rp 592.294.306,00	Rp 560.517.000,00
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	Rp 84.750.000,00	Rp -
JUMLAH	Rp 35.835.312.489,00	Rp 27.119.291.379,00

Rincian atas Kas Lainnya dan Setara Kas pada eselon I disajikan dalam lampiran 3.

Kas pada BLU

Rp746.624.184.795,00

C.4 Kas pada Badan Layanan Umum

Kas pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp746.624.184.795,00 dan Rp620.506.163.294,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 33

Perbandingan Rincian Kas di BLU TA 2016 dan 2015

KETERANGAN	TAHUN 2016	TAHUN 2015
Uang Tunai	Rp 5.606.916.643,00	Rp -
Rekening Bank	Rp 741.017.268.152,00	Rp -
Kas dan Bank - BLU	Rp -	Rp 620.420.595.302,00
Dana yang akan dipadankan - BLU	Rp -	Rp 83.939.613,00
Setara kas Lainnya - BLU	Rp -	Rp 1.628.379,00
JUMLAH	Rp 746.624.184.795,00	Rp 620.506.163.294,00

Kas pada Badan Layanan Umum merupakan saldo yang dikonsolidasikan dalam neraca Unit Eselon 1 Ditjen Pendidikan Islam.

Investasi Jangka

Pendek BLU

Rp24.154.970.314,00

C.5 Investasi Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum

Investasi Jangka Pendek pada BLU per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp24.154.970.314,00 dan Rp22.000.000.000,00 merupakan deposito yang jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas)

bulan sejak tanggal pelaporan serta surat berharga yang mudah diperjualbelikan.

Tabel 34
Perbandingan Investasi Jangka Pendek BLU
TA 2016 dan 2015

KETERANGAN	TAHUN 2016	TAHUN 2015
UIN ALAUDDIN MAKASSAR	Rp -	Rp 5.000.000.000,00
IAIN SMH BANTEN	Rp 11.154.970.314,00	Rp -
IAIN RADEN FATAH PALEMBANG	Rp 13.000.000.000,00	Rp 17.000.000.000,00
JUMLAH	Rp 24.154.970.314,00	Rp 22.000.000.000,00

Tabel 35
Rincian Investasi Jangka Pendek pada BLU TA 2016

SATKER	REK. BANK	NO. DEPOSITO	JUMLAH DEPOSITO
IAIN RADEN FATAH PALEMBANG	Bank Sumsel- 809-20-30002	DK 002500	Rp 13.000.000.000,00
IAIN SMH BANTEN	BTN - 00391-01-40-000082-1	A 1600829	Rp 5.000.000.000,00
	BSM - 7000000079115780	1267454/7000000079115783	Rp 1.100.000.000,00
	BNI - 0497378757	PAB 0292116	Rp 2.500.000.000,00
	BNI - 0456462194	PAB 0292083	Rp 2.500.000.000,00
	Pendapatan Bunga Deposito PAB 0292083		Rp 54.970.314,00
JUMLAH			Rp 24.154.970.314,00

Belanja Dibayar di Muka
Rp274.207.240,00

C.6 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp274.207.240,00 dan Rp1.935.774.562,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Tabel 36
Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka
TA 2016 dan TA 2015

JENIS	TAHUN 2016	TAHUN 2015
Belanja Pegawai Dibayar Dimuka (prepaid)	Rp 4.176.160,00	Rp 1.889.024.562,00
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	Rp 270.031.080,00	Rp 46.750.000,00
Jumlah	Rp 274.207.240,00	Rp 1.935.774.562,00

Rincian saldo Belanja Dibayar Dimuka pada masing-masing eselon I disajikan pada lampiran 4.

Pendapatan
yang Masih Harus
Diterima
Rp13.830.032.136,00

C.7 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp13.830.032.136,00 dan Rp11.368.913.052,00, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah sebagai berikut:

Tabel 37

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
TA 2016 dan TA 2015

SATKER	TAHUN 2016	TAHUN 2015
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TANGERANG	Rp 6.000.000,00	Rp -
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA TIMUR	Rp 464.000,00	Rp 464.000,00
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN	Rp 3.330.000,00	Rp -
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA RI	Rp 4.745.000,00	Rp -
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU	Rp 917.500.000,00	Rp 432.500.000,00
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI	Rp 180.000.000,00	Rp -
IAIN MATARAM	Rp -	Rp 5.130.605,00
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON	Rp 4.208.050.000,00	Rp 3.731.100.000,00
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	Rp 8.418.943.136,00	Rp 7.096.436.809,00
UIN SULTHAN SYARIF KASIM RIAU	Rp -	Rp 103.281.638,00
IAIN RADEN FATAH PALEMBANG	Rp 91.000.000,00	Rp -
Jumlah	Rp 13.830.032.136,00	Rp 11.368.913.052,00

Rincian saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada masing-masing eselon I disajikan pada lampiran 5.

Piutang Pendapatan
Negara Bukan Pajak
(PNBP)
Rp7.173.062.113,00

C.8 Piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp7.173.062.113,00 dan Rp27.321.686.073,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38

Perbandingan Rincian Piutang Piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2016 dan 2015

KETERANGAN	TAHUN 2016	TAHUN 2015
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp 6.809.828.323,00	Rp 26.833.572.073,00
Piutang Lainnya	Rp 363.233.790,00	Rp 488.114.000,00
JUMLAH	Rp 7.173.062.113,00	Rp 27.321.686.073,00

Piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Agama antara lain berasal dari piutang jasa layanan pendidikan, dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Rincian Piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) per eselon I disajikan pada lampiran 6.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Bukan Pajak Rp1.934.053.371,00

C.9. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp1.934.053.371,00 dan Rp1.433.713.723,00. Penyisihan piutang tak tertagih - Piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas masing-masing debitor. Untuk Satker Kantor Pusat Sekretariat Jenderal, STAKPN Ambon, Kanwil Kemenag Bengkulu, MTsN Cepogo Kab. Boyolali tidak melakukan penyisihan piutang PNBP dan piutang lainnya. Sedangkan Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen, Ditjen PHU, dan MIN Dampang telah melakukan penyisihan, namun perhitungan penyisihannya salah. Kanwil Kemenag DKI Jakarta melakukan penyisihan piutang PNBP, namun menjurnalnya

pada penyisihan piutang lainnya. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang PNBP berdasarkan kategori piutang disajikan sebagai berikut:

Tabel 39
Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2016

KUALITAS PIUTANG	NILAI PUTANG	% PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN
Piutang PNBP			
Lancar			
IAIN Pontianak	Rp 2.948.455.000,00	0,50%	Rp 14.742.275,00
IHDN Denpasar	Rp 351.100.000,00	0,50%	Rp 1.755.500,00
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang	Rp 138.550.000,00	0,50%	Rp 690.250,00
STABN Sriwijaya Tangerang	Rp 12.900.000,00	0,50%	Rp 64.500,00
Kanwil Kemenag D.K.I Jakarta Raya	Rp 12.420.000,00	0,50%	
Kurang Lancar			
IHDN Denpasar	Rp 650.600.000,00	10%	Rp 65.060.000,00
Diragukan			
STAIN Jurai Siwo Metro	Rp 51.600.000,00	50%	Rp 25.800.000,00
IHDN Denpasar	Rp 1.284.200.000,00	50%	Rp 642.100.000,00
STABN Sriwijaya Tangerang	Rp 7.600.000,00	50%	Rp 3.800.000,00
Kantor Kemenag Kab. Timor Tengah Selatan	Rp 6.943.200,00	50%	Rp 3.471.600,00
Macet			
STAKN Toraja	Rp 66.500.000,00	100%	Rp 66.500.000,00
IHDN Denpasar	Rp 478.350.000,00	100%	Rp 478.350.000,00
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang	Rp 217.585.000,00	100%	Rp 217.585.000,00
STABN Sriwijaya Tangerang	Rp 413.250.000,00	100%	Rp 413.250.000,00
Kantor Pusat Sekretariat Jenderal	Rp 86.279.485,00		
STAKPN Ambon	Rp 56.400.000,00		
Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen	Rp 4.998.833,00		Rp 249.942,00
MIN Dampang	Rp 8.906.000,00		Rp 445.300,00
DITJEN Penyelenggaraan Haji dan Umroh	Rp 13.190.805,00		Rp 65.954,00
Jumlah	Rp 6.809.828.323,00		Rp 1.933.930.321,00
Piutang Lainnya			
Lancar			
IAIN Pontianak	Rp 12.190.000,00	0,50%	Rp 60.950,00
Kanwil Kemenag D.K.I Jakarta Raya		0,50%	Rp 62.100,00
Kurang Lancar			
	Rp -	10%	Rp -
Diragukan			
	Rp -	50%	Rp -
Macet			
	Rp -	100%	Rp -
Kanwil Kemenag Bengkulu	Rp 349.495.800,00		
MTsN Cepogo Kab. Boyolali	Rp 1.547.990,00		
Jumlah	Rp 363.233.790,00		Rp 123.050,00
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH	Rp 7.173.062.113,00		Rp 1.934.053.371,00

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp15.000.000,00

C.10 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp15.000.000,00 dan Rp 0.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40
Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR
TA 2016 dan 2015

KETERANGAN	TAHUN 2016	TAHUN 2015
Man Bandung Kota Bandung	Rp 15.000.000,00	Rp -
JUMLAH	Rp 15.000.000,00	Rp -

Rincian Bagian Lancar TP/TGR untuk masing-masing eselon I disajikan pada lampiran 7.

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih - Bagian
Lancar Tagihan
TP/TGR Rp75.000,00*

C.11 Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp75.000,00 dan Rp0,00. Penyisihan piutang tak tertagih-bagian lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Tabel 41
Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar
TA 2016

KUALITAS PIUTANG	NILAI PIUTANG	% PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN
Lancar			
Man Bandung Kota Bandung	Rp 15.000.000,00	0,50%	Rp 75.000,00
Kurang Lancar	Rp -	10%	Rp -
Diragukan	Rp -	50%	Rp -
Macet	Rp -	100%	Rp -
Jumlah	Rp 15.000.000,00		Rp 75.000,00

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU
Rp18.975.977.875,00

C.12 Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Piutang dari kegiatan operasional BLU per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing adalah sebesar Rp18.975.977.875,00 dan Rp22.844.460.027,00. Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum per 31 Desember 2016 Kementerian Agama merupakan saldo yang dikonsolidasikan dalam neraca Unit Eselon 1 Ditjen Pendidikan Islam, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 42

Perbandingan Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU TA 2016 dan 2015

KETERANGAN	TAHUN 2016	TAHUN 2015
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	Rp 8.730.167.346,00	Rp 5.438.207.000,00
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG JATI	Rp 5.597.908.000,00	Rp 7.354.884.000,00
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG	Rp 924.798.000,00	Rp -
IAIN RADEN INTAN BANDAR LAMPUNG	Rp 3.641.200.000,00	Rp -
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG	Rp 81.904.529,00	Rp -
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA	Rp -	Rp (3.117.131.600,00)
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM	Rp -	Rp 11.212.500.000,00
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG	Rp -	Rp 1.956.000.000,00
IAIN MATARAM	Rp -	Rp 627,00
JUMLAH	Rp 18.975.977.875,00	Rp 22.844.460.027,00

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU
Rp2.837.499.476,00

C.13 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Dari Kegiatan Operasional BLU

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2.837.499.476,00 dan Rp1.407.195.110,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang dari kegiatan operasional BLU yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih berdasarkan kategori piutang disajikan sebagai berikut:

Tabel 43
Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Dari
Kegiatan Operasional BLU
TA 2016

KUALITAS PIUTANG	NILAI PIUTANG	PERSENTASE PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN PIUTANG
Piutang Sewa Tanah - BLU			
Lancar	Rp -	0,50%	Rp -
Kurang lancar			
IAIN RADEN INTAN BANDAR LAMPUNG	Rp 329.900.000,00	10%	Rp 32.990.000,00
Diragukan			
IAIN RADEN INTAN BANDAR LAMPUNG	Rp 3.311.300.000,00	50%	Rp 1.655.650.000,00
Macet		100%	
Jumlah	Rp 3.641.200.000,00		Rp 1.688.640.000,00
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	Rp 8.730.167.346,00		Rp 1.034.461.476,00
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG JATI BANDUNG	Rp 5.597.908.000,00		Rp 114.398.000,00
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG	Rp 924.798.000,00		
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG	Rp 81.904.529,00		
Jumlah	Rp 15.334.777.875,00		Rp 1.148.859.476,00
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH	Rp 18.975.977.875,00		Rp 2.837.499.476,00

Piutang Dari Kegiatan Non Operasional BLU Rp2.845.061.482,00

C.14 Piutang Dari Kegiatan Non Operasional BLU

Piutang dari kegiatan non operasional BLU per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing adalah sebesar Rp2.845.061.482,00 dan Rp5.465.610.192,00. Saldo Piutang dari kegiatan non operasional BLU per 31 Desember 2016 Kementerian Agama merupakan saldo yang dikonsolidasikan pada Unit Eselon 1 Ditjen Pendidikan Islam, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 44
Perbandingan Rincian Piutang Dari
Kegiatan Non Operasional BLU TA 2016 dan 2015

SATKER	2016	2015
UIN ALAUDDIN MAKASSAR	Rp 138.438.345,00	Rp 8.438.355,00
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	Rp 1.744.689.803,00	Rp 1.340.075.344,00
IAIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI	Rp 802.400.000,00	Rp 831.400.000,00
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG JATI BANDUNG	Rp 116.666.667,00	Rp 100.000.000,00
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA	Rp -	Rp 3.117.131.600,00
UIN SULTHAN SYARIF KASIM RIAU	Rp -	Rp (22.043.451,00)
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG	Rp 42.866.667,00	Rp 90.608.344,00
JUMLAH	Rp 2.845.061.482,00	Rp 5.465.610.192,00

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih-
Piutang dari Kegiatan
Non Operasional BLU
Rp944.620.841,00

C.15 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp944.620.841,00 dan Rp459.858.064,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang dari kegiatan non operasional BLU. Pada satker UIN Alauddin Makassar dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tidak melakukan penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang lainnya dari kegiatan non operasional BLU karena merupakan pengakuan akrual pendapatan bunga deposito yang sudah pasti akan diterima.

Tabel 45

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU TA 2016

KUALITAS PIUTANG	NILAI PIUTANG	PERSENTASE PENYISIHAN PIUTANG	NILAI PENYISIHAN PIUTANG
Piutang Sewa Tanah - BLU			
Lancar			
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Rp 48.000.000,00	0,50%	Rp 240.000,00
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Rp 125.000.000,00	0,50%	Rp 625.000,00
Kurang lancar			
IAIN Sultan Thaha Jambi	Rp 9.000.000,00	10%	Rp 900.000,00
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Rp 588.333.333,00	10%	Rp 58.833.333,30
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Rp 112.603.084,00	10%	Rp 11.260.308,40
Diragukan			
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Rp 455.000.000,00	50%	Rp 227.500.000,00
Macet		100%	
Jumlah	Rp 1.337.936.417,00		Rp 299.358.641,70

KUALITAS PIUTANG	NILAI PIUTANG	PERSENTASE PENYISIHAN PIUTANG	NILAI PENYISIHAN PIUTANG
Piutang Sewa Gedung - BLU			
Lancar		0,50%	
Kurang lancar			
IAIN Sultan Thaha Jambi	Rp 58.000.000,00	10%	Rp 5.800.000,00
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Rp 53.490.803,00	10%	Rp 5.349.080,30
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Rp 75.349.888,00	10%	Rp 7.534.988,80
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Rp 40.000.000,00	10%	Rp 4.000.000,00
Diragukan			
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Rp 207.062.926,00	50%	Rp 103.531.463,00
Macet		100%	
UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Rp 16.666.667,00		
Jumlah	Rp 450.570.284,00		Rp 126.215.532,10
Piutang Sewa Ruangan - BLU			
Lancar		0,50%	
Kurang lancar			
IAIN Raden Intan Lampung	Rp 20.966.667,00	10%	Rp 2.096.666,70
UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Rp 100.000.000,00	10%	Rp 10.000.000,00
IAIN Sultan Thaha Jambi	Rp 266.000.000,00	10%	Rp 26.600.000,00
Diragukan			
IAIN Raden Intan Lampung	Rp 21.900.000,00	50%	Rp 10.950.000,00
Macet		100%	Rp -
Jumlah	Rp 408.866.667,00		Rp 49.646.666,70
Piutang Sewa Peralatan dan Mesin			
Lancar		0,50%	
Kurang lancar		10%	
Diragukan		50%	
Macet		100%	
IAIN Sultan Thaha Jambi	Rp 469.400.000,00	100%	Rp 469.400.000,00
Jumlah	Rp 469.400.000,00		Rp 469.400.000,00
Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional			
UIN Alauddin Makassar	Rp 138.438.345,00		
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Rp 39.849.769,00		
Jumlah	Rp 178.288.114,00		Rp -
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH	Rp 2.845.061.482,00		Rp 944.620.841,00

Persediaan

Rp68.155.779.272,00

C.16 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp68.155.779.272,00 dan Rp92.213.683.492,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 46
Perbandingan Rincian Persediaan
TA 2016 dan 2015

PERSEDIAAN	TAHUN 2016	TAHUN 2015
Barang Konsumsi	Rp 43.137.087.735,00	Rp 28.586.122.773,00
Amunisi	Rp 50.000,00	Rp 18.638.000,00
Bahan untuk Pemeliharaan	Rp 1.613.701.818,00	Rp (3.870.216.932,00)
Suku Cadang	Rp 73.058.047,00	Rp 166.141.017,00
Pita Cukai, Materai dan Leges	Rp 82.976.445,00	Rp 1.688.831.701,00
Tanah Bangunan untuk dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat	Rp 170.000.000,00	Rp (321.104.200,00)
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat	Rp 1.923.909.200,00	Rp 5.390.825.997,00
Aset Tetap Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat	Rp 1.194.320.803,00	Rp 1.405.588.272,00
Aset Lain lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat	Rp 4.366.932.165,00	Rp 2.500.918.266,00
Barang persediaan Lainnya untuk dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat	Rp 13.022.553.122,00	Rp 25.126.075.475,00
Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat- Dalam Proses	Rp -	Rp (135.474.897,00)
Bahan Baku	Rp 859.855.912,00	Rp 1.420.646.370,00
Barang dalam Proses	Rp 890.530.536,00	Rp 350.000,00
Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	Rp 837.250,00	Rp 100.463.454,00
Persediaan untuk tujuan Strategis/Berjaga- jaga	Rp 32.448.960,00	Rp 563.894.859,00
Persediaan Barang Hasil Sitaan	Rp -	Rp 6.670.000,00
Persediaan Lainnya	Rp 787.517.279,00	Rp 29.565.313.337,00
JUMLAH	Rp 68.155.779.272,00	Rp 92.213.683.492,00

Rincian saldo Persediaan pada masing-masing eselon I disajikan pada lampiran 8.

Persediaan

Badan Layanan

Umum

Rp10.588.917.724,00

C.17 Persediaan Badan Layanan Umum

Persediaan Badan Layanan Umum adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional satuan kerja Badan Layanan Umum, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp10.588.917.724,00 dan Rp8.948.855.328,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 47
Perbandingan Persediaan Badan Layanan Umum
TA 2016 dan 2015

NAMA SATKER	TAHUN 2016	TAHUN 2015
UIN ALAUDDIN MAKASSAR	Rp 133.577.054,00	Rp 186.941.136,00
IAIN MATARAM	Rp -	Rp 517.683.570,00
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	Rp 3.414.608.564,00	Rp 1.575.014.176,00
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG JATI BANDUNG	Rp 884.370.785,00	Rp 1.148.205.413,00
IAIN SMH BANTEN	Rp 19.590.970,00	Rp 234.306.349,00
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG	Rp 1.440.711.318,00	Rp 837.678.748,00
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	Rp 1.073.805.169,00	Rp 855.808.745,00
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA	Rp 579.721.928,00	Rp 372.183.900,00
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	Rp 1.371.966.828,00	Rp 1.785.291.070,00
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH	Rp 197.805.505,00	Rp 43.636.878,00
IAIN Sumatera Utara Medan	Rp -	Rp 459.558.180,00
UIN SULTHAN SYARIF KASIM RIAU	Rp 616.775.407,00	Rp 360.460.035,00
IAIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI	Rp 410.145.794,00	Rp -
IAIN RADEN FATAH PALEMBANG	Rp 219.022.250,00	Rp 348.943.875,00
IAIN RADEN INTAN BANDAR LAMPUNG	Rp 226.816.152,00	Rp 223.143.253,00
	Rp 10.588.917.724,00	Rp 8.948.855.328,00

Tanah

Rp15.955.539.942.828,00

C.18 Tanah

Tanah yang dimiliki Kementerian Agama per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp15.955.539.942.828,00 dan Rp15.674.865.863.632,00. Tanah tersebut terbagi atas tanah non Badan Layanan Umum dan tanah Badan Layanan Umum. Untuk saldo tanah non Badan Layanan Umum per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp12.279.674.359.187,00 dan Rp12.066.004.403.231,00. Sedangkan saldo tanah Badan Layanan Umum yang dimiliki Kementerian Agama per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.675.865.583.641,00 dan Rp3.608.861.460.401,00. Tanah Badan Layanan Umum merupakan saldo yang dikonsolidasikan dalam neraca Unit Eselon 1 Ditjen Pendidikan Islam.

Mutasi Aset Tetap Tanah Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2016		Rp	15.674.865.863.632,00
	Mutasi Tambah:	Rp	409.557.794.546,00
1	Penambahan Saldo Awal	Rp	72.902.941.994,00
2	Pembelian	Rp	46.405.734.350,00
3	Transfer Masuk	Rp	29.152.387.492,00
4	Hibah Masuk	Rp	67.570.173.994,00
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp	36.478.701.940,00
6	Reklasifikasi Masuk	Rp	113.600.471.242,00
7	Perolehan Lainnya	Rp	27.343.000.000,00
8	Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp	1.611.628.700,00
9	Pengembangan Nilai Aset	Rp	5.333.332.100,00
10	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	Rp	5.229.183.474,00
11	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	Rp	70.180.000,00
12	Pengembangan Melalui KDP	Rp	3.860.059.260,00
	Mutasi Kurang :	Rp	- 210.706.891.995,00
1	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	Rp	- 44.583.947.554,00
2	Transaksi Normalisasi	Rp	- 539.200.000,00
3	Penghapusan	Rp	- 537.463.000,00
4	Transfer Keluar	Rp	- 28.169.270.478,00
5	Reklasifikasi Keluar	Rp	- 117.694.331.655,00
6	Koreksi Pencatatan	Rp	- 19.170.679.308,00
7	Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	- 12.000.000,00
	Selisih	Rp	81.823.176.645,00
Saldo per 31 Desember 2016		Rp	15.955.539.942.828,00

Perubahan atas saldo tanah di atas antara lain terjadi karena adanya transaksi reklas masuk dan reklas keluar pada STAIN Ponogoro sebesar Rp70.947.788.940,00 (kesalahan penginputan kode barang), adanya hibah masuk sebesar Rp50.000.000,00 di STAIN Meulaboh (hibah tanah dari Penda Kab. Aceh Barat melalui Yayasan Teuku Umar Johan Pahlawan untuk pembangunan gedung kampus baru), dan transfer keluar sebesar Rp10.050.731.000,00 pada Kanwil Kementerian Agama Prov. Lampung eselon 1 Setjen (transfer ke MTsn 1 dan 2 Bandar Lampung, yang sebelumnya masih dicatat di Kanwil).

Atas penyajian tanah di atas terdapat aset tanah yang masih

dikuasai oleh pihak lain/masih sengketa minimal seluas 1.026.003,00 m² dan 50 Ha senilai minimal Rp92.028.344.982,00 dan rumah dinas sebanyak 115 unit. Tanah tersebut diantaranya merupakan tanah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Cikuya seluas 131.422 m² dengan nilai Rp4.532.059.442,30 yang diklaim oleh pihak lain. Rincian atas Tanah pada eselon I disajikan dalam lampiran 9.

Peralatan dan Mesin
Rp6.983.094.309.136,00

C.19 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp6.983.094.309.136,00 dan Rp6.378.217.894.962,00. Peralatan dan mesin tersebut terbagi atas peralatan dan mesin non Badan Layanan Umum dan peralatan dan mesin Badan Layanan Umum. Untuk saldo peralatan dan mesin non Badan Layanan Umum per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp5.159.599.558.394,00 dan Rp4.850.510.141.566,00. Sedangkan saldo peralatan dan mesin Badan Layanan Umum yang dimiliki Kementerian Agama per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.823.494.750.742,00 dan Rp1.527.707.753.396,00. Peralatan dan mesin Badan Layanan Umum merupakan saldo yang dikonsolidasikan dalam neraca Unit Eselon 1 Ditjen Pendidikan Islam.

Mutasi peralatan dan mesin Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2016		Rp	6.378.217.894.962,00
Mutasi Tambah:		Rp	7.197.631.203.428,00
1	Penambahan Saldo Awal	Rp	23.819.875.090,00
2	Pembelian	Rp	510.153.433.539,00
3	Transfer Masuk	Rp	39.989.416.898,00
4	Hibah Masuk	Rp	4.822.487.631,00
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp	136.723.330.137,00
6	Pembatalan Penghapusan	Rp	191.730.000,00

Saldo per 1 Januari 2016		Rp	6.378.217.894.962,00
7	Reklasifikasi Masuk	Rp	93.322.907.097,00
8	Perolehan Lainnya	Rp	1.234.425.080,00
9	Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp	179.450.000,00
10	Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp	918.725.686,00
11	Perolehan Reklasifikasi dari Intra ke Ekstra	Rp	42.264.700,00
12	Pengembangan Nilai Aset	Rp	3.242.906.033,00
13	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	Rp	1.162.092.392,00
14	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	Rp	70.000.000,00
15	Pengembangan Melalui KDP	Rp	2.005.503.600,00
16	Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	Rp	1.531.765.983,00
17	Koreksi Pencatatan	Rp	2.994.600,00
	Mutasi Kurang :	Rp	(211.868.097.551,00)
1	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	Rp	(1.646.499.582,00)
2	Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	Rp	(5.705.134.802,00)
3	Penghapusan	Rp	(6.111.124.623,00)
4	Transfer Keluar	Rp	(40.882.242.299,00)
5	Hibah (Keluar)	Rp	(261.883.895,00)
6	Reklasifikasi Keluar	Rp	(91.642.565.483,00)
7	Koreksi Pencatatan	Rp	(7.343.278.500,00)
8	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	Rp	(814.077.498,00)
9	Usulan Barang Hilang ke Pengelola	Rp	(825.581.552,00)
10	Penghapusan semu karena reklasifikasi dari intra ke ekstra	Rp	(2.155.000,00)
11	Penghentian Aset Dari Penggunaan	Rp	(56.633.554.317,00)
	Selisih	Rp	(2.668.796.741,00)
Saldo per 31 Desember 2016		Rp	6.983.094.309.136,00

Beberapa perubahan atas saldo peralatan dan mesin disebabkan antara lain karena adanya transaksi penyelesaian pembangunan dengan KDP untuk di UIN Sunan Ampel Surabaya dan UIN Malang dengan nilai masing-masing Rp36.919.060.407,00 dan Rp29.708.570.267,00. Untuk UIN Sunan Ampel Surabaya penyelesaian pembangunan dengan KDP tersebut berupa komputer sementara di UIN Malang berupa alat laboratorium.

Rincian atas Peralatan dan Mesin pada eselon I disajikan dalam lampiran 10.

Gedung dan Bangunan
Rp22.338.064.880.732,00

C.20 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp22.338.064.880.732,00 dan Rp20.024.076.648.126,00. Gedung dan bangunan tersebut terbagi atas non Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum. Untuk saldo gedung dan bangunan non Badan Layanan Umum per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp17.294.371.686.921,00 dan Rp16.636.965.153.797,00. Sedangkan saldo gedung dan bangunan Badan Layanan Umum yang dimiliki Kementerian Agama per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp4.413.693.193.811,00 dan Rp3.387.111.494.329,00. Gedung dan bangunan Badan Layanan Umum merupakan saldo yang dikonsolidasikan dalam neraca Unit Eselon 1 Ditjen Pendidikan Islam.

Mutasi gedung dan bangunan Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2016		Rp	20.024.076.648.126,00
	Mutasi Tambah:	Rp	2.518.750.391.970,00
1	Penambahan Saldo Awal	Rp	63.326.742.308,00
2	Pembelian	Rp	4.943.003.769,00
3	Transfer Masuk	Rp	154.813.841.599,00
4	Hibah Masuk	Rp	3.282.434.000,00
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp	1.656.973.363.479,00
6	Reklasifikasi Masuk	Rp	48.690.138.669,00
7	Perolehan Lainnya	Rp	861.315.000,00
8	Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp	9.496.660.000,00
9	Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp	109.875.600,00
10	Perolehan Reklasifikasi dari Intra ke Ekstra	Rp	5.360.622.500,00
11	Pengembangan Nilai Aset	Rp	35.058.579.360,00
12	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	Rp	87.507.732.800,00
13	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	Rp	15.097.070.714,00
14	Pengembangan Melalui KDP	Rp	430.708.418.392,00
15	Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	Rp	2.520.593.780,00
	Mutasi Kurang :	Rp	(357.265.128.082,00)
1	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	Rp	(15.332.777.806,00)
2	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	Rp	(2.320.000,00)
3	Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	Rp	(11.964.038.961,00)

Saldo per 1 Januari 2016		Rp	20.024.076.648.126,00
4	Penghapusan	Rp	(9.719.279.192,00)
5	Transfer Keluar	Rp	(153.215.769.153,00)
6	Hibah Keluar	Rp	(444.726.800,00)
7	Reklasifikasi Keluar	Rp	(56.417.389.998,00)
8	Koreksi Pencatatan	Rp	(88.219.228.509,00)
9	Penghapusan semu karena reklasifikasi dari intra ke ekstra/sebaliknya	Rp	(750.000,00)
10	Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	(21.948.847.663,00)
	Selisih	Rp	152.502.968.718,00
Saldo per 31 Desember 2016		Rp	22.338.064.880.732,00

Untuk mutasi aset gedung dan bangunan beberapa diantaranya adalah berupa adanya pengembangan melalui KDP dan penyelesaian pembangunan dengan KDP di UIN Sunan Ampel Surabaya senilai Rp210.614.009.620,00 dan Rp121.983.669.741,00. Sementara itu juga terdapat transaksi transfer keluar sebesar Rp20.947.635.320,00 pada Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah eselon 1 Setjen (transfer ke MAN Insan Cendikia Pekalongan) dan juga transfer keluar Rp4.183.583.846,00 oleh Kankemenag Kab. Kebumen eselon 1 Setjen ke eselon 1 Bimas Islam berupa gedung KUA.

Rincian atas Gedung dan Bangunan pada eselon I disajikan dalam lampiran 11.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp559.435.282.524,00

C.21 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp559.435.282.524,00 dan Rp511.682.193.900,00. Jalan, irigasi dan jaringan tersebut terbagi atas non Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum. Untuk saldo jalan, irigasi dan jaringan non Badan Layanan Umum per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp326.170.714.206,00 dan Rp338.143.940.333,00. Sedangkan saldo jalan, irigasi dan jaringan Badan Layanan Umum yang dimiliki Kementerian Agama per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-

masing sebesar Rp233.264.568.318,00 dan Rp173.538.253.567,00. Jalan, irigasi dan jaringan Badan Layanan Umum merupakan saldo yang dikonsolidasikan dalam neraca Unit Eselon 1 Ditjen Pendidikan Islam.

Mutasi jalan, irigasi dan jaringan Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2016		Rp	511.682.193.900,00
	Mutasi Tambah:	Rp	50.355.999.528,00
1	Penambahan Saldo Awal	Rp	142.735.600,00
2	Pembelian	Rp	6.264.650.118,00
3	Transfer Masuk	Rp	1.077.213.322,00
4	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp	12.634.419.850,00
5	Reklasifikasi Masuk	Rp	27.115.236.812,00
6	Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp	264.927.726,00
7	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp	100.000,00
8	Pengembangan Nilai Aset	Rp	289.452.900,00
9	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	Rp	49.000.000,00
10	Pengembangan Melalui KDP	Rp	2.515.738.200,00
11	Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	Rp	2.525.000,00
	Mutasi Kurang :	Rp -	5.834.055.277,00
1	Transaksi Normalisasi	Rp -	1.189.767.000,00
2	Penghapusan	Rp -	797.000,00
3	Transfer Keluar	Rp -	1.077.213.322,00
4	Reklasifikasi Keluar	Rp -	2.579.061.090,00
5	Koreksi Pencatatan	Rp -	710.465.900,00
6	Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp -	276.750.965,00
	Selisih	Rp	3.231.144.373,00
Saldo per 31 Desember 2016		Rp	559.435.282.524,00

Untuk perubahan saldo jalan, irigasi dan jaringan ini antara lain adanya reklasifikasi masuk di Satker UIN Sunan Gunung Jati Jawa Barat sebesar Rp25.844.115.537,00 yang berasal dari Aset Tetap Lainnya dan transfer keluar senilai Rp1.002.214.322,00 dari Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan kepada Satker UPT Asrama Haji Makassar. Rincian atas Jalan, Irigasi dan Jaringan pada eselon I disajikan dalam lampiran 12.

C.22 Aset Tetap Lainnya

Aset Lainnya

Rp1.202.925.712.827,00

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah aset tetap renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya. Aset tetap lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.202.925.712.827,00 dan Rp1.129.648.603.295,00. Aset tetap lainnya tersebut terbagi atas non Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum. Untuk saldo aset tetap lainnya non Badan Layanan Umum per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.070.385.200.110,00 dan Rp981.525.550.714,00. Sedangkan saldo aset tetap lainnya Badan Layanan Umum yang dimiliki Kementerian Agama per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp132.540.512.717,00 dan Rp148.123.052.581,00. Aset tetap lainnya Badan Layanan Umum merupakan saldo yang dikonsolidasikan dalam neraca Unit Eselon 1 Ditjen Pendidikan Islam.

Mutasi aset tetap lainnya Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2016		Rp	1.129.648.603.295,00
	Mutasi Tambah:	Rp	191.751.371.197,00
1	Penambahan Saldo Awal	Rp	206.153.895,00
2	Pembelian	Rp	98.493.936.704,00
3	Transfer Masuk	Rp	65.982.693.530,00
4	Hibah (Masuk)	Rp	150.000.000,00
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp	24.682.786.581,00
6	Reklasifikasi Masuk	Rp	1.532.043.505,00
7	Perolehan Lainnya	Rp	975.000,00
8	Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp	95.766.000,00
9	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp	195.833.400,00
10	Pengembangan Nilai Aset	Rp	303.470.000,00
11	Pengembangan Melalui KDP	Rp	105.000.000,00
12	Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	Rp	2.712.582,00

Saldo per 1 Januari 2016		Rp	1.129.648.603.295,00
	Mutasi Kurang :	Rp	(117.876.824.199,00)
1	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	Rp	(54.753.992,00)
2	Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	Rp	(771.063.208,00)
3	Penghapusan	Rp	(543.132.850,00)
4	Transfer Keluar	Rp	(68.669.242.796,00)
5	Hibah (Keluar)	Rp	(991.176.000,00)
6	Reklasifikasi Keluar	Rp	(39.178.574.377,00)
7	Koreksi Pencatatan	Rp	(2.989.044.430,00)
8	Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	(4.679.836.546,00)
	Selisih	Rp	(597.437.466,00)
Saldo per 31 Desember 2016		Rp	1.202.925.712.827,00

Sementara perubahan atas saldo Aset Tetap Lainnya adalah antara lain reklasifikasi keluar di UIN Sunan Gunung Jati sebesar Rp25.844.115.537,00 dan penyelesaian pembangunan dengan KDP oleh Satker Pusat Sekretariat Jenderal sebesar Rp13.568.099.000,00 berupa ATR serta transfer keluar ATR tersebut ke Satker Lajnah Pentashihan Al Qur'an Badan Diklat dan Litbang.

Rincian atas Aset Tetap Lainnya pada eselon I disajikan dalam lampiran 13.

Konstruksi Dalam

Pengerjaan

Rp1.356.906.741.380,00

C.23 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.356.906.741.380,00 dan Rp1.781.743.789.398,00 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan tempat kerja dan tempat tinggal yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut terbagi atas non Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum. Untuk saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan non Badan Layanan Umum per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp844.211.818.789,00 dan Rp744.966.878.706. Sedangkan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum yang dimiliki Kementerian Agama per 31 Desember 2016 dan

2015 adalah masing-masing sebesar Rp512.694.922.591,00 dan Rp1.036.776.910.692,00. Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum merupakan saldo yang dikonsolidasikan dalam neraca Unit Eselon 1 Ditjen Pendidikan Islam.

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2016	Rp	1.781.743.789.398
Mutasi Tambah:	Rp	2.091.008.640.244
Pengembangan Melalui KDP	Rp	2.091.008.640.244
Mutasi Kurang :	Rp	(2.361.724.955.812)
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	Rp	(2.361.724.955.812)
Selisih	Rp	(154.120.732.450)
Saldo per 31 Desember 2016	Rp	1.356.906.741.380

Rincian atas Konstruksi Dalam Pengerjaan pada eselon I disajikan dalam lampiran 14.

*Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp8.958.116.992.996,00*

C.24 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing Rp8.958.116.992.996,00 dan Rp7.915.511.916.097

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016.

Tabel 48

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	Rp 5.159.599.558.394,00	Rp (4.276.851.357.447,00)	Rp 882.748.200.947,00
Peralatan dan Mesin - BLU	Rp 1.823.494.750.742,00	Rp (851.847.983.715,00)	Rp 971.646.767.027,00
Gedung dan Bangunan	Rp 17.924.371.686.921,00	Rp (3.137.287.750.771,00)	Rp 14.787.083.936.150,00
Gedung dan Bangunan - BLU	Rp 4.413.693.193.811,00	Rp (416.404.275.482,00)	Rp 3.997.288.918.329,00
Jalan dan Jembatan	Rp 114.695.134.679,00	Rp (99.848.329.167,00)	Rp 14.846.805.512,00
Irigasi	Rp 121.486.878.012,00	Rp (32.732.431.943,00)	Rp 88.754.446.069,00
Jaringan	Rp 89.988.701.515,00	Rp (32.855.813.832,00)	Rp 57.132.887.683,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	Rp 233.264.568.318,00	Rp (49.303.890.874,00)	Rp 183.960.677.444,00
Aset Tetap Lainnya	Rp 1.070.385.200.110,00	Rp (59.562.211.873,00)	Rp 1.010.822.988.237,00
Aset Tetap Lainnya- BLU	Rp 132.540.512.717,00	Rp (1.422.947.892,00)	Rp 131.117.564.825,00
Akumulasi Penyusutan	Rp 31.083.520.185.219,00	Rp (8.958.116.992.996,00)	Rp 22.125.403.192.223,00

Rincian atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada eselon I disajikan dalam lampiran 15.

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
Rp771.071.926,00

C.25 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp771.071.926,00 dan Rp(21.758.102,00). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih -
Tagihan TTP/TGR
Rp92.333,00

C.26 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Jumlah Penyisihan Piutang Tak tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp92.333,00 dan Rp742.730,00.

C.27 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp129.780.496.061,00

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp129.780.496.061,00 dan Rp121.788.737.076,00. Aset Tak Berwujud tersebut terbagi atas non Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum. Untuk saldo Aset Tak Berwujud non Badan Layanan Umum per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp89.965.331.268,00 dan Rp87.533.022.965,00. Sedangkan saldo Aset Tak Berwujud Badan Layanan Umum yang dimiliki Kementerian Agama per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp39.815.164.793,00 dan Rp34.255.714.111,00. Aset Tak Berwujud Badan Layanan Umum merupakan saldo yang dikonsolidasikan dalam neraca Unit Eselon 1 Ditjen Pendidikan Islam.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2016		Rp	121.788.737.076,00
	Mutasi Tambah:	Rp	9.835.839.282,00
1	Penambahan Saldo Awal	Rp	866.018.160,00
2	Pembelian	Rp	6.677.888.639,00
3	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp	404.754.000,00
4	Reklasifikasi Masuk	Rp	1.061.403.783,00
5	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lain	Rp	14.300.000,00
6	Pengembangan Nilai Aset	Rp	811.474.700,00
	Mutasi Kurang :	Rp -	2.023.315.178,00
1	Penghapusan	Rp -	27.000.000,00
2	Reklasifikasi Keluar	Rp -	1.533.751.654,00
3	Koreksi Pencatatan	Rp -	433.963.524,00
4	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	Rp -	14.300.000,00
5	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Rp -	14.300.000,00
	Selisih	Rp	179.234.881,00
Saldo per 31 Desember 2016		Rp	129.780.496.061,00

Tabel 49

Rincian Aset Tak Berwujud

Keterangan	Nilai
Hak Cipta	Rp 170.864.000,00
Software	Rp 68.716.657.967,00
Lisensi	Rp 1.435.783.892,00
Hasil Kajian/Penelitian	Rp 1.585.000,00
Hak Cipta	Rp -
Aset Tak Berwujud Lainnya	Rp 19.640.440.409,00
Software-Badan Layanan Umum	Rp 26.108.007.857,00
Aset Tak Berwujud Lainnya-Badan Layanan Umum	Rp 13.707.156.936,00
Jumlah Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	Rp 129.780.496.061,00

Rincian atas Aset Tak Berwujud pada eselon I disajikan dalam lampiran 16.

Aset Lain-Lain

Rp199.236.424.838,00

C.28 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kementerian Agama serta dalam proses penghapusan dari BMN. Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp199.236.424.838,00 dan Rp164.520.702.355,00. Aset Lain-lain tersebut terbagi atas non Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum. Untuk saldo Aset Lain-lain non Badan Layanan Umum per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp175.506.784.055,00 dan Rp138.316.764.424,00. Sedangkan saldo Aset Lain-lain Badan Layanan Umum yang dimiliki Kementerian Agama per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp23.729.640.783,00 dan Rp26.203.937.931,00. Aset Lain-lain Badan Layanan Umum merupakan saldo yang dikonsolidasikan dalam neraca Unit Eselon 1 Ditjen Pendidikan Islam.

Mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2016		Rp 164.520.702.355,00
	Mutasi Tambah:	Rp 83.906.347.952,00
1	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lain	Rp 83.550.889.491,00
2	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan Penggunaannya)	Rp 355.458.461,00
	Mutasi Kurang :	Rp - 43.144.128.298,00
1	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan Penggunaannya)	Rp - 5.826.516.142,00
2	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	Rp - 29.062.873.165,00
3	Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	Rp - 368.009.698,00
4	Hibah Keluar (BMN yang dihentikan)	Rp - 79.730.000,00
5	Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	Rp - 173.990.060,00
6	Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	Rp - 500.000,00
7	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN yang dihentikan)	Rp - 6.378.127.607,00
8	Usulan Barang Hilang ke Pengelola (BMN yang dihentikan)	Rp - 29.846.940,00
9	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan	Rp - 1.224.534.686,00
	Selisih	Rp - 6.046.497.171,00
Saldo per 31 Desember 2016		Rp 199.236.424.838,00

Tabel 50
Rincian Aset Lain-lain

Keterangan	Nilai
Aset Lain-lain	Rp 761.968.833,00
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	Rp 174.576.848.222,00
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	Rp 167.967.000,00
Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum	Rp 804.119.200,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Rp 22.925.521.583,00
Jumlah	Rp 199.236.424.838,00

Rincian atas Aset Lain-lain pada eselon I disajikan dalam lampiran 17.

*Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp1.439.575.404.223,00*

C.29 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp 1.439.575.404.223,00 dan Rp1.505.597.044.704,00. Berdasarkan surat Kementerian Keuangan Nomor S-3410/PB.6/2011 tanggal 30 Maret 2011, aset bersih (*net asset*) Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji (LK PIH) disajikan dalam Laporan Keuangan Kementerian Agama

pada akun Dana yang Dibatasi Penggunaannya.

*Dana Kelolaan Badan
Layanan Umum
Rp3.406.023.750,00*

C.30 Dana Kelolaan Badan Layanan Umum

Saldo dana kelolaan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.406.023.750,00 dan Rp0,00. Dana kelolaan Badan Layanan Umum tersebut ada pada satker UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diperuntukkan untuk kegiatan kerjasama dengan lembaga lain, antara lain penelitian dosen, beasiswa.

*Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp225.167.297.766,00*

C.31 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp225.167.297.766,00 dan Rp107.330.885.658,00.

Tabel 51

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

NO	ASET LAINNYA	NILAI PEROLAHAN	AKUM. PENYUSUTAN	NILAI BUKU
	Aset Tak Berwujud			
1	Hak Cipta	Rp 170.864.000,00	Rp (7.057.488,00)	Rp 163.806.512,00
2	Software	Rp 68.716.657.967,00	Rp (62.451.531.687,00)	Rp 6.265.126.280,00
3	Lisensi	Rp 1.435.783.892,00	Rp (530.802.533,00)	Rp 904.981.359,00
4	Hasil Kajian/Penelitian	Rp 1.585.000,00	Rp -	Rp 1.585.000,00
5	Aset Tak Berwujud Lainnya	Rp 19.640.440.409,00	Rp -	Rp 19.640.440.409,00
6	Hak Cipta-BLU	Rp -	Rp (16.450.763,00)	Rp (16.450.763,00)
7	Software-Badan Layanan Umum	Rp 26.108.007.857,00	Rp (17.592.870.143,00)	Rp 8.515.137.714,00
8	Aset Tak Berwujud Lainnya-Badan Layanan Umum	Rp 13.707.156.936,00	Rp -	Rp 13.707.156.936,00
	Jumlah Aset Tak Berwujud	Rp 129.780.496.061,00	Rp (80.598.712.614,00)	Rp 49.181.783.447,00
	Aset Lain-lain			
9	Aset Lain-lain	Rp 761.968.833,00	Rp (67.379.150,00)	Rp 694.589.683,00
10	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Rp 174.576.848.222,00	Rp (139.924.334.290,00)	Rp 34.652.513.932,00
11	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	Rp 167.967.000,00	Rp (57.489.000,00)	Rp 110.478.000,00

NO	ASET LAINNYA	NILAI PEROLAHAN	AKUM. PENYUSUTAN	NILAI BUKU
12	Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum	Rp 804.119.200,00	Rp -	Rp 804.119.200,00
13	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan - BLU	Rp 22.925.521.583,00	Rp (4.519.382.712,00)	Rp 18.406.138.871,00
	Jumlah Aset Lain-lain	Rp 199.236.424.838,00	Rp (144.568.585.152,00)	Rp 54.667.839.686,00
	TOTAL	Rp 329.016.920.899,00	Rp (225.167.297.766,00)	Rp 103.849.623.133,00

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp4.637.682.250.697,00

C.32 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp4.637.682.250.697,00 dan Rp2.303.205.177.801,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Pada Kementerian Agama, Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari honor kegiatan yang belum dibagikan kepada pegawai, kekurangan gaji pegawai yang belum dibayar, dan belanja barang yang tagihannya belum dilunasi.

Tabel 52

*Perbandingan Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
TA 2016 dan 2015*

KETERANGAN	TAHUN 2016	TAHUN 2015
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Rp 3.149.295.380.392,00	Rp 921.709.389.377,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	Rp 15.171.173.546,00	Rp (63.396.289.546,00)
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	Rp -	Rp (7.842.660,00)
Belanja Hibah yang Masih Harus Dibayar	Rp -	Rp 1.000.000,00

KETERANGAN	TAHUN 2016	TAHUN 2015
Belanja Bantuan Sosial yang Masih Harus Dibayar	Rp 99.750.000,00	Rp 72.419.578.560,00
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Yang Masih Harus Dibayar	Rp 27.461.200,00	Rp 9.537.053,00
Belanja Lain-lain yang Masih Harus Dibayar	Rp 17.568.500,00	Rp (179.170.451,00)
Utang kepada Pihak Ketiga - BLU	Rp 7.024.994.361,00	Rp 2.910.871.761,00
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	Rp 1.447.234.208.838,00	Rp (132.197.393.472,00)
Dana Pihak Ketiga	Rp 15.405.690.110,00	Rp (4.222.064.525,00)
Dana Pihak Ketiga Lainnya - BLU	Rp 3.406.023.750,00	Rp 560.517.000,00
Dana yang Dibatasi Penggunaannya (BPIH)	Rp -	Rp 1.505.597.044.704,00
Jumlah	Rp 4.637.682.250.697,00	Rp 2.303.205.177.801,00

Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2016 diantaranya merupakan hutang Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp2.693.697.292.089,00.

Hutang TPG per 31 Desember 2016 adalah TPG yang belum dilakukan pembayarannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. TPG adalah pembayaran tunjangan yang diberikan kepada guru di lingkungan Kementerian Agama baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non PNS yang telah memenuhi kriteria untuk dapat diberikan TPG.

Dasar hukum pemberian TPG di lingkungan Kementerian Agama adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1738) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1066);
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik.

Rincian Hutang TPG per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.693.697.292.089,00 adalah sebagai berikut :

1. Hutang TPG PNS dan Non PNS periode pembayaran TA 2013 s.d. 2015 yang belum dilakukan pembayaran s.d. tanggal 31 Desember 2016. Hutang TPG ini merupakan hutang hasil verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan jumlah guru sebanyak 113.338 dengan total hutang TPG sebesar Rp945.968.750.509,00 (Lampiran 18);
2. Hutang TPG Non PNS Inpassing Tahun 2016 berdasarkan hasil verifikasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama. Hutang ini terdiri atas 65.354 guru dengan total hutang TPG per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.179.113.630.395,00 (Lampiran 19);
3. Hutang TPG guru PNS hasil verifikasi Itjen Kementerian Agama TA 2015 dan 2016 yang belum terdata dalam hasil verifikasi BPKP. Hutang ini terdiri atas 42.186 guru dengan total hutang TPG per 31 Desember 2016 sebesar Rp568.614.911.185,00 (Lampiran 20).

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada masing-masing eselon I disajikan pada lampiran 21.

*Hibah Yang
Belum Disahkan
Rp7.955.774.000,00*

C.33 Hibah Yang Belum Disahkan

Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp7.955.774.000,00 dan Rp35.342.855.000.

Rincian saldo Hibah yang belum disahkan pada masing-masing eselon I disajikan pada lampiran 22.

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp23.515.800.440,00*

C.34 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp23.515.800.440,00 dan Rp19.650.705.177,00. Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan PNBPN yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa. Pendapatan Diterima di Muka pada Kementerian Agama berupa pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan, pendapatan uang pendidikan, pendapatan jasa pelayanan pendidikan, pendapatan pendidikan lainnya, pendapatan hasil kerjasama perorangan, dan pendapatan hasil kerjasama lembaga.

Rincian per eselon I disajikan pada lampiran 23.

*Uang Muka dari KPPN
Rp2.675.693.411,00*

C.35 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp2.675.693.411,00 dan Rp12.466.714.369,00 merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang Jangka Pendek
Lainnya
Rp1.339.952.128,00*

C.36 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.339.952.128,00 dan Rp165.964.858,00. Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain berupa utang potongan pajak oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke rekening kas negara. Rincian utang jangka pendek lainnya pada masing-masing eselon I disajikan pada lampiran 24.

*Ekuitas
Rp37.252.896.560.065,00*

C.37 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp37.252.896.560.065,00 dan Rp37.752.024.774.205,00 Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



CALK LAPORAN OPERASIONAL

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

PNBP Lainnya

Rp2.306.116.936.811,00

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Kementerian Agama berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya (PNBP Lainnya) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing adalah sebesar Rp2.306.116.936.811,00 dan Rp1.905.820.326.505,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 53

Perbandingan Rincian PNBP Lainnya TA 2016 dan 2015

AKUN	URAIAN AKUN	TH 2016	TH 2015	%NAIK (TURUN)
423117	Pendapatan Penjualan Dokumen-Dokumen Pelelangan		1.400.000,00	(100,00)
423119	Pendapatan Penjualan Lainnya	5.387.000,00	9.000.034,00	(40,14)
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	28.857.334.173,00	354.889.264,00	8.031,36
423142	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	441.126.041,00	1.203.218.778,00	(63,34)
423149	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	9.596.000,00	12.412.000,00	(22,69)
423211	Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya		538.836,00	(100,00)
423217	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	738.877.084.337,00	728.000.336.291,00	1,49
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	236.976.421,00	1.471.016.762,00	(83,89)
423227	Pendapatan Bea Lelang		29.203.400,00	(100,00)
423291	Pendapatan Jasa Lainnya	9.570.000,00	3.094.059.628,00	(99,69)
423319	Pendapatan Bunga Lainnya	341.393,00	1.393.739,00	(75,51)
423411	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	35.928.500,00	-	-
423414	Pendapatan Hasil Denda dan sebagainya	910.350,00	-	-
423511	Pendapatan Uang Pendidikan	362.768.874.336,00	270.176.894.877,00	34,27
423512	Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan	12.620.083.599,00	9.127.990.000,00	38,26
423513	Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek	5.394.348.100,00	16.497.307.353,00	(67,30)
423519	Pendapatan Pendidikan Lainnya	28.190.468.961,00	36.684.329.314,00	(23,15)
423613	Pendapatan dari Pengembalian Penyalahgunaan Penyelenggaraan Keuangan	203.769.088,00		
423615	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	76.523.995,00		
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	3.915.305.208,00	3.696.990.905,00	5,91
423931	Pendapatan dari Penutupan Rekening	2.549.424,00	63.212.162,00	(95,97)
423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	23.471.042,00	78.032.693,00	(69,92)
423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	485.336.886,00	27.421.339.186,00	(98,23)
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	952.532.051.385,00	730.728.165.219,00	30,35
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	37.295.035.841,00	26.571.443.521,00	40,36

AKUN	URAIAN AKUN	TH 2016	TH 2015	%NAIK (TURUN)
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda	23.023.382.700,00	5.551.820.900,00	314,70
424222	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha	3.872.412.631,00	952.180.000,00	306,69
424223	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda	61.338.005.000,00		
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	3.515.634.517,00	2.723.782.055,00	29,07
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	17.773.177.565,00	20.555.555.822,00	(13,54)
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	365.000.000,00		
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	24.247.252.318,00	20.813.813.766,00	16,50
JUMLAH		2.306.116.936.811,00	1.905.820.326.505,00	21,00

Total PNBK Lainnya Kementerian Agama sebesar Rp2.306.116.936.811,00 bersumber dari pendapatan kegiatan operasional. Pendapatan ini terdiri dari pendapatan kas sebesar Rp2.240.702.750.092,00 dan pendapatan non kas. Pendapatan non kas Kementerian Agama antara lain bersumber dari Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda sebesar Rp61.338.005.000,00, Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha sebesar Rp3.872.412.631,00, dan Pendapatan dari Pengembalian Penyalahgunaan Penyelenggaraan Keuangan sebesar Rp203.769.088,00.

Pendapatan Kementerian Agama Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 21,00%, antara lain disebabkan karena adanya kenaikan pada pendapatan pendidikan baik pada Satker Badan Layanan Umum maupun Satker Perguruan Tinggi yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum serta kenaikan pada pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan.

Beban Pegawai

Rp37.167.875.137.967,00

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp37.167.875.137.967,00 dan Rp32.686.059.428.307,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 54

Perbandingan Rincian Beban Pegawai TA 2016 dan 2015

AKUN	URAIAN AKUN	TAHUN 2016	TAHUN 2015	NAIK (TURUN) %
511111	Beban Gaji Pokok PNS	10.608.969.817.250,00	9.492.740.921.259,00	11,76
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	169.956.318,00	77.143.030,00	120,31
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	739.232.836.060,00	716.759.135.150,00	3,14
511122	Beban Tunj. Anak PNS	246.663.067.076,00	238.745.436.533,00	3,32
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	106.201.016.286,00	105.904.989.298,00	0,28
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	869.654.977.751,00	862.340.711.059,00	0,85
511125	Beban Tunj. PPh PNS	150.520.653.320,00	254.655.871.238,00	(40,89)
511126	Beban Tunj. Beras PNS	610.823.577.175,00	596.652.093.743,00	2,38
511127	Beban Tunj. Kemahalan PNS	60.000.000,00		
511128	Beban Tunj. Lauk pauk PNS	72.837.120,00	7.267.000,00	902,30
511129	Beban Uang Makan PNS	1.726.680.695.609,00	1.711.869.429.487,00	0,87
511131	Beban Tunj Perbaikan Penghasilan PNS		(1.456.400,00)	(100,00)
511132	Pengembalian Beban Tunj.Cacat PNS		(9.022.274,00)	(100,00)
511133	Beban Tunj Khusus Peralihan PNS		13.448.000,00	(100,00)
511134	Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS	7.750.950,00	76.292.224,00	(89,84)
511136	Beban Tunj. Guru/Dosen/PNS yg diperkejakan pd sekolah/PT Swasta/		(174.640.200,00)	(100,00)
511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	3.800.825.000,00	3.453.117.373,00	10,07
511137	Beban Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk Mengikuti Pendidikan Pasca Sarjana PNS	697.090.466,00	100.725.000,00	592,07
511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	13.898.240.000,00	14.103.827.500,00	(1,46)
511147	Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri	16.511.904,00	4.890.083.889,00	(99,66)
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	135.135.330.862,00	109.722.170.205,00	23,16
511152	Beban Tunjangan Profesi Guru	11.516.816.145.880,00	10.698.605.948.811,00	7,65
511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	441.160.666.120,00	418.205.715.066,00	5,49
511154	Beban Tunjangan Kehormatan Profesor	50.928.466.930,00	47.550.515.704,00	7,10
511155	Beban Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS	30.560.014.515,00	49.099.210.504,00	(37,76)
511156	Beban Tunjangan Khusus Guru/Dosen	3.471.821.956,00	2.395.734.300,00	44,92
511173	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS TNI/Polri		(22.680.000,00)	(100,00)
511179	Beban Uang Makan PNS TNI/Polri		(308.911.000,00)	(100,00)
511181	Beban Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS TNI/Polri		35.985.600,00	(100,00)
511188	Beban Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS	76.700.000,00	234.075.000,00	(67,23)

AKUN	URAIAN AKUN	TAHUN 2016	TAHUN 2015	NAIK (TURUN) %
511191	Pengembalian Beban Tunj. Medis TNI/Polri		(330,00)	(100,00)
511192	Beban Tunj. Lain lain Termasuk Uang Duka PNS TNI/Polri		73.223.732,00	(100,00)
511196	Beban Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi PNS Polri	12.000.000,00		
511511	Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS	5.302.560.800,00	2.582.529.054,00	105,32
511512	Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	83.958.480.196,00	49.895.599.502,00	68,27
511513	Beban Pembulatan gaji Peg Non PNS		8.770.000,00	(100,00)
511519	Beban Tunjangan Lainnya Non PNS	867.000.000,00	46.320.997.643,00	(98,13)
511521	Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	6.476.576.686.916,00	4.449.919.736.019,00	45,54
511522	Beban Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	312.375.672.386,00	319.173.060.995,00	(2,13)
512111	Beban Uang Honor Tetap	184.093.354.057,00	175.049.973.684,00	5,17
512211	Beban Uang Lembur	57.409.299.104,00	60.835.337.297,00	(5,63)
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2.539.923.396.945,00	2.103.997.141.766,00	20,72
512412	Beban Pegawai Transito	27.644.904,00	994.889.201,00	(97,22)
525111	Beban Gaji dan Tunjangan	251.710.044.111,00	149.485.032.645,00	68,38
JUMLAH		37.167.875.137.967,00	32.686.059.428.307,00	13,71

Total Beban Pegawai Kementerian Agama Tahun 2016 sebesar Rp37.167.875.137.967,00. Beban Pegawai ini antara lain terdiri dari Beban Pegawai yang dibayarkan selama tahun 2016 sebesar Rp34.792.011.741.215,00 dan Beban Tunjangan Profesi Guru PNS dan Tenaga Pendidik Non PNS yang diakui sebagai hutang pada tahun 2016 sebesar Rp2.693.697.292.089,00.

Beban Pegawai Kementerian Agama Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 13,71%, antara lain disebabkan karena adanya kenaikan jumlah PNS di lingkungan Kementerian Agama, pengakuan atas Beban Tunjangan Profesi Guru dan Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS yang belum dilakukan pembayaran sampai dengan 31 Desember 2016, kenaikan pembayaran gaji pokok dan tunjangan pegawai non PNS dan pada Satker Badan Layanan Umum, serta kenaikan pembayaran tunjangan tugas belajar tenaga pengajar biasa pada Perguruan Tinggi untuk mengikuti pendidikan pasca sarjana PNS.

Beban Persediaan

Rp286.604.966.611,00

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp286.604.966.611,00 dan Rp332.124.014.892,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 55

Perbandingan Rincian Beban Persediaan TA 2016 dan 2015

AKUN	URAIAN AKUN	TAHUN 2016	TAHUN 2015	NAIK (TURUN) %
593111	Beban Persediaan konsumsi	253.090.043.899,00	298.739.972.224,00	(15,28)
593112	Beban Persediaan Amunisi	-	3.399.200,00	(100,00)
593121	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	1.017.201.824,00	1.877.992.414,00	(45,84)
593131	Beban Persediaan bahan baku	14.094.106.220,00	25.133.893.397,00	(43,92)
593141	Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	135.460.645,00	1.529.402.091,00	(91,14)
593149	Beban Persediaan Lainnya	18.268.154.023,00	4.839.355.566,00	277,49
JUMLAH		286.604.966.611,00	332.124.014.892,00	(13,71)

Total Beban Persediaan Kementerian Agama Tahun 2016 sebesar Rp286.604.966.611,00. Beban Persediaan Kementerian Agama antara lain dicairkan dari belanja barang persediaan sebesar Rp226.679.704.829,00 (Rp241.782.446.912,00-Rp15.102.742.083,00) dan belanja bukan persediaan sebesar Rp53.925.054.037,00.

Beban Barang dan Jasa

Rp11.237.073.422.550,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp11.237.073.422.550,00 dan Rp12.477.588.790.387,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 56
Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2016 dan 2015

AKUN	URAIAN AKUN	TAHUN 2016	TAHUN 2015	NAIK (TURUN) %
521111	Beban Keperluan Perkantoran	581.649.521.520,00	568.693.623.498,00	2,28
521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	383.735.500,00	914.289.700,00	(58,03)
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	2.938.061.992,00	2.744.417.026,00	7,06
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.784.402.689,00	3.370.234.097,00	(17,38)
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	346.810.130.400,00	318.826.350.029,00	8,78
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	249.798.865.420,00	258.060.025.775,00	(3,20)
521211	Beban Bahan	927.112.905.013,00	1.265.589.158.659,00	(26,74)
521212	Beban Barang Transito	3.850.000,00	31.088.000,00	(87,62)
521213	Beban Honor Output Kegiatan	627.283.789.367,00	807.231.120.496,00	(22,29)
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	7.280.584.755.127,00	7.854.755.783.318,00	(7,31)
52123	Beban Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	12.150.000,00	-	
522111	Beban Langganan Listrik	147.623.808.498,00	139.981.137.260,00	5,46
522112	Beban Langganan Telepon	23.027.503.122,00	22.015.527.873,00	4,60
522113	Beban Langganan Air	14.201.843.929,00	12.080.681.918,00	17,56
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	40.201.842.087,00	41.738.136.626,00	(3,68)
522121	Beban Jasa Pos dan Giro	533.032.901,00	699.774.187,00	(23,83)
522131	Beban Jasa Konsultan	6.212.607.234,00	4.578.847.282,00	35,68
522141	Beban Sewa	75.826.235.302,00	105.695.510.875,00	(28,26)
522151	Beban Jasa Profesi	459.902.131.843,00	681.641.657.451,00	(32,53)
522191	Beban Jasa Lainnya	31.155.257.726,00	34.081.907.842,00	(8,59)
525112	Beban Barang	122.051.033.938,00	87.796.087.765,00	39,02
525113	Beban Jasa	38.300.242.002,00	20.917.463.602,00	83,10
525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	248.678.204.354,00	215.799.609.639,00	15,24
526312	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	(112.848.592,00)	-	
595111	Beban Aset Ekstrakomtabel Tanah		(421.552.000,00)	(100,00)
595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	8.993.324.074,00	15.539.582.803,00	(42,13)
595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	19.006.500,00	35.989.244.804,00	(99,95)
595114	Beban Aset Ekstrakomtabel Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.709.000,00	(2.355.329.796,00)	(100,12)
595115	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	266.754.989,00	(586.373.402,00)	(145,49)
595116	Beban Aset Ekstrakomtabel Konstruksi Dalam Pengerjaan	61.625.400,00	140.765.700,00	(56,22)

AKUN	URAIAN AKUN	TAHUN 2016	TAHUN 2015	NAIK (TURUN) %
595117	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tak Berwujud	38.280.000,00	1.674.651.022,00	(97,71)
595122	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin - BLU	349.159.593,00	338.346.103,00	3,20
595123	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan - BLU	7.634.000,00	-	
595125	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya - BLU		(31.640.000,00)	(100,00)
595127	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tak Berwujud - BLU	371.867.622,00	(19.941.337.765,00)	(101,86)
JUMLAH		11.237.073.422.550,00	12.477.588.790.387,00	(9,94)

Total Beban Barang dan Jasa Kementerian Agama Tahun 2016 sebesar Rp11.237.073.422.550,00. Beban Barang dan Jasa Kementerian Agama antara lain terdiri dari Belanja Barang Dan Jasa selama tahun 2016 sebesar Rp11.257.789.243.908,00 dan transaksi Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar selama tahun 2016.

Beban Barang dan Jasa Kementerian Agama Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 9,94%, antara lain disebabkan oleh karena adanya penghematan anggaran pada tahun 2016 yang berpengaruh pada penurunan Beban Bahan, Beban Jasa Profesi, dan Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Beban Pemeliharaan
Rp567.474.854.017,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp567.474.854.017,00 dan Rp672.309.838.562,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 57
Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2016 dan 2015

AKUN	URAIAN AKUN	TAHUN 2016	TAHUN 2015	NAIK (TURUN) %
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	321.066.442.524,00	381.266.364.090,00	(15,79)
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	13.060.537.559,00	10.756.302.170,00	21,42
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	181.578.520.784,00	177.429.125.618,00	2,34
523122	Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	1.535.060.235,00	3.555.939.674,00	(56,83)
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.874.839.625,00	5.096.219.665,00	15,28
523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	161.216.750,00	2.142.532.000,00	(92,48)
523132	Beban Pemeliharaan Irigasi	47.720.000,00	93.560.409,00	(49,00)
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	4.590.698.201,00	4.021.705.833,00	14,15
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	1.819.059.284,00	1.334.256.329,00	36,34
525114	Beban Pemeliharaan	22.266.965.525,00	10.106.139.423,00	120,33
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	13.888.776.499,00	73.529.652.408,00	(81,11)
593114	Beban Persediaan suku cadang	1.585.017.031,00	2.978.040.943,00	(46,78)
JUMLAH		567.474.854.017,00	672.309.838.562,00	(15,59)

Total Beban Pemeliharaan Kementerian Agama Tahun 2016 sebesar Rp567.474.854.017. Beban Pemeliharaan Kementerian Agama antara lain terdiri dari Belanja Pemeliharaan pada tahun 2016 sebesar Rp566.572.607.563,00.

Beban Perjalanan Dinas
Rp1.925.440.174.185,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.925.440.174.185,00 dan Rp1.640.817.337.061,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 58
Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2016 dan 2015

AKUN	URAIAN AKUN	TAHUN 2016	TAHUN 2015	NAIK (TURUN) %
524111	Beban Perjalanan Biasa	600.633.445.812,00	472.125.080.429,00	27,22
524112	Beban Perjalanan Tetap	9.645.739.660,00	13.182.540.834,00	(26,83)
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	239.178.347.747,00	211.250.845.211,00	13,22
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	469.767.160.853,00	446.053.061.539,00	5,32
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	426.500.069.482,00	337.758.144.595,00	26,27
524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	22.827.073.376,00	10.029.173.126,00	127,61
524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	104.202.514.644,00	105.912.923.732,00	(1,61)
525115	Beban Perjalanan	52.685.822.611,00	44.505.567.595,00	18,38
JUMLAH		1.925.440.174.185,00	1.640.817.337.061,00	17,35

Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp355.071.767.116,00

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp355.071.767.116,00 dan Rp561.545.903.106,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 59
Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada
Masyarakat TA 2016 dan 2015

AKUN	URAIAN AKUN	TAHUN 2016	TAHUN 2015	NAIK (TURUN) %
526111	Beban Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	91.197.220.800,00	152.664.225.859,00	(40,26)
526112	Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	24.627.510.982,00	80.629.319.389,00	(69,46)
526113	Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	1.253.100.000,00	11.557.985.003,00	(89,16)
526114	Beban Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada	3.150.000,00	340.164.000,00	(99,07)
526115	Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada	111.459.697.703,00	57.777.971.962,00	92,91
526311	Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	123.822.088.207,00	255.572.465.683,00	(51,55)
593122	Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada	2.287.819.920,00	390.283.300,00	486,19
593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin utk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda		533.062.000,00	(100,00)

AKUN	URAIAN AKUN	TAHUN 2016	TAHUN 2015	NAIK (TURUN) %
593125	Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada	473.665,00		
593126	Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada	168.441.800,00	179.215.000,00	(6,01)
593127	Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	8.735.500,00	(82.400.684,00)	(110,60)
593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	243.528.539,00	1.983.611.594,00	(87,72)
JUMLAH		355.071.767.116,00	561.545.903.106,00	(36,77)

Beban Bantuan Sosial
Rp1.188.200.289.835,00

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.188.200.289.835,00 dan Rp1.599.185.342.852,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 60

*Perbandingan Rincian Beban Bantuan Sosial
TA 2016 dan 2015*

AKUN	URAIAN AKUN	TAHUN 2016	TAHUN 2015	NAIK (TURUN) %
571111	Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang	(33.958.552,00)	(72.000.000,00)	(52,84)
571112	Beban Bantuan sosial utk rehabilitas sosial dlm bentuk barang/jasa		278.000.000,00	(100,00)
572111	Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang	40.724.700.000,00	94.828.861.600,00	(57,05)
572112	Beban bantuan Sosial utk Jaminan Sosial dlm bentuk Brg/Jasa		12.562.500,00	(100,00)
573111	Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang	54.031.625.588,00	65.356.405.372,00	(17,33)
573112	Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa	627.535.509,00	27.998.152.265,00	(97,76)
574111	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	1.045.519.462.290,00	1.196.961.887.670,00	(12,65)
575111	Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang	47.330.925.000,00	212.436.273.445,00	(77,72)
576111	Beban Bantuan Sosial Utk Penanggulangan Bencana dlm bentuk Uang		1.385.200.000,00	(100,00)
JUMLAH		1.188.200.289.835,00	1.599.185.342.852,00	(25,70)

Total Beban Bantuan Sosial Kementerian Agama Tahun 2016 sebesar Rp1.188.200.289.835,00. Beban Bantuan Sosial Kementerian Agama antara lain terdiri dari Belanja Bantuan Sosial yang dicairkan pada tahun 2016 sebesar Rp1.189.487.112.878,00 dan transaksi Belanja Bantuan Sosial yang Masih Harus Dibayar selama tahun 2016.

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp1.250.966.880.395,00

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.250.966.880.395,00 dan Rp1.186.927.433.529,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 61

Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2016 dan 2015

AKUN	URAIAN AKUN	TAHUN 2016	TAHUN 2015	NAIK (TURUN) %
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	686.533.702.036,00	683.861.050.721,00	0,39
591121	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - BLU	8.675.606.788,00		
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	498.167.879.008,00	455.560.817.338,00	9,35
591221	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - BLU	4.464.859.193,00		
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	16.723.959.091,00	12.165.388.223,00	37,47
591312	Beban Penyusutan Irigasi	7.605.952.607,00	8.324.319.997,00	(8,63)
591313	Beban Penyusutan Jaringan	5.320.222.470,00	6.144.644.001,00	(13,42)
591321	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	1.223.082.261,00		
591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	8.509.549.653,00	17.540.364.537,00	(51,49)
591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - BLU		(8.099.994,00)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP	1.237.224.813.107,00	1.183.588.484.823,00	4,53
592117	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya		(24.000,00)	(100,00)
592112	Beban Amortisasi Hak Cipta	2.440.916,00		
592115	Beban Amortisasi Software	9.679.730.278,00		

AKUN	URAIAN AKUN	TAHUN 2016	TAHUN 2015	NAIK (TURUN) %
592116	Beban Amortisasi Lisensi	101.947.149,00		
592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam	4.198.000,00		
592121	Beban Amortisasi Software-Badan Layanan Umum	361.419.250,00		
592122	Beban Amortisasi-Hak Cipta BLU	9.077.266,00		
592222	Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	3.583.254.429,00	3.160.085.049,00	13,39
592242	Beban Penyusutan Aset Lain-lain		178.887.657,00	(100,00)
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAIN-LAIN DAN ASET TAK BERWUJUD		13.742.067.288,00	3.338.948.706,00	311,57
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI		1.250.966.880.395,00	1.186.927.433.529,00	5,40

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp354.521.480,00

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp354.521.480,00 dan Rp4.604.013.428,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 62

Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
TA 2016 dan 2015

AKUN	URAIAN AKUN	TAHUN 2016	TAHUN 2015	NAIK (TURUN) %
594211	Beban Penyisihan Piutang PNPB	1.086.406.785,00	3.341.553.890,00	(67,49)
594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	66.100,00	24.000,00	175,42
594411	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan	134.000,00		
594612	Beban Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	(1.304.886.035,00)	1.240.179.447,00	(205,22)
594711	Beban Penyisihan Piutang Sewa Tanah BLU	77.216.855,00	(2.055.224,00)	(3.857,10)
594712	Beban Penyisihan Piutang Sewa Gedung BLU	(9.035.391,00)	10.799.781,00	(183,66)
594713	Beban Penyisihan Piutang Sewa Ruangan BLU	35.185.833,00	18.060.834,00	94,82
594714	Beban Penyisihan Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU	469.400.000,00		
594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan	33.333,00		
594791	Beban penyisihan piutang dari kegiatan non operasional lainnya BLU		(5.292.030,00)	(100,00)
594931	Beban Penyisihan piutang tak tertagih jangka panjang TP/TGR		742.730,00	
JUMLAH		354.521.480,00	4.604.013.428,00	(92,30)

Beban Lain-Lain
Rp3.146.900,00

D.11 Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lain Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.146.900,00 dan Rp(37.490.912,00).

Surplus/Defisit
Kegiatan Non
Operasional
Rp115.355.470.576,00

D.12. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp115.355.470.576,00 dan Rp118.987.804.347,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 63

Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2016 dan 2015

URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2015	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	3.769.161.202,00	2.478.168.506,00	52,09
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(18.710.763.865,00)	(13.734.547.370,00)	36,23
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	173.539.965.775,00	133.562.245.766,00	29,93
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(43.242.892.536,00)	(3.318.062.555,00)	1.203,26
JUMLAH	115.355.470.576,00	118.987.804.347,00	(3,05)

1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.769.161.202,00 dan Rp2.478.168.506,00 berasal dari Pendapatan Pengelolaan (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) BMN serta Penjualan BMN, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 64

Perbandingan Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
TA 2016 dan 2015

AKUN	URAIAN AKUN	TAHUN 2016	TAHUN 2015	NAIK (TURUN) %
423121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	275.862.401,00	53.207.848,00	418,46
423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	398.860.410,00	336.098.621,00	18,67
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3.094.438.391,00	2.088.862.037,00	48,14
	JUMLAH	3.769.161.202,00	2.478.168.506,00	52,09

2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp18.710.763.865,00 dan Rp13.734.547.370,00 berasal dari Beban Kerugian Pelepasan Aset.

3. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp173.539.965.775,00 dan Rp133.562.245.766,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 65
Perbandingan Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2016 dan 2015

AKUN	URAIAN AKUN	TAHUN 2016	TAHUN 2015	NAIK (TURUN) %
423921	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	2.894.727.072,00	89.272.925,00	3.142,56
423922	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	730.903.529,00	99.110.000,00	637,47
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	27.751.433.653,00	33.570.944.138,00	(17,33)
423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	49.515.867.096,00	25.676.651.292,00	92,84
423953	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	25.274.388.498,00	12.762.604.814,00	98,03
423954	Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran		(351.740,00)	(100,00)
423955	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	2.929.600,00	200.000,00	1.364,80
423956	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu		3.945.700,00	(100,00)
423957	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang	7.833.827.901,00	40.328.701.207,00	(80,58)
423958	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	2.276.371.235,00	5.427.848.295,00	(58,06)
491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	2.167.435,00		
491311	Pendapatan Penyesuaian Lainnya		441.118.000,00	(100,00)
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	54.913.113.576,00		
491421	Pendapatan Sitaan/Rampasan		185.955.799,00	(100,00)
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	2.344.236.180,00	14.976.245.336,00	(84,35)
JUMLAH		173.539.965.775,00	133.562.245.766,00	29,93

Kenaikan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2016 antara lain disebabkan karena adanya Penyesuaian Nilai Persediaan yang diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Operasional. Pada Tahun 2015, Penyesuaian Nilai Persediaan tidak diakui sebagai pendapatan tetapi merupakan bagian angka pembentuk ekuitas yang disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

4. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp43.242.892.536,00 dan Rp3.318.062.555,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 66

Perbandingan Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2016 dan 2015

AKUN	URAIAN AKUN	TAHUN 2016	TAHUN 2015	NAIK (TURUN) %
521214	Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan	41.787.572,00	18.600.000,00	124,66
593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	42.082.327.110,00		
596121	Kerugian Persediaan Rusak/Usang	1.116.610.419,00	3.299.462.555,00	(66,16)
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	2.167.435,00		
JUMLAH		43.242.892.536,00	3.318.062.555,00	1.203,26

Kenaikan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2016 antara lain disebabkan karena adanya Penyesuaian Nilai Persediaan yang diakui sebagai beban dan disajikan pada Laporan Operasional. Pada Tahun 2015, Penyesuaian Nilai Persediaan tidak diakui sebagai beban tetapi merupakan bagian angka pembentuk ekuitas yang disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



CALK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp37.752.024.774.205,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp37.752.024.774.205,00 dan Rp34.945.301.997.964,00

Defisit LO

Rp51.557.592.753.669,00

E.2 Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah defisit sebesar Rp51.557.592.753.669,00 dan Rp 49.136.316.480.360,00

Penyesuaian Nilai Aset

Rp300.797.775,00

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp300.797.775,00 dan Rp104.283.703.894,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir. Adapun rincian penyesuaian nilai aset adalah sebagai berikut :

Tabel 67

Rincian Penyesuaian Nilai Aset TA 2016

Jenis Penyesuaian Nilai Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	(287.457.776,00)
Bahan untuk Pemeliharaan	2.085.935,00
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1.520.000,00
Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	(2.660.000,00)
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	6.993.966,00
Bahan Baku	(21.315.900,00)
Persediaan Lainnya	36.000,00
Jumlah	(300.797.775,00)

Koreksi Nilai Persediaan

Rp(5.426.787.442,00)

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi atas nilai persediaan untuk tahun

2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp(5.426.787.442,00) dan Rp2.826.008.701,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 68

Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2016

Akun	Jenis Persediaan	Koreksi
117111	Barang Konsumsi	13.184.131.768,00
117112	Amunisi	(60.000,00)
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	7.603.456.128,00
117114	Suku Cadang	(150.275,00)
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	662.374.000,00
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	853.000.000,00
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	(490.000,00)
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	147.497.900,00
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	(5.364.800,00)
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	632.522.403,00
117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	126.525.897,00
117131	Bahan Baku	636.958.114,00
117141	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	(32.378.454,00)
117191	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	128.742.976,00
117199	Persediaan Lainnya	(28.835.717.040,00)
117212	Persediaan BLU Pelayanan Pendidikan	(621.696.326,00)
117911	Persediaan yang Belum Diregister	115.111.071,00
135121	Aset Tetap Lainnya	2.434.144,00
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(36.495.423,00)
212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	-
521111	Keperluan Sehari-hari Perkantoran	16.568.475,00
593113	Keperluan Sehari-hari Perkantoran	(1.464.000,00)
593131	Beban Persediaan bahan baku	(2.294.000,00)
	JUMLAH	(5.426.787.442,00)

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0,00

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp (4.529.615.787,00).

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp93.691.987.143,00

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp93.691.987.143,00 dan Rp(38.145.851.772,00). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai, antara lain transaksi amortisasi pertama kali untuk aset tak berwujud dan transaksi normalisasi aset.

Koreksi Lain-lain
Rp46.070.041.694,00

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp46.070.041.694,00 dan Rp 22.471.644.386,00 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara. antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar Entitas
Rp50.923.828.500.359,00

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp50.923.828.500.359,00 dan Rp51.856.133.367.179,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL. antar KL. antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 69

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Akun	Uraian	2016
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	52.063.145.538.107,00
313121	Diterima dari Entitas Lain	(1.285.006.009.646,00)
313211	Transfer Keluar	(303.891.982.188,00)
313221	Transfer Masuk	330.224.839.997,00
391131	Pengesahan Hibah Langsung	120.350.932.428,00
391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(994.818.339,00)
JUMLAH		50.923.828.500.359,00

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain
Rp(1.285.006.009.646,00)
dan Rp52.063.145.538.107

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2016. DDEL sebesar (Rp1.285.006.009.646,00) sedangkan DKEL sebesar

Rp52.063.145.538.107,00.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

*Transfer Masuk/Transfer
Keluar
Rp330.224.839.997,00/
Rp303.891.982.188,00*

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp330.224.839.997,00, sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp303.891.982.188,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp26.332.857.809,00. Selisih ini terjadi antara lain karena adanya transfer masuk aset dari Kementerian Keuangan sebesar Rp30.646.742.458,00.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

*Pengesahan Hibah
Langsung dan
Pengembalian Pengesahan
Hibah Langsung
Rp120.350.932.428,00 dan
Rp(994.818.339,00)*

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang, dan jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp120.350.932.428,00.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah (Rp994.818.339,00).

Pengesahan hibah langsung di atas belum mencakup hibah yang terlambat disahkan dan masih tercatat sebagai Hibah yang Belum Disahkan dalam Neraca sebesar Rp7.955.774.000,00 dan penerimaan hibah uang dan barang pada Satuan Kerja yang belum mengajukan pengesahannya ke Kementerian Keuangan sebesar Rp114.317.826.310,00.

Ekuitas Akhir

Rp37.252.896.560.065,00

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp37.252.896.560.065,00 dan Rp37.752.024.774.205,00.



PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

Selisih Neraca
SAIBA dengan
SIMAK BMN

F.1. Selisih Neraca SAIBA dengan SIMAK BMN

Neraca SAIBA dan SIMAK BMN masih terdapat selisih sebesar Rp49.908.211.270,00,00 dengan rincian per akun sebagai berikut:

Tabel 70

Selisih Neraca SAIBA dengan SIMAK BMN

No	Uraian Neraca	Neraca SIMAK BMN	Neraca SAIBA	Selisih	Selisih Absolut
1	Persediaan	79.687.431.643,00	78.744.696.996,00	(942.734.647,00)	942.734.647,00
2	Tanah	15.894.201.937.828,00	15.955.539.942.828,00	61.338.005.000,00	61.338.005.000,00
3	Peralatan dan Mesin	6.981.762.337.750,00	6.983.094.309.136,00	1.331.971.386,00	1.331.971.386,00
4	Gedung dan Bangunan	22.303.795.708.444,00	22.338.064.880.732,00	34.269.172.288,00	34.269.172.288,00
5	Jalan, Irigasi, Jaringan	556.656.173.901,00	559.435.282.524,00	2.779.108.623,00	2.779.108.623,00
6	Aset Tetap Lainnya	1.192.616.683.662,00	1.202.925.712.827,00	10.309.029.165,00	10.309.029.165,00
7	KDP	1.394.619.351.839,00	1.356.906.741.380,00	(37.712.610.459,00)	37.712.610.459,00
8	Aset Tak Berwujud	129.708.126.061,00	129.780.496.061,00	72.370.000,00	72.370.000,00
9	Aset Lain-lain	198.029.346.650,00	199.236.424.838,00	1.207.078.188,00	1.207.078.188,00
10	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.129.245.183.522,00)	(5.128.699.341.162,00)	545.842.360,00	545.842.360,00
11	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3.519.650.193.700,00)	(3.553.692.026.253,00)	(34.041.832.553,00)	34.041.832.553,00
12	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(214.265.921.521,00)	(214.740.465.816,00)	(474.544.295,00)	474.544.295,00
13	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(61.062.768.774,00)	(60.985.159.765,00)	77.609.009,00	77.609.009,00
14	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(223.507.556.460,00)	(225.167.297.766,00)	(1.659.741.306,00)	1.659.741.306,00
	Total	39.583.345.473.801,00	39.620.444.196.560,00	37.098.722.759,00	186.761.649.279,00

Selisih absolut antara Neraca SAIBA dengan Neraca SIMAK BMN sebesar Rp186.761.649.279,00. Di antara selisih tersebut sebesar Rp136.853.438.009,00 merupakan jurnal koreksi yang dilakukan oleh Satker Konsolidasi pada aplikasi SAIBA namun belum dikoreksi pada aplikasi SIMAK BMN, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pencatatan hibah tanah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari sebesar Rp61.338.005.000,00; dan
2. Reklasifikasi dari KDP ke aset Gedung dan Bangunan serta Peralatan dan Mesin dengan nilai transaksi masing-masing sebesar Rp37.761.611.959, Rp35.220.111.953,00, dan Rp2.533.709.097,00.

Dengan demikian masing terdapat perbedaan absolut antara Neraca SAIBA dan SIMAK BMN sebesar Rp49.908.211.270,00.

*Bank Garansi
PIHK dan PPIU*

F.2. Bank Garansi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU)

Berdasarkan PMA Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan PMA Nomor 18 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) atas nama Menteri Agama memberikan ijin kepada biro perjalanan sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) atau *Provider* Visa. Salah satu syarat untuk memperoleh ijin tersebut adalah biro perjalanan wajib menyampaikan jaminan berupa Bank Garansi (BG) atas nama biro perjalanan wisata yang diterbitkan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH untuk PIHK dan Jaminan Bank yang diterbitkan oleh Bank Syariah dan/atau Bank Umum Nasional untuk PPIU dan *Provider* Visa.

Berdasarkan Keputusan Dirjen PHU Nomor D/177/2016 tentang Penetapan Bank Garansi sebagai Persyaratan Perizinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Khusus ditetapkan bahwa nilai BG untuk PIHK adalah sebesar Rp500.000.000,00 dengan masa berlaku selama empat tahun. Sedangkan nilai BG untuk PPIU adalah sebesar Rp100.000.000,00 dan Rp200.000.000,00. Nilai BG untuk PPIU sebesar Rp100.000.000,00 didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/348 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/377/Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, sedangkan perubahan nilai BG untuk PPIU menjadi Rp200.000.000,00 didasarkan pada Keputusan Dirjen PHU Nomor

D/169/2016 tentang Penetapan Besaran Jaminan Bank sebagai Persyaratan Perizinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah. Selanjutnya nilai BG untuk Provider VISA adalah sebesar Rp750.000.000,00 sesuai Surat Dirjen PHU Nomor B-18.5527/Dj.II.I/4/Hj.09/8/2016 tentang Ketentuan Legalisasi sebagai Provider VISA sebesar Rp750.000.000,00. Jika PIHK dan PPIU melakukan tindakan wanprestasi maka bank garansi tersebut akan dicairkan oleh Dirjen PHU.

Pengadministrasian dan penyimpanan Bank Garansi PIHK dilakukan oleh Sub Direktorat Penyelenggara Haji Khusus, sedangkan untuk Bank Garansi PPIU dan Provider Visa dilakukan oleh Sub Direktorat Pembinaan Umroh.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 nilai Bank Garansi pada Ditjen PHU Kementerian Agama adalah sebesar Rp313.100.000.000,00 terdiri atas :

- a. Sebanyak 256 PIHK dengan nilai bank garansi sebesar Rp128.000.000.000,00;
- b. Sebanyak 750 PPIU dengan nilai bank garansi sebesar Rp104.100.000.000,00; dan
- c. Sebanyak 108 Provider VISA dengan nilai bank garansi sebesar Rp81.000.000.000,00.



LAMPIRAN LRA

Lampiran 1: Anggaran

Kementerian Agama
Rincian Anggaran Berdasarkan Eselon I
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016

NO	ESELON	2016	
		ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
1	Sekretariat Jenderal	2.635.867.528.000,00	2.321.656.279.000,00
2	Inspektorat Jenderal	140.097.161.000,00	139.810.164.000,00
3	Ditjen Bimas Islam	5.016.056.572.000,00	5.200.480.519.000,00
4	Ditjen Pendis	44.195.771.941.000,00	44.240.451.758.000,00
5	Ditjen Bimas Kristen	1.413.063.771.000,00	1.499.158.317.000,00
6	Ditjen Bimas Katolik	819.531.222.000,00	817.918.504.000,00
7	Ditjen Bimas Hindu	627.695.159.000,00	634.664.130.000,00
8	Ditjen Bimas Buddha	299.991.361.000,00	286.572.845.000,00
9	Ditjen PHU	1.069.552.804.000,00	1.100.716.913.000,00
10	Badan Litbang dan Diklat	611.414.792.000,00	574.045.616.000,00
JUMLAH		56.829.042.311.000,00	56.815.475.045.000,00

Lampiran 2: Realisasi Belanja

Kementerian Agama
Rincian Realisasi Belanja Berdasarkan Eselon I
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016

NO	ESELON	REALISASI BELANJA 2016		
		REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO
1	Sekretariat Jenderal	2.063.936.198.456,00	8.992.562.910,00	2.054.943.635.546,00
2	Inspektorat Jenderal	134.324.088.486,00	3.517.808.481,00	130.806.280.005,00
3	Ditjen Bimas Islam	4.511.651.454.998,00	13.538.580.858,00	4.498.112.874.140,00
4	Ditjen Pendis	42.015.015.460.037,00	43.476.772.428,00	41.971.538.687.609,00
5	Ditjen Bimas Kristen	1.428.254.574.922,00	2.137.310.837,00	1.426.117.264.085,00
6	Ditjen Bimas Katolik	738.495.704.285,00	689.090.708,00	737.806.613.577,00
7	Ditjen Bimas Hindu	595.338.560.043,00	3.439.145.693,00	591.899.414.350,00
8	Ditjen Bimas Buddha	253.572.810.834,00	5.011.874.972,00	248.560.935.862,00
9	Ditjen PHU	959.690.355.137,00	3.386.210.990,00	956.304.144.147,00
10	Badan Litbang dan Diklat	498.376.068.577,00	6.010.009.411,00	492.366.059.166,00
Total Belanja		53.198.655.275.775,00	90.199.367.288,00	53.108.455.908.487,00



LAMPIRAN NERACA

Lampiran 1: Kas di Bendahara Pengeluaran

Kementerian Agama

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015

NO	ESELON I	TAHUN 2016	TAHUN 2015
1	Sekretariat Jenderal	Rp 124.591.850,00	Rp 1.826.292.244,00
2	Inspektorat Jenderal	Rp -	Rp -
3	Ditjen Bimas Islam	Rp 422.201.402,00	Rp 2.120.848.350,00
4	Ditjen Pendidikan Islam	Rp 1.732.146.423,00	Rp 7.178.535.620,00
5	Ditjen Bimas Kristen	Rp 66.840.300,00	Rp 510.649.732,00
6	Ditjen Bimas Katolik	Rp 4.822.950,00	Rp 78.752.880,00
7	Ditjen Bimas Hindu	Rp 113.117.489,00	Rp 170.419.350,00
8	Ditjen Bimas Buddha	Rp 5.805.000,00	Rp 102.420.686,00
9	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Rp 206.167.997,00	Rp 85.686.900,00
10	Badan Litbang dan Diklat	Rp -	Rp 393.108.607,00
JUMLAH		Rp 2.675.693.411,00	Rp 12.466.714.369,00

Lampiran 2: Kas di Bendahara Penerimaan

Kementerian Agama

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015

NO	ESELON I	TAHUN 2016	TAHUN 2015
1	Sekretariat Jenderal	Rp -	Rp -
2	Inspektorat Jenderal	Rp -	Rp -
3	Ditjen Bimas Islam	Rp 4.326.667.368,00	Rp 3.006.784.880,00
4	Ditjen Pendidikan Islam	Rp 213.632.044,00	Rp 1.420.846.798,00
5	Ditjen Bimas Kristen	Rp -	Rp 262.000.000,00
6	Ditjen Bimas Katolik	Rp -	Rp -
7	Ditjen Bimas Hindu	Rp -	Rp -
8	Ditjen Bimas Buddha	Rp -	Rp -
9	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Rp 10.641.874.036,00	Rp -
10	Badan Litbang dan Diklat	Rp -	Rp -
JUMLAH		Rp 15.182.173.448,00	Rp 4.689.631.678,00

Lampiran 3: Kas Lainnya dan Setara Kas

Kementerian Agama

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015

NO	ESELON I	TAHUN 2016	TAHUN 2015
1	Sekretariat Jenderal	Rp 4.111.521.836,00	Rp 675.984.300,00
2	Inspektorat Jenderal	Rp 15.007.722,00	Rp -
3	Ditjen Bimas Islam	Rp 779.447.120,00	Rp 1.917.485.257,00
4	Ditjen Pendidikan Islam	Rp 27.797.834.955,00	Rp 23.724.943.812,00
5	Ditjen Bimas Kristen	Rp 57.734.969,00	Rp 211.014.359,00
6	Ditjen Bimas Katolik	Rp 25.799.015,00	Rp 150.791.986,00
7	Ditjen Bimas Hindu	Rp 16.265.525,00	Rp 73.954.066,00
8	Ditjen Bimas Buddha	Rp 1.989.867,00	Rp 14.585.725,00
9	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Rp 3.009.538.670,00	Rp 217.340.146,00
10	Badan Litbang dan Diklat	Rp 20.172.810,00	Rp 133.191.728,00
JUMLAH		Rp 35.835.312.489,00	Rp 27.119.291.379,00

Lampiran 4: Belanja Dibayar Dimuka

Kementerian Agama

Rincian Belanja Dibayar Dimuka

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015

NO	ESELON I	TAHUN 2016	TAHUN 2015
1	Sekretariat Jenderal	Rp 8.104.877,00	Rp 2.166.667,00
2	Inspektorat Jenderal	Rp -	Rp -
3	Ditjen Bimas Islam	Rp 28.749.506,00	Rp 28.749.990,00
4	Ditjen Pendidikan Islam	Rp 234.864.907,00	Rp 414.487.000,00
5	Ditjen Bimas Kristen	Rp 2.487.950,00	Rp -
6	Ditjen Bimas Katolik	Rp -	Rp 1.490.370.905,00
7	Ditjen Bimas Hindu	Rp -	Rp -
8	Ditjen Bimas Buddha	Rp -	Rp -
9	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Rp -	Rp -
10	Badan Litbang dan Diklat	Rp -	Rp -
JUMLAH		Rp 274.207.240,00	Rp 1.935.774.562,00

Lampiran 5 : Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Kementerian Agama

Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015

NO	ESELON I	TAHUN 2016	TAHUN 2015
1	Sekretariat Jenderal	Rp 9.794.000,00	Rp 464.000,00
2	Inspektorat Jenderal	Rp 4.745.000,00	Rp -
3	Ditjen Bimas Islam	Rp -	Rp -
4	Ditjen Pendidikan Islam	Rp13.815.493.136,00	Rp11.368.449.052,00
5	Ditjen Bimas Kristen	Rp -	Rp -
6	Ditjen Bimas Katolik	Rp -	Rp -
7	Ditjen Bimas Hindu	Rp -	Rp -
8	Ditjen Bimas Buddha	Rp -	Rp -
9	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Rp -	Rp -
10	Badan Litbang dan Diklat	Rp -	Rp -
JUMLAH		Rp13.830.032.136,00	Rp11.368.913.052,00

Lampiran 6 : Piutang PNBP

Kementerian Agama
Rincian Piutang PNBP

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015

NO	ESELON I	TAHUN 2016	TAHUN 2015
1	Sekretariat Jenderal	Rp 105.642.685,00	Rp 19.363.200,00
2	Inspektorat Jenderal	Rp -	Rp -
3	Ditjen Bimas Islam	Rp -	Rp 7.101.900,00
4	Ditjen Pendidikan Islam	Rp 3.372.194.790,00	Rp 24.652.938,00
5	Ditjen Bimas Kristen	Rp 484.033.833,00	Rp 1.249.177.230,00
6	Ditjen Bimas Katolik	Rp -	Rp -
7	Ditjen Bimas Hindu	Rp 2.764.250.000,00	Rp 2.330.350.000,00
8	Ditjen Bimas Buddha	Rp 433.750.000,00	Rp 428.650.000,00
9	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Rp 13.190.805,00	Rp 23.262.390.805,00
10	Badan Litbang dan Diklat	Rp -	Rp -
JUMLAH		Rp 7.173.062.113,00	Rp 27.321.686.073,00

Lampiran 7: Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Kementerian Agama

Rincian Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015

NO	ESELON I	TAHUN 2016	TAHUN 2015
1	Sekretariat Jenderal	Rp -	Rp -
2	Inspektorat Jenderal	Rp -	Rp -
3	Ditjen Bimas Islam	Rp -	Rp -
4	Ditjen Pendidikan Islam	Rp 15.000.000,00	Rp -
5	Ditjen Bimas Kristen	Rp -	Rp -
6	Ditjen Bimas Katolik	Rp -	Rp -
7	Ditjen Bimas Hindu	Rp -	Rp -
8	Ditjen Bimas Buddha	Rp -	Rp -
9	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Rp -	Rp -
10	Badan Litbang dan Diklat	Rp -	Rp -
JUMLAH		Rp 15.000.000,00	Rp -

Lampiran 8 : Persediaan

Kementerian Agama

Rincian Persediaan

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015

NO	ESELON I	TAHUN 2016	TAHUN 2015
1	Sekretariat Jenderal	Rp 8.595.249.730,00	Rp 8.870.891.228,00
2	Inspektorat Jenderal	Rp 2.230.373.837,00	Rp 4.532.787.200,00
3	Ditjen Bimas Islam	Rp 18.364.687.320,00	Rp 28.210.998.342,00
4	Ditjen Pendidikan Islam	Rp 23.385.665.922,00	Rp 33.824.369.822,00
5	Ditjen Bimas Kristen	Rp 7.186.850.339,00	Rp 4.899.559.022,00
6	Ditjen Bimas Katolik	Rp 555.356.886,00	Rp 4.641.258.450,00
7	Ditjen Bimas Hindu	Rp 482.332.485,00	Rp 624.766.271,00
8	Ditjen Bimas Buddha	Rp 317.069.815,00	Rp 226.755.707,00
9	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Rp 1.754.640.197,00	Rp 1.975.359.121,00
10	Badan Litbang dan Diklat	Rp 5.204.653.049,00	Rp 4.406.938.329,00
11	Konsolidasi Kementerian Agama	Rp 78.899.692,00	Rp -
JUMLAH		Rp 68.155.779.272,00	Rp 92.213.683.492,00

Lampiran 9 : Tanah

Kementerian Agama

Rincian Tanah

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015

NO	ESELON 1	TAHUN 2016	TAHUN 2015
1	SEKRETARIAT JENDERAL	Rp 1.989.874.242.714,00	Rp 1.995.173.139.109,00
2	INSPEKTORAT JENDERAL	Rp 44.640.704.931,00	Rp 44.640.704.931,00
3	DITJEN BIMAS ISLAM	Rp 4.823.783.374.113,00	Rp 4.760.334.085.903,00
4	DITJEN PENDIS	Rp 8.599.602.325.885,00	Rp 8.464.716.358.704,00
5	DITJEN BIMAS KRISTEN	Rp 66.518.042.155,00	Rp 63.446.602.155,00
6	DITJEN BIMAS KATOLIK	Rp -	Rp -
7	DITJEN BIMAS HINDU	Rp 66.108.347.210,00	Rp 66.108.347.210,00
8	DITJEN BIMAS BUDDHA	Rp 2.804.855.700,00	Rp 2.523.386.500,00
9	DITJEN PHU	Rp 162.401.071.485,00	Rp 139.454.265.485,00
10	BADAN LITBANG DAN DIKLAT	Rp 138.468.973.635,00	Rp 138.468.973.635,00
11	KONSOLIDASI KEMENTERIAN AGAMA	Rp 61.338.005.000,00	Rp -
Grand Total		Rp 15.955.539.942.828,00	Rp 15.674.865.863.632,00

Lampiran 10 : Peralatan dan Mesin

Kementerian Agama

Rincian Peralatan dan Mesin

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015

NO	ESELON 1	TAHUN 2016	TAHUN 2015
1	SEKRETARIAT JENDERAL	Rp 1.083.742.272.242,00	Rp 1.086.332.374.432,00
2	INSPEKTORAT JENDERAL	Rp 46.172.854.879,00	Rp 46.378.078.806,00
3	DITJEN BIMAS ISLAM	Rp 447.185.764.602,00	Rp 392.790.015.041,00
4	DITJEN PENDIS	Rp 4.715.020.702.436,00	Rp 4.201.746.846.904,00
5	DITJEN BIMAS KRISTEN	Rp 103.830.872.920,00	Rp 98.042.527.717,00
6	DITJEN BIMAS KATOLIK	Rp 34.073.085.726,00	Rp 32.978.762.142,00
7	DITJEN BIMAS HINDU	Rp 73.291.564.856,00	Rp 70.138.952.387,00
8	DITJEN BIMAS BUDDHA	Rp 48.055.729.003,00	Rp 45.477.053.014,00
9	DITJEN PHU	Rp 243.781.114.543,00	Rp 221.340.646.707,00
10	BADAN LITBANG DAN DIKLAT	Rp 188.061.833.842,00	Rp 182.992.637.812,00
11	KONSOLIDASI KEMENTERIAN AGAMA	Rp (121.485.913,00)	Rp -
Grand Total		Rp 6.983.094.309.136,00	Rp 6.378.217.894.962,00

Lampiran 11 : Gedung dan Bangunan

Kementerian Agama
Rincian Gedung dan Bangunan
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015

NO	ESELON 1	TAHUN 2016	TAHUN 2015
1	SEKRETARIAT JENDERAL	Rp 2.933.562.251.068,00	Rp 2.896.494.214.137,00
2	INSPEKTORAT JENDERAL	Rp 51.879.060.989,00	Rp 51.879.060.989,00
3	DITJEN BIMAS ISLAM	Rp 554.728.336.115,00	Rp 357.848.391.412,00
4	DITJEN PENDIS	Rp 17.593.659.392.362,00	Rp 15.771.623.031.597,00
5	DITJEN BIMAS KRISTEN	Rp 293.680.656.768,00	Rp 232.932.545.297,00
6	DITJEN BIMAS KATOLIK	Rp -	Rp -
7	DITJEN BIMAS HINDU	Rp 131.496.476.987,00	Rp 130.347.858.833,00
8	DITJEN BIMAS BUDDHA	Rp 29.417.878.836,00	Rp 24.243.520.559,00
9	DITJEN PHU	Rp 340.670.065.142,00	Rp 185.136.034.085,00
10	BADAN LITBANG DAN DIKLAT	Rp 376.343.826.867,00	Rp 373.571.991.217,00
11	KONSOLIDASI KEMENTERIAN AGAMA	Rp 32.626.935.598,00	Rp -
Grand Total		Rp 22.338.064.880.732,00	Rp 20.024.076.648.126,00

Lampiran 12 : Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Kementerian Agama
Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015

NO	ESELON 1	TAHUN 2016	TAHUN 2015
1	SEKRETARIAT JENDERAL	Rp 37.864.305.850,00	Rp 36.958.743.950,00
2	INSPEKTORAT JENDERAL	Rp 599.782.858,00	Rp 599.782.858,00
3	DITJEN BIMAS ISLAM	Rp 610.591.738,00	Rp 514.024.738,00
4	DITJEN PENDIS	Rp 451.390.862.508,00	Rp 410.121.895.986,00
5	DITJEN BIMAS KRISTEN	Rp 39.817.182.375,00	Rp 39.630.687.375,00
6	DITJEN BIMAS KATOLIK	Rp -	Rp 43.000.000,00
7	DITJEN BIMAS HINDU	Rp 7.359.363.850,00	Rp 7.359.363.850,00
8	DITJEN BIMAS BUDDHA	Rp 138.440.786,00	Rp 735.746.786,00
9	DITJEN PHU	Rp 7.436.957.930,00	Rp 5.218.625.530,00
10	BADAN LITBANG DAN DIKLAT	Rp 10.922.244.177,00	Rp 10.500.322.827,00
11	KONSOLIDASI KEMENTERIAN AGAMA	Rp 3.295.550.452,00	Rp -
Grand Total		Rp 559.435.282.524,00	Rp 511.682.193.900,00

Lampiran 13 : Aset Tetap Lainnya

Kementerian Agama
Rincian Aset Tetap Lainnya
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015

NO	ESELON 1	TAHUN 2016	TAHUN 2015
1	SEKRETARIAT JENDERAL	Rp 27.665.290.790,00	Rp 28.051.753.959,00
2	INSPEKTORAT JENDERAL	Rp 884.946.374,00	Rp 862.078.441,00
3	DITJEN BIMAS ISLAM	Rp 20.913.145.818,00	Rp 21.344.110.662,00
4	DITJEN PENDIS	Rp 1.049.100.797.565,00	Rp 983.528.675.531,00
5	DITJEN BIMAS KRISTEN	Rp 14.972.472.326,00	Rp 12.663.846.468,00
6	DITJEN BIMAS KATOLIK	Rp 189.482.320,00	Rp 147.647.320,00
7	DITJEN BIMAS HINDU	Rp 10.574.081.269,00	Rp 10.260.384.531,00
8	DITJEN BIMAS BUDDHA	Rp 9.748.136.076,00	Rp 9.427.218.876,00
9	DITJEN PHU	Rp 47.066.552.725,00	Rp 55.381.194.485,00
10	BADAN LITBANG DAN DIKLAT	Rp 21.835.231.532,00	Rp 7.981.693.022,00
11	KONSOLIDASI KEMENTERIAN AGAMA	Rp (24.423.968,00)	Rp -
Grand Total		Rp 1.202.925.712.827,00	Rp 1.129.648.603.295,00

Lampiran 14 : Konstruksi Dalam Pengerjaan

Kementerian Agama
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015

NO	ESELON 1	TAHUN 2016	TAHUN 2015
1	SEKRETARIAT JENDERAL	Rp 38.649.174.400,00	Rp 55.987.294.540,00
2	INSPEKTORAT JENDERAL	Rp -	Rp -
3	DITJEN BIMAS ISLAM	Rp 30.369.029.966,00	Rp 32.423.681.107,00
4	DITJEN PENDIS	Rp 873.969.017.042,00	Rp 1.421.366.836.878,00
5	DITJEN BIMAS KRISTEN	Rp 48.054.988.867,00	Rp 82.795.465.588,00
6	DITJEN BIMAS KATOLIK	Rp -	Rp -
7	DITJEN BIMAS HINDU	Rp 4.574.904.800,00	Rp 1.466.282.300,00
8	DITJEN BIMAS BUDDHA	Rp -	Rp 1.908.025.000,00
9	DITJEN PHU	Rp 392.073.841.064,00	Rp 180.685.706.785,00
10	BADAN LITBANG DAN DIKLAT	Rp 5.110.497.200,00	Rp 5.110.497.200,00
11	KONSOLIDASI KEMENTERIAN AGAMA	Rp (35.894.711.959,00)	Rp -
Grand Total		Rp 1.356.906.741.380,00	Rp 1.781.743.789.398,00

Lampiran 15 : Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Kementerian Agama
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016

NO	ESELON 1	TAHUN 2016
1	SEKRETARIAT JENDERAL	Rp (1.462.022.244.124,00)
2	INSPEKTORAT JENDERAL	Rp (45.297.521.852,00)
3	DITJEN BIMAS ISLAM	Rp (306.094.798.870,00)
4	DITJEN PENDIS	Rp (6.470.360.317.611,00)
5	DITJEN BIMAS KRISTEN	Rp (126.212.294.047,00)
6	DITJEN BIMAS KATOLIK	Rp (21.838.101.749,00)
7	DITJEN BIMAS HINDU	Rp (76.809.966.111,00)
8	DITJEN BIMAS BUDDHA	Rp (30.547.034.461,00)
9	DITJEN PHU	Rp (176.819.403.324,00)
10	BADAN LITBANG DAN DIKLAT	Rp (237.158.694.758,00)
11	KONSOLIDASI KEMENTERIAN AGAMA	Rp (4.956.616.089,00)
Grand Total		Rp (8.958.116.992.996,00)

Lampiran 16 : Aset Tak Berwujud

Kementerian Agama
Rincian Aset Tak Berwujud
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015

NO	ESELON 1	TAHUN 2016	TAHUN 2015
1	SEKRETARIAT JENDERAL	Rp 17.582.403.619,00	Rp 17.028.853.569,00
2	INSPEKTORAT JENDERAL	Rp 1.507.144.200,00	Rp 1.281.994.200,00
3	DITJEN BIMAS ISLAM	Rp 3.984.224.065,00	Rp 3.665.622.648,00
4	DITJEN PENDIS	Rp 63.876.598.323,00	Rp 57.626.625.078,00
5	DITJEN BIMAS KRISTEN	Rp 1.382.419.000,00	Rp 1.210.933.600,00
6	DITJEN BIMAS KATOLIK	Rp -	Rp -
7	DITJEN BIMAS HINDU	Rp 573.237.779,00	Rp 440.986.294,00
8	DITJEN BIMAS BUDDHA	Rp 1.047.325.300,00	Rp 1.062.216.300,00
9	DITJEN PHU	Rp 36.806.454.275,00	Rp 36.701.589.387,00
10	BADAN LITBANG DAN DIKLAT	Rp 2.948.089.500,00	Rp 2.769.916.000,00
11	KONSOLIDASI KEMENTERIAN AGAMA	Rp 72.600.000,00	Rp -
Grand Total		Rp 129.780.496.061,00	Rp 121.788.737.076,00

Lampiran 17 : Aset Lain-Lain

Kementerian Agama
Rincian Aset Lain-Lain

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015

NO	ESELON 1	TAHUN 2016	TAHUN 2015
1	SEKRETARIAT JENDERAL	Rp 55.563.330.708,00	Rp 45.462.501.656,00
2	INSPEKTORAT JENDERAL	Rp 2.202.494.033,00	Rp 162.590.350,00
3	DITJEN BIMAS ISLAM	Rp 1.410.620.334,00	Rp 980.631.030,00
4	DITJEN PENDIS	Rp 128.767.354.944,00	Rp 103.487.295.382,00
5	DITJEN BIMAS KRISTEN	Rp 1.898.545.456,00	Rp 1.941.760.706,00
6	DITJEN BIMAS KATOLIK	Rp 147.104.900,00	Rp 211.166.900,00
7	DITJEN BIMAS HINDU	Rp 1.544.615.392,00	Rp 1.788.222.210,00
8	DITJEN BIMAS BUDDHA	Rp 32.332.500,00	Rp 89.221.900,00
9	DITJEN PHU	Rp 4.771.745.091,00	Rp 557.469.263,00
10	BADAN LITBANG DAN DIKLAT	Rp 9.797.614.867,00	Rp 9.839.842.958,00
11	KONSOLIDASI KEMENTERIAN AGAMA	Rp (6.899.333.387,00)	Rp -
Grand Total		Rp 199.236.424.838,00	Rp 164.520.702.355,00

Lampiran 18 : Hutang TPG PNS dan Non PNS TA 2013 s.d. 2015
(Verifikasi BPKP)

Rincian Hutang TPG PNS dan Non PNS TA 2013 s.d. 2015
Yang belum dibayar per 31 Desember 2016 (Hasil Verifikasi BPKP)

No	Provinsi	2013		2014		2015		Jumlah	
		Guru	Nilai (Rp)	Guru	Nilai (Rp)	Guru	Nilai (Rp)	Guru	Nilai (Rp)
1	Aceh	12	89.619.000	-	-	1.249	32.332.969.480	1.261	32.422.588.480
2	Sumatera Utara	1	7.723.200	59	496.195.051	1.461	27.000.432.729	1.521	27.504.350.980
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Jambi	34	400.509.834	47	841.335.297	673	15.793.164.476	754	17.035.009.607
6	Bengkulu	4	31.061.620	9	86.808.042	172	3.141.966.610	185	3.141.966.610
7	Sumatera Selatan	-	-	2	17.710.400	283	1.718.331.393	285	1.736.041.793
8	Lampung	14	100.145.024	306	4.481.752.806	130	8.217.856.780	450	8.217.856.780
9	DKI Jakarta	-	-	-	-	4.732	57.993.483.854	4.732	57.993.483.854
10	Jawa Barat	13	264.382.157	14.574	86.464.073.388	34.712	201.578.242.056	49.299	288.306.697.601
11	Jawatengah	240	4.343.873.884	682	3.612.501.486	28.380	272.048.097.420	29.302	280.004.472.790
12	DI Jogjakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Timur	289	1.770.873.510	4.892	94.082.821.700	16.243	90.537.476.413	21.424	186.391.171.623
14	Kalimantan Barat	0	0	0	0	233	4.649.288.600	233	4.649.288.600
15	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Kalimantan Timur	16	320.916.800	69	1.051.953.300	455	4.132.694.700	540	5.505.564.800
18	Sulawesi Utara							-	-
19	Sulawesi Tengah					225	4.076.716.000	225	4.076.716.000
20	Sulawesi Tenggara							-	-
21	Sulawesi Selatan	12	218.805.600	3	21.000.000	2.358	20.563.142.600	2.373	20.802.948.200
22	Bali	0	0	0	0	152	284.280.000	152	284.280.000
23	Nusa Tenggara Barat							-	-
24	Nusa Tenggara Timur							-	-
25	Maluku							-	-
26	Papua							-	-
27	Papua Barat					83	416.583.290	83	416.583.290
28	Kepulauan Riau							-	-
29	Bangka Belitung							-	-
30	Banten	1	54.000.000	2	36.000.000	516	7.389.729.500	519	7.479.729.500
31	Gorontalo							-	-
32	Sulawesi Barat							-	-
33	Maluku Utara							-	-
34	Kalimantan Utara							-	-
	Jumlah	636	7.601.910.629	20.645	191.192.151.470	92.057	751.874.455.901	113.338	945.968.750.509

Lampiran 19 : Hutang TPG Non PNS Inpassing Tahun 2016
(Verifikasi Itjen Kemenag)

Rincian Hutang TPG Non PNS Inpassing Tahun 2016
Yang belum dibayar per 31 Desember 2016 (Hasil Verifikasi Itjen Kemenag)

NO	PROVINSI	HASIL VERIFIKASI	
		JUMLAH GURU	JUMLAH TUNJANGAN TERHUTANG (Rp)
1	ACEH	664	11.617.039.900
2	SUMATERA UTARA	3596	83.026.785.715
3	SUMATERA BARAT	1024	36.581.601.800
4	SUMATERA SELATAN	828	13.689.569.400
5	BENGGULU	259	3.786.953.130
6	KEPRI	153	2.040.693.600
7	RIAU	863	12.304.287.690
8	JAMBI	1033	21.391.243.600
9	BANGKA BELITUNG	55	1.112.953.600
10	LAMPUNG	1897	38.970.547.200
11	BANTEN	2299	37.458.011.900
12	DKI JAKARTA	2232	31.948.854.600
13	JAWA BARAT	11998	190.429.547.300
14	JAWA TENGAH	11964	20.994.694.700
15	DI YOGYAKARTA	686	12.582.906.200
16	JAWA TIMUR	15398	285.973.062.700
17	BALI	257	4.831.174.800
18	KALIMANTAN SELATAN	1478	26.793.240.000
19	KALIMANTAN BARAT	398	6.000.257.860
20	KALIMANTAN TENGAH	70	1.313.658.900
21	KALIMANTAN TIMUR	452	8.145.888.200
22	SULAWESI BARAT	227	3.979.992.400
23	SULAWESI SELATAN	3207	54.908.110.300
24	SULAWESI TENGGARA	343	5.797.776.300
25	SULAWESI UTARA	148	2.575.726.600
26	GORONTALO	110	2.051.480.600
27	SULAWESI TENGAH	233	3.963.754.000
28	MALUKU DAN MALUKU UTARA	88	1.210.46100
29	NTB	3151	49.922.636.400
30	NTT	194	3.047.036.100
31	PAPUA DAN PAPUA BARAT	49	663.676.800
JUMLAH		65354	1.179.113.630.395

Lampiran 20 : Hutang TPG PNS TA 2015 dan 2016 (Verifikasi Itjen Kemenag)

Rincian Hutang TPG PNS TA 2015 dan 2016
Yang belum dibayar per 31 Desember 2016 (Hasil Verifikasi Itjen Kemenag)

No	Provinsi	Hasil Verifikasi				Jumlah	
		2015		2015		Jumlah guru	Jumlah Tunjangan Terhutang (Rp)
		Jumlah guru	Jumlah Tunjangan	Jumlah guru	Jumlah Tunjangan		
	Jatim	10.881	160.960.581.212	15.588	201.272.022.180	26.469	362.232.593.950
	Jabar	5.903	79.996.724.028	7.835	90.598.502.521	13.738	170.595.226.527
	Jateng	279	4.880.454.930	1.505	28.578.332.002	1.784	33.458.787.108
	Sulsel	34	386.773.664	161	1.941.529.888	195	2.328.303.600
	Jumlah	17.097	246.224.533.834	25.089	322.390.386.591	42.186	568.614.911.185

Lampiran 21 : Utang pada Pihak Ketiga

Kementerian Agama
Rincian Utang pada Pihak Ketiga
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015

NO	ESELON I	TAHUN 2016	TAHUN 2015
1	Sekretariat Jenderal	Rp 7.314.881.912,00	Rp 3.992.805.885,00
2	Inspektorat Jenderal	Rp 476.915.259,00	Rp 710.311.540,00
3	Ditjen Bimas Islam	Rp 29.941.322.625,00	Rp 22.472.968.702,00
4	Ditjen Pendidikan Islam	Rp 2.211.406.551.114,00	Rp 741.874.476.699,00
5	Ditjen Bimas Kristen	Rp 4.410.247.869,00	Rp 7.969.751.322,00
6	Ditjen Bimas Katolik	Rp 1.210.130.971,00	Rp 7.408.260.430,00
7	Ditjen Bimas Hindu	Rp 8.364.131.257,00	Rp 519.867.808,00
8	Ditjen Bimas Buddha	Rp 1.117.497.646,00	Rp 10.150.903.207,00
9	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Rp 2.244.070.427,00	Rp 1.486.718.932,00
10	Badan Litbang dan Diklat	Rp 634.047.457,00	Rp 1.022.068.572,00
11	BPIH	Rp (96.764.701.844,00)	Rp 1.505.597.044.704,00
12	Konsolidasi Kementerian Agama	Rp 2.467.327.156.004,00	Rp -
JUMLAH		Rp 4.637.682.250.697,00	Rp 2.303.205.177.801,00

Lampiran 22 : Hibah Yang Belum Disahkan

Kementerian Agama

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015

NO	ESELON I	TAHUN 2016	TAHUN 2015
1	Sekretariat Jenderal	Rp 617.017.000,00	Rp 258.196.000,00
2	Inspektorat Jenderal	Rp -	Rp -
3	Ditjen Bimas Islam	Rp 51.712.000,00	Rp -
4	Ditjen Pendidikan Islam	Rp7.202.295.000,00	Rp 10.263.115.000,00
5	Ditjen Bimas Kristen	Rp -	Rp -
6	Ditjen Bimas Katolik	Rp -	Rp -
7	Ditjen Bimas Hindu	Rp -	Rp -
8	Ditjen Bimas Buddha	Rp -	Rp -
9	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Rp 84.750.000,00	Rp 24.821.544.000,00
10	Badan Litbang dan Diklat	Rp -	Rp -
JUMLAH		Rp7.955.774.000,00	Rp 35.342.855.000,00

Lampiran 23 : Pendapatan Diterima Dimuka

Kementerian Agama

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015

NO	ESELON I	TAHUN 2016	TAHUN 2015
1	Sekretariat Jenderal	Rp 261.277.583,00	Rp 191.986.072,00
2	Inspektorat Jenderal	Rp -	Rp -
3	Ditjen Bimas Islam	Rp -	Rp -
4	Ditjen Pendidikan Islam	Rp 22.667.178.321,00	Rp 19.458.719.105,00
5	Ditjen Bimas Kristen	Rp 21.333.333,00	Rp -
6	Ditjen Bimas Katolik	Rp -	Rp -
7	Ditjen Bimas Hindu	Rp -	Rp -
8	Ditjen Bimas Buddha	Rp -	Rp -
9	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Rp -	Rp -
10	Badan Litbang dan Diklat	Rp -	Rp -
11	Konsolidasi Kementerian Agama	Rp 566.011.203,00	Rp -
JUMLAH		Rp 23.515.800.440,00	Rp 19.650.705.177,00

Lampiran 24 : Utang Jangka Pendek Lainnya

Kementerian Agama
Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015

NO	ESELON I	TAHUN 2016	TAHUN 2015
1	Sekretariat Jenderal	Rp 3.496.209,00	Rp 1.615.888,00
2	Inspektorat Jenderal	Rp -	Rp -
3	Ditjen Bimas Islam	Rp 53.100,00	Rp 2.185.738,00
4	Ditjen Pendidikan Islam	Rp 1.150.029.239,00	Rp 162.049.082,00
5	Ditjen Bimas Kristen	Rp -	Rp 114.150,00
6	Ditjen Bimas Katolik	Rp -	Rp -
7	Ditjen Bimas Hindu	Rp -	Rp -
8	Ditjen Bimas Buddha	Rp -	Rp -
9	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Rp 185.185.200,00	Rp -
10	Badan Litbang dan Diklat	Rp 594.190,00	Rp -
11	Konsolidasi Kementerian Agama	Rp 594.190,00	Rp -
JUMLAH		Rp 1.339.952.128,00	Rp 165.964.858,00



LAMPIRAN APLIKASI E-REKON

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

Kode Lap : LRA.F.W.1
Tanggal : 29/04/17 12:19 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_kl

NO	URAIAN	2016				2015			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	2,244,893,434,499	2,355,473,077,982	(110,579,643,483)	105	2,096,453,793,700	2,019,877,460,038	76,576,333,662	96
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	2,244,893,434,499	2,355,473,077,982	(110,579,643,483)	105	2,096,453,793,700	2,019,877,460,038	76,576,333,662	96
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	36,158,094,537,000	34,541,164,145,141	1,616,930,391,859	96	35,614,305,475,000	32,270,917,657,206	3,343,387,817,794	91
	BELANJA BARANG	16,293,063,059,000	14,601,876,037,416	1,691,187,021,584	90	18,318,211,670,000	15,930,199,356,610	2,388,012,313,390	87
	BELANJA MODAL	3,085,627,064,000	2,775,928,613,052	309,698,450,948	90	4,726,926,926,000	4,035,683,467,597	691,243,458,403	85
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	1,278,690,385,000	1,189,487,112,878	89,203,272,122	93	2,047,918,659,000	1,589,768,441,287	458,150,217,713	78
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	56,815,475,045,000	53,108,455,908,487	3,707,019,136,513	93	60,707,362,730,000	53,826,568,922,700	6,880,793,807,300	89
C	PEMBIAYAAN				0				0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 29/04/17 12:32

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl_v3

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4231	Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan					
423119	Pendapatan Penjualan Lainnya	0	5,387,000	0	5,387,000	0
423121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	275,862,401	0	275,862,401	0
423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	398,860,410	0	398,860,410	0
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	3,095,938,391	1,500,000	3,094,438,391	0
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	14,772,839,861	0	14,772,839,861	0
423142	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	7,500,000	441,126,041	0	441,126,041	5881.68
423149	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	9,596,000	0	9,596,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4231	7,500,000	18,999,610,104	1,500,000	18,998,110,104	5,881.68
4232	Pendapatan Jasa					
423217	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	923,532,158,595	737,583,398,340	26,200,000	737,557,198,340	79.86
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	236,121,260	0	236,121,260	0
423291	Pendapatan Jasa Lainnya	15,900,000	7,570,000	0	7,570,000	47.61
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4232	923,548,058,595	737,827,089,600	26,200,000	737,800,889,600	63.74
4233	Pendapatan Bunga					
423319	Pendapatan Bunga Lainnya	0	341,393	0	341,393	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 29/04/17 12:32

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl_v3

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4233	0	341,393	0	341,393	0
4234	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana					
423411	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	35,928,500	0	35,928,500	0
423414	Pendapatan Hasil Denda dan sebagainya	0	910,350	0	910,350	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4234	0	36,838,850	0	36,838,850	0
4235	Pendapatan Pendidikan					
423511	Pendapatan Uang Pendidikan	366,668,049,844	430,743,179,666	72,650,000,000	358,093,179,666	97.66
423512	Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir	7,186,945,000	12,698,198,599	0	12,698,198,599	176.68
423513	Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek	13,409,567,000	4,853,448,100	0	4,853,448,100	36.19
423519	Pendapatan Pendidikan Lainnya	37,514,670,500	28,817,344,961	0	28,817,344,961	76.82
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4235	424,779,232,344	477,112,171,326	72,650,000,000	404,462,171,326	96.84
4236	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi					
423615	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	0	70,480,000	0	70,480,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4236	0	70,480,000	0	70,480,000	0
4237	Pendapatan luran dan Denda					
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	0	3,919,402,438	0	3,919,402,438	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4237	0	3,919,402,438	0	3,919,402,438	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 29/04/17 12:32

Halaman : 3

Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl_v3

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
4239	Pendapatan Lain-lain					
423921	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	0	2,840,835,114	6,042,784	2,834,792,330	0
423922	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	0	31,338,100	0	31,338,100	0
423931	Pendapatan dari Penutupan Rekening	0	2,549,424	0	2,549,424	0
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	28,072,334,067	0	28,072,334,067	0
423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	51,090,087,089	0	51,090,087,089	0
423953	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	27,066,363,312	0	27,066,363,312	0
423955	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,929,600	0	2,929,600	0
423957	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang	0	7,831,202,901	0	7,831,202,901	0
423958	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,276,371,235	0	2,276,371,235	0
423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	23,471,042	0	23,471,042	0
423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	499,242,085	12,905,250	486,336,835	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4239	0	119,736,723,969	18,948,034	119,717,775,935	0
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum					
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	856,080,688,084	964,107,703,968	0	964,107,703,968	112.62
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	19,227,436,000	36,492,635,841	0	36,492,635,841	189.79
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4241	875,308,124,084	1,000,600,339,809	0	1,000,600,339,809	151.2

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 29/04/17 12:32

Halaman : 4

Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl_v3

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
4242	Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum					
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda	0	23,023,382,700	0	23,023,382,700	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4242	0	23,023,382,700	0	23,023,382,700	0
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU					
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	0	3,524,801,184	0	3,524,801,184	0
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	14,474,864,000	18,657,460,854	0	18,657,460,854	128.9
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	0	365,000,000	0	365,000,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4243	14,474,864,000	22,547,262,038	0	22,547,262,038	128.9
4249	Pendapatan BLU Lainnya					
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	6,775,655,476	24,296,083,789	0	24,296,083,789	358.58
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4249	6,775,655,476	24,296,083,789	0	24,296,083,789	358.58
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	2,244,893,434,499	2,428,169,726,016	72,696,648,034	2,355,473,077,982	653.31
	JUMLAH PENDAPATAN	2,244,893,434,499	2,428,169,726,016	72,696,648,034	2,355,473,077,982	653.31

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 29/04/17 3:24 PM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_akun

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	2,410,295,078,000	2,204,923,386,600	1,794,862,094,961	42,185,471,862	1,752,676,623,099	81.4	452,246,763,501
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	32,950,964,000	27,837,401,000	23,172,382,770	345,309,394	22,827,073,376	83.24	5,010,327,624
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	111,649,124,000	110,688,330,000	106,219,209,252	1,711,995,808	104,507,213,444	95.96	6,181,116,556
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	144,600,088,000	138,525,731,000	129,391,592,022	2,057,305,202	127,334,286,820	93.41	11,191,444,180
5251	Belanja Barang BLU							
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	226,223,098,000	313,716,684,000	250,847,596,074	0	250,847,596,074	79.96	62,869,087,926
525112	Belanja Barang	109,402,947,000	159,662,857,000	143,099,705,354	0	143,099,705,354	89.63	16,563,151,646
525113	Belanja Jasa	18,234,293,000	43,115,436,000	38,300,242,002	0	38,300,242,002	88.83	4,815,193,998
525114	Belanja Pemeliharaan	15,714,808,000	28,217,398,000	22,266,702,525	0	22,266,702,525	78.91	5,950,695,475
525115	Belanja Perjalanan	57,467,876,000	69,943,283,000	52,685,822,611	0	52,685,822,611	75.33	17,257,460,389
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	286,823,617,000	299,291,405,000	248,538,847,808	0	248,538,847,808	83.04	50,752,557,192
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	713,866,639,000	913,947,063,000	755,738,916,374	0	755,738,916,374	82.69	158,208,146,626
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda							
526111	Belanja Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	1,306,475,000	2,072,051,000	561,901,000	0	561,901,000	27.12	1,510,150,000
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada	23,498,171,000	12,607,210,000	10,874,677,114	0	10,874,677,114	86.26	1,732,532,886
526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	210,919,427,000	142,647,831,000	134,384,731,870	0	134,384,731,870	94.21	8,263,099,130
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada	79,356,022,000	42,508,440,000	41,420,367,981	0	41,420,367,981	97.44	1,088,072,019
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261	315,080,095,000	199,835,532,000	187,241,677,965	0	187,241,677,965	93.7	12,593,854,035
5262	Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas							
526212	Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan	0	89,800,000	62,743,000	0	62,743,000	69.87	27,057,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5262	0	89,800,000	62,743,000	0	62,743,000	69.87	27,057,000
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada							
526311	Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	316,696,675,000	188,493,473,000	164,874,247,264	19,324,000	164,854,923,264	87.47	23,638,549,736
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263	316,696,675,000	188,493,473,000	164,874,247,264	19,324,000	164,854,923,264	87.47	23,638,549,736
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	17,072,952,022,000	16,293,063,059,000	14,658,125,233,818	56,249,196,402	14,601,876,037,416	89.97	1,691,187,021,584
53	BELANJA MODAL							
5311	Belanja Modal Tanah							
531111	Belanja Modal Tanah	124,281,332,000	125,479,388,000	83,515,602,040	124,700,000	83,390,902,040	66.56	42,088,485,960
531112	Belanja Modal Pembebasan Tanah	677,300,000	5,582,740,000	5,222,902,000	0	5,222,902,000	93.55	359,838,000
531113	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	328,000,000	670,775,000	633,080,000	0	633,080,000	94.38	37,695,000
531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	2,182,571,000	1,414,425,000	1,002,503,580	0	1,002,503,580	70.88	411,921,420
531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	6,943,015,000	6,901,822,000	6,253,119,200	5,021,860	6,248,097,340	90.6	653,724,660
531116	Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah	673,600,000	371,501,000	70,300,000	0	70,300,000	18.92	301,201,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 29/04/17 3:24 PM
Halaman : 5
Prg ID : lap_lra_bel_akun

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
531117	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	354,500,000	157,450,000	37,400,000	0	37,400,000	23.75	120,050,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311	135,440,318,000	140,578,101,000	96,734,906,820	129,721,860	96,605,184,960	68.81	43,972,916,040
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	503,249,644,000	600,491,732,000	526,718,031,646	97,102,072	526,620,929,574	87.71	73,870,802,426
532112	Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	129,820,000	137,340,000	116,770,000	0	116,770,000	85.02	20,570,000
532113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	353,220,000	756,100,000	578,148,936	0	578,148,936	76.46	177,951,064
532114	Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin	481,980,000	373,980,000	162,750,000	0	162,750,000	43.52	211,230,000
532115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	91,360,000	30,000,000	23,000,000	0	23,000,000	76.67	7,000,000
532117	Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	472,500,000	342,582,000	327,446,000	0	327,446,000	95.58	15,136,000
532118	Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	7,500,000	15,300,000	0	0	0	0	15,300,000
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	745,350,000	572,682,000	482,983,600	0	482,983,600	84.34	89,698,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	505,531,374,000	602,719,716,000	528,409,130,182	97,102,072	528,312,028,110	87.67	74,407,687,890
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,948,819,868,000	1,801,290,247,000	1,674,010,589,097	364,624,526	1,673,645,964,571	92.93	127,644,282,429
533112	Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	64,000,000	8,789,279,000	175,301,564	0	175,301,564	1.99	8,613,977,436
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	4,339,534,000	4,220,894,000	3,736,620,223	0	3,736,620,223	88.53	484,273,777
533114	Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan	8,400,000	178,797,000	167,396,650	0	167,396,650	93.62	11,400,350
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan	18,454,212,000	23,613,330,000	21,163,724,326	0	21,163,724,326	89.63	2,449,605,674
533116	Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	653,853,000	563,375,000	557,950,000	0	557,950,000	99.04	5,425,000
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	496,830,000	1,241,258,000	774,891,914	20,618	774,871,296	62.43	466,386,704
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	131,444,811,000	148,177,098,000	138,812,161,042	52,275,926	138,759,885,116	93.68	9,417,212,884
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	2,104,281,508,000	1,988,074,278,000	1,839,398,634,816	416,921,070	1,838,981,713,746	92.52	149,092,564,254
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan							
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	7,839,050,000	9,234,695,000	8,624,698,350	0	8,624,698,350	93.39	609,996,650
534115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	65,280,000	65,280,000	64,720,000	0	64,720,000	99.14	560,000
534121	Belanja Modal Irigasi	49,800,000	1,539,350,000	1,393,285,600	0	1,393,285,600	90.51	146,064,400
534131	Belanja Modal Jaringan	2,343,360,000	6,068,366,000	5,212,709,304	0	5,212,709,304	85.9	855,656,696
534133	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	5,000,000	0	0	0	0	0	0
534134	Belanja Modal Sewa Peralatan Jaringan	250,000,000	0	0	0	0	0	0
534135	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan	84,000,000	0	0	0	0	0	0
534141	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	736,922,000	653,924,000	612,420,000	0	612,420,000	93.65	41,504,000
534151	Belanja Penambahan Nilai Irigasi	0	96,000,000	95,014,400	0	95,014,400	98.97	985,600
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	866,138,000	694,300,000	673,216,840	0	673,216,840	96.96	21,083,160
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341	12,239,550,000	18,351,915,000	16,676,064,494	0	16,676,064,494	90.87	1,675,850,506
5361	Belanja Modal Lainnya							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 29/04/17 3:24 PM
Halaman : 6
Prg ID : lap_lra_bel_akun

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
536111	Belanja Modal Lainnya	155,823,417,000	122,587,832,000	109,811,544,613	27,543,936	109,784,000,677	89.58	12,803,831,323
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset	493,006,000	626,102,000	619,876,800	0	619,876,800	99.01	6,225,200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	156,316,423,000	123,213,934,000	110,431,421,413	27,543,936	110,403,877,477	89.63	12,810,056,523
5371	Belanja Modal BLU							
537111	Belanja Modal Tanah - BLU	1,000,000,000	52,983,800,000	51,202,331,618	0	51,202,331,618	96.64	1,781,468,382
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	46,319,296,000	102,947,074,000	84,637,796,363	0	84,637,796,363	82.21	18,309,277,637
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	28,197,668,000	43,879,412,000	38,317,389,916	0	38,317,389,916	87.32	5,562,022,084
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	543,721,000	2,970,131,000	2,710,813,960	0	2,710,813,960	91.27	259,317,040
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	9,816,091,000	9,908,703,000	8,081,412,408	0	8,081,412,408	81.56	1,827,290,592
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371	85,876,776,000	212,689,120,000	184,949,744,265	0	184,949,744,265	86.96	27,739,375,735
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	2,999,685,949,000	3,085,627,064,000	2,776,599,901,990	671,288,938	2,775,928,613,052	89.98	309,698,450,948
57	BELANJA BANTUAN SOSIAL							
5711	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial							
571111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk	70,200,000	70,200,000	70,200,000	0	70,200,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5711	70,200,000	70,200,000	70,200,000	0	70,200,000	100	0
5721	Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial							
572111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang	41,142,734,000	43,193,435,000	40,724,700,000	0	40,724,700,000	94.28	2,468,735,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5721	41,142,734,000	43,193,435,000	40,724,700,000	0	40,724,700,000	94.28	2,468,735,000
5731	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial							
573111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk	51,624,700,000	56,178,825,000	56,015,575,000	16,699,412	55,998,875,588	99.71	179,949,412
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5731	51,624,700,000	56,178,825,000	56,015,575,000	16,699,412	55,998,875,588	99.71	179,949,412
5741	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial							
574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk	1,104,185,166,000	1,129,758,225,000	1,045,651,336,182	288,923,892	1,045,362,412,290	92.56	84,395,812,710
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5741	1,104,185,166,000	1,129,758,225,000	1,045,651,336,182	288,923,892	1,045,362,412,290	92.56	84,395,812,710
5751	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan							
575111	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam	49,212,650,000	49,489,700,000	47,331,425,000	500,000	47,330,925,000	95.64	2,158,775,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5751	49,212,650,000	49,489,700,000	47,331,425,000	500,000	47,330,925,000	95.64	2,158,775,000
5761	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana							
576111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam	750,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5761	750,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 57	1,246,985,450,000	1,278,690,385,000	1,189,793,236,182	306,123,304	1,189,487,112,878	93.05	89,203,272,122
	JUMLAH BELANJA	56,829,042,311,000	56,815,475,045,000	53,198,655,275,775	90,199,367,288	53,108,455,908,487	93.63	3,707,019,136,513

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2016

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 16/05/17 2:45 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_bel_sdfs_d_baru

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	Sumber Dana Tidak Ada							
07	Program Pendidikan Islam							
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	0	0	48,276,424	0	48,276,424	null	-48,276,424
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 07	0	0	48,276,424	0	48,276,424	null	-48,276,424
	JUMLAH BELANJA Sumber Dana Tidak Ada	0	0	48,276,424	0	48,276,424	null	-48,276,424
0	Sumber Dana Tidak Ada							
07	Program Pendidikan Islam							
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	0	0	2,295,000	0	2,295,000	null	-2,295,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 07	0	0	2,295,000	0	2,295,000	null	-2,295,000
	JUMLAH BELANJA Sumber Dana Tidak Ada	0	0	2,295,000	0	2,295,000	null	-2,295,000
01	RUPIAH MURNI							
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama							
2098	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	34,192,441,000	33,769,311,000	27,662,770,267	358,168,594	27,304,601,673	80.86	6,464,709,327
2099	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	72,420,618,000	72,994,906,000	62,459,425,738	613,511,551	61,845,914,187	84.73	11,148,991,813
2100	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	1,612,619,928,000	1,293,179,520,000	1,154,308,054,145	5,243,525,409	1,149,064,528,736	88.86	144,114,991,264
2101	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	37,425,448,000	37,230,595,000	32,287,954,203	517,343,768	31,770,610,435	85.33	5,459,984,565
2102	Pembinaan Administrasi Perencanaan	79,251,947,000	78,958,492,000	71,529,316,635	762,875,472	70,766,441,163	89.62	8,192,050,837
2103	Pembinaan Administrasi Umum	658,150,376,000	657,747,220,000	589,851,168,027	276,530,883	589,574,637,144	89.64	68,172,582,856
2106	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	51,229,560,000	50,997,963,000	43,669,288,903	682,443,550	42,986,845,353	84.29	8,011,117,647
2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	0	0	57,642,500	0	57,642,500	null	-57,642,500

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2016

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 16/05/17 2:45 PM

Halaman : 2

Prg ID : lap_bel_sdfs_d_baru

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
2125	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	0	0	371,350,224	6,074,712	365,275,512	null	-365,275,512
2156	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat	0	0	0	8,830,000	-8,830,000	null	8,830,000
5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	0	0	40,000,000	300,000	39,700,000	null	-39,700,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 01	2,545,290,318,000	2,224,878,007,000	1,982,236,970,642	8,469,603,939	1,973,767,366,703	86.19	251,110,640,297
02	Nama Program Tidak Ada							
5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	0	0	70,000,000	0	70,000,000	null	-70,000,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 02	0	0	70,000,000	0	70,000,000	null	-70,000,000
03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama							
2103	Pembinaan Administrasi Umum	0	0	4,500,000	0	4,500,000	null	-4,500,000
2115	Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah I	13,413,322,000	13,720,869,000	13,302,380,050	969,809,135	12,332,570,915	89.88	1,388,298,085
2116	Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah II	13,282,850,000	13,434,831,000	12,639,286,382	680,399,466	11,958,886,916	89.01	1,475,944,084
2117	Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah III	13,205,560,000	13,489,968,000	12,863,540,790	750,784,100	12,112,756,690	89.79	1,377,211,310
2118	Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah IV	18,764,192,000	16,663,866,000	15,004,990,180	550,927,175	14,454,063,005	86.74	2,209,802,995
2119	Pengawasan Fungsional Inspektorat Investigasi	5,482,655,000	5,837,335,000	5,733,167,666	77,081,500	5,656,086,166	96.9	181,248,834
2120	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Agama	75,948,582,000	76,663,295,000	74,780,723,418	488,807,105	74,291,916,313	96.91	2,371,378,687
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 03	140,097,161,000	139,810,164,000	134,328,588,486	3,517,808,481	130,810,780,005	91.538	8,999,383,995
04	Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama							
2109	Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	9,920,000,000	10,725,901,000	10,051,003,450	86,276,584	9,964,726,866	92.9	761,174,134
2151	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi	41,248,693,000	43,881,699,000	37,921,505,053	386,709,148	37,534,795,905	85.54	6,346,903,095
2152	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan	38,913,580,000	38,860,899,000	32,435,806,668	239,070,352	32,196,736,316	82.85	6,664,162,684

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2016

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 16/05/17 2:45 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_bel_sdfs_d_baru

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
2153	Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan	22,474,371,000	22,474,371,000	20,585,777,391	725,582,499	19,860,194,892	88.37	2,614,176,108
2154	Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Keagamaan	12,009,342,000	12,009,342,000	10,552,239,058	472,710,708	10,079,528,350	83.93	1,929,813,650
2156	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat	286,989,905,000	272,946,928,000	248,696,224,451	1,671,373,314	247,024,851,137	90.5	25,922,076,863
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 04	411,555,891,000	400,899,140,000	360,242,556,071	3,581,722,605	356,660,833,466	87.348	44,238,306,534
06	Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah							
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri	36,613,587,000	36,158,290,000	31,297,166,267	365,997,445	30,931,168,822	85.54	5,227,121,178
2148	Pembinaan Haji dan Umrah	200,530,256,000	200,538,157,000	183,877,487,034	1,216,249,079	182,661,237,955	91.09	17,876,919,045
2149	Pengelolaan Dana Haji	9,772,810,000	9,441,897,000	6,968,615,563	42,415,625	6,926,199,938	73.36	2,515,697,062
2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	416,130,527,000	447,553,195,000	389,708,855,071	1,454,537,241	388,254,317,830	86.75	59,298,877,170
5107	Pelayanan Atase Haji di Jeddah	2,000,000,000	2,000,000,000	1,853,140,704	0	1,853,140,704	92.66	146,859,296
5310	Pelayanan Haji Luar Negeri	14,505,624,000	14,190,624,000	12,765,813,469	286,394,870	12,479,418,599	87.94	1,711,205,401
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 06	679,552,804,000	709,882,163,000	626,471,078,108	3,365,594,260	623,105,483,848	86.223	86,776,679,152
08	Program Bimbingan Masyarakat Islam							
2103	Pembinaan Administrasi Umum	0	0	7,040,000	0	7,040,000	null	-7,040,000
2121	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf	41,950,549,000	41,863,202,000	38,770,302,570	369,012,984	38,401,289,586	91.73	3,461,912,414
2122	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat	40,980,706,000	40,949,888,000	37,548,462,105	767,111,430	36,781,350,675	89.82	4,168,537,325
2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	216,099,862,000	215,724,178,000	209,661,707,253	480,595,272	209,181,111,981	96.97	6,543,066,019
2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	307,816,151,000	290,934,497,000	273,106,899,469	1,900,110,805	271,206,788,664	93.22	19,727,708,336
2125	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	3,191,337,568,000	3,380,393,254,000	3,273,360,338,085	8,522,205,506	3,264,838,132,579	96.58	115,555,121,421
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 08	3,798,184,836,000	3,969,865,019,000	3,832,454,749,482	12,039,035,997	3,820,415,713,485	93.664	149,449,305,515

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2016

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 16/05/17 2:45 PM
Halaman : 4
Prg ID : lap_bel_sdfs_d_baru

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
09	Program Bimbingan Masyarakat Kristen							
2137	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	77,493,633,000	77,118,924,000	66,266,002,216	73,405,000	66,192,597,216	85.83	10,926,326,784
2138	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	84,302,263,000	103,613,996,000	96,985,602,057	855,621,681	96,129,980,376	92.78	7,484,015,624
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 09	161,795,896,000	180,732,920,000	163,251,604,273	929,026,681	162,322,577,592	89.305	18,410,342,408
10	Program Bimbingan Masyarakat Katolik							
2140	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	35,241,855,000	35,175,445,000	34,407,247,345	34,714,500	34,372,532,845	97.72	802,912,155
2141	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	171,173,650,000	140,047,802,000	125,243,133,171	323,545,137	124,919,588,034	89.2	15,128,213,966
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 10	206,415,505,000	175,223,247,000	159,650,380,516	358,259,637	159,292,120,879	93.46	15,931,126,121
11	Program Bimbingan Masyarakat Hindu							
2143	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	57,150,868,000	56,683,426,000	52,784,713,257	883,741,512	51,900,971,745	91.56	4,782,454,255
2144	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	38,260,755,000	38,536,960,000	35,165,731,903	199,799,262	34,965,932,641	90.73	3,571,027,359
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 11	95,411,623,000	95,220,386,000	87,950,445,160	1,083,540,774	86,866,904,386	91.145	8,353,481,614
12	Program Bimbingan Masyarakat Buddha							
2145	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha	41,614,037,000	41,379,238,000	37,000,326,404	1,588,376,707	35,411,949,697	85.58	5,967,288,303
2146	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Budha	30,857,682,000	30,770,759,000	28,363,218,478	1,192,122,528	27,171,095,950	88.3	3,599,663,050
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 12	72,471,719,000	72,149,997,000	65,363,544,882	2,780,499,235	62,583,045,647	86.94	9,566,951,353
13	Program Kerukunan Umat Beragama							
5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	77,377,210,000	77,144,904,000	64,293,362,694	363,925,815	63,929,436,879	82.87	13,215,467,121
5622	Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama	6,600,000,000	6,600,000,000	5,803,432,298	38,629,380	5,764,802,918	87.35	835,197,082
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 13	83,977,210,000	83,744,904,000	70,096,794,992	402,555,195	69,694,239,797	85.11	14,050,664,203

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2016

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 16/05/17 2:45 PM

Halaman : 5

Prg ID : lap_bel_sdfs_d_baru

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
null	Nama Program Tidak Ada							
2156	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat	0	0	0	1,575,000	-1,575,000	null	1,575,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM null	0	0	0	1,575,000	-1,575,000	null	1,575,000
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama							
2127	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	0	0	11,046,500	0	11,046,500	null	-11,046,500
2129	Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah	0	0	24,028,652	15,553,752	8,474,900	null	-8,474,900
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	0	0	222,213,225	20,283,603	201,929,622	null	-201,929,622
5100	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	0	0	5,479,822	59	5,479,763	null	-5,479,763
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 01	0	0	262,768,199	35,837,414	226,930,785	null	-226,930,785
04	Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama							
2155	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan	35,403,952,000	35,403,952,000	29,712,693,941	807,890,573	28,904,803,368	81.64	6,499,148,632
5109	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan	149,684,910,000	122,972,485,000	96,099,436,605	1,225,042,195	94,874,394,410	77.15	28,098,090,590
5311	Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	14,770,039,000	14,770,039,000	12,321,381,960	384,949,038	11,936,432,922	80.82	2,833,606,078
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 04	199,858,901,000	173,146,476,000	138,133,512,506	2,417,881,806	135,715,630,700	79.87	37,430,845,300
07	Program Pendidikan Islam							
2127	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	584,759,417,000	540,935,954,000	472,521,900,452	1,836,645,173	470,685,255,279	87.01	70,250,698,721
2128	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam	715,649,737,000	577,215,117,000	458,738,988,396	1,844,105,076	456,894,883,320	79.16	120,320,233,680
2129	Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah	14,990,093,197,000	15,131,197,442,000	14,387,190,244,007	14,012,021,427	14,373,178,222,580	94.99	758,019,219,420
2132	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	1,662,437,006,000	1,340,030,065,000	1,158,777,466,473	5,374,511,794	1,153,402,954,679	86.07	186,627,110,321
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	24,027,962,919,000	23,964,437,372,000	23,206,815,921,209	19,055,494,958	23,187,760,426,251	96.76	776,676,945,749

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2016

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 16/05/17 2:45 PM
Halaman : 6
Prg ID : lap_bel_sdfs_d_baru

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 07	41,980,902,276,000	41,553,815,950,000	39,684,044,520,537	42,122,778,428	39,641,921,742,109	88.798	1,911,894,207,891
09	Program Bimbingan Masyarakat Kristen							
2136	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	133,715,274,000	122,105,653,000	103,362,940,115	232,196,276	103,130,743,839	84.46	18,974,909,161
5100	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	961,510,987,000	1,079,266,499,000	1,069,530,494,399	785,365,116	1,068,745,129,283	99.03	10,521,369,717
5101	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen	143,910,600,000	104,922,231,000	82,483,546,202	185,991,705	82,297,554,497	78.44	22,624,676,503
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 09	1,239,136,861,000	1,306,294,383,000	1,255,376,980,716	1,203,553,097	1,254,173,427,619	87.31	52,120,955,381
10	Program Bimbingan Masyarakat Katolik							
2139	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	112,101,811,000	102,680,015,000	79,816,038,266	162,497,000	79,653,541,266	77.57	23,026,473,734
5102	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	501,013,906,000	540,015,242,000	499,032,285,503	169,759,071	498,862,526,432	92.38	41,152,715,568
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 10	613,115,717,000	642,695,257,000	578,848,323,769	332,256,071	578,516,067,698	84.975	64,179,189,302
11	Program Bimbingan Masyarakat Hindu							
2142	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	64,335,260,000	58,456,336,000	52,525,377,901	721,087,733	51,804,290,168	88.62	6,652,045,832
5103	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	378,642,926,000	409,646,192,000	399,568,944,536	653,734,885	398,915,209,651	97.38	10,730,982,349
5104	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu	81,233,063,000	63,268,929,000	51,370,924,901	979,148,301	50,391,776,600	79.65	12,877,152,400
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 11	524,211,249,000	531,371,457,000	503,465,247,338	2,353,970,919	501,111,276,419	88.55	30,260,180,581
12	Program Bimbingan Masyarakat Buddha							
4012	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha	114,234,077,000	106,838,827,000	86,524,710,910	1,686,703,231	84,838,007,679	79.41	22,000,819,321
5105	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha	80,576,716,000	84,353,790,000	83,384,512,509	86,557,865	83,297,954,644	98.75	1,055,835,356
5106	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Budha	32,056,043,000	22,577,425,000	18,030,997,983	458,114,641	17,572,883,342	77.83	5,004,541,658
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 12	226,866,836,000	213,770,042,000	187,940,221,402	2,231,375,737	185,708,845,665	85.33	28,061,196,335

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2016

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 16/05/17 2:45 PM
Halaman : 7
Prg ID : lap_bel_sdfs_d_baru

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
13	Program Kerukunan Umat Beragama							
5621	Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu	6,600,000,000	5,933,368,000	4,816,418,100	122,218,641	4,694,199,459	79.12	1,239,168,541
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 13	6,600,000,000	5,933,368,000	4,816,418,100	122,218,641	4,694,199,459	79.12	1,239,168,541
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama							
00	Nama Kegiatan Tidak Ada	0	0	0	492,700	-492,700	null	492,700
000	Nama Kegiatan Tidak Ada	0	0	0	32,180,150	-32,180,150	null	32,180,150
0000	Nama Kegiatan Tidak Ada	0	0	0	155,304,710	-155,304,710	null	155,304,710
2035	Nama Kegiatan Tidak Ada	0	0	0	63,230	-63,230	null	63,230
21	Nama Kegiatan Tidak Ada	0	0	0	155,341,400	-155,341,400	null	155,341,400
null	Nama Kegiatan Tidak Ada	0	0	0	134,756,977	-134,756,977	null	134,756,977
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 01	0	0	0	478,139,167	-478,139,167	null	478,139,167
07	Program Pendidikan Islam							
null	Nama Kegiatan Tidak Ada	0	0	6,797,000	0	6,797,000	null	-6,797,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 07	0	0	6,797,000	0	6,797,000	null	-6,797,000
08	Program Bimbingan Masyarakat Islam							
2011	Nama Kegiatan Tidak Ada	0	0	31,467,446	0	31,467,446	null	-31,467,446
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 08	0	0	31,467,446	0	31,467,446	null	-31,467,446
09	Program Bimbingan Masyarakat Kristen							
2400	Nama Kegiatan Tidak Ada	0	0	0	915,987	-915,987	null	915,987
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 09	0	0	0	915,987	-915,987	null	915,987

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2016

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 16/05/17 2:45 PM

Halaman : 8

Prg ID : lap_bel_sdfs_d_baru

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
null	Nama Program Tidak Ada							
null	Nama Kegiatan Tidak Ada	0	0	0	4,716,000	-4,716,000	null	4,716,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM null	0	0	0	4,716,000	-4,716,000	null	4,716,000
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	52,985,444,803,000	52,479,432,880,000	49,835,042,969,625	87,832,865,071	49,747,210,104,554	87.841	2,732,222,775,446
02	PINJAMAN LUAR NEGERI							
07	Program Pendidikan Islam							
2132	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	117,270,000,000	96,290,000,000	52,333,824,040	0	52,333,824,040	54.35	43,956,175,960
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 07	117,270,000,000	96,290,000,000	52,333,824,040	0	52,333,824,040	54.35	43,956,175,960
	JUMLAH BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI	117,270,000,000	96,290,000,000	52,333,824,040	0	52,333,824,040	54.35	43,956,175,960
03	RUPIAH MURNI PENDAMPING							
07	Program Pendidikan Islam							
2132	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	70,070,000,000	70,070,000,000	62,510,063,744	624,255,678	61,885,808,066	88.32	8,184,191,934
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 07	70,070,000,000	70,070,000,000	62,510,063,744	624,255,678	61,885,808,066	88.32	8,184,191,934
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI PENDAMPING	70,070,000,000	70,070,000,000	62,510,063,744	624,255,678	61,885,808,066	88.32	8,184,191,934
04	PNBP							
08	Program Bimbingan Masyarakat Islam							
2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	1,036,792,160,000	1,034,520,500,000	490,134,750,147	1,398,572,479	488,736,177,668	47.24	545,784,322,332
2125	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	0	0	1,704,876	5,808,762	-4,103,886	null	4,103,886
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 08	1,036,792,160,000	1,034,520,500,000	490,136,455,023	1,404,381,241	488,732,073,782	47.24	545,788,426,218
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2016

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 16/05/17 2:45 PM

Halaman : 9

Prg ID : lap_bel_sdfs_d_baru

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
2132	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	0	0	0	570,000	-570,000	null	570,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 01	0	0	0	570,000	-570,000	null	570,000
07	Program Pendidikan Islam							
2128	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam	0	0	0	3,375,000	-3,375,000	null	3,375,000
2132	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	332,786,250,000	396,671,374,000	309,730,218,946	231,965,480	309,498,253,466	78.02	87,173,120,534
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	0	952,113,000	467,224,400	5,500,000	461,724,400	48.49	490,388,600
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 07	332,786,250,000	397,623,487,000	310,197,443,346	240,840,480	309,956,602,866	63.255	87,666,884,134
09	Program Bimbingan Masyarakat Kristen							
5101	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen	12,131,014,000	12,131,014,000	9,620,510,111	4,731,000	9,615,779,111	79.27	2,515,234,889
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 09	12,131,014,000	12,131,014,000	9,620,510,111	4,731,000	9,615,779,111	79.27	2,515,234,889
11	Program Bimbingan Masyarakat Hindu							
5103	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	737,100,000	737,100,000	604,250,000	0	604,250,000	81.98	132,850,000
5104	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu	7,335,187,000	7,335,187,000	3,318,617,545	1,634,000	3,316,983,545	45.22	4,018,203,455
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 11	8,072,287,000	8,072,287,000	3,922,867,545	1,634,000	3,921,233,545	63.6	4,151,053,455
12	Program Bimbingan Masyarakat Buddha							
5106	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Budha	652,806,000	652,806,000	269,044,550	0	269,044,550	41.21	383,761,450
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 12	652,806,000	652,806,000	269,044,550	0	269,044,550	41.21	383,761,450
	JUMLAH BELANJA PNPB	1,390,434,517,000	1,453,000,094,000	814,146,320,575	1,652,156,721	812,494,163,854	60.204	640,505,930,146
06	BADAN LAYANAN UMUM							
07	Program Pendidikan Islam							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2016

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 16/05/17 2:45 PM
Halaman : 10
Prg ID : lap_bel_sdfts_d_baru

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
2132	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	799,743,415,000	1,126,636,183,000	940,688,660,639	0	940,688,660,639	83.5	185,947,522,361
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 07	799,743,415,000	1,126,636,183,000	940,688,660,639	0	940,688,660,639	83.5	185,947,522,361
	JUMLAH BELANJA BADAN LAYANAN UMUM	799,743,415,000	1,126,636,183,000	940,688,660,639	0	940,688,660,639	83.5	185,947,522,361
10	HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI							
06	Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah							
2148	Pembinaan Haji dan Umrah	0	84,750,000	0	0	0	0	84,750,000
2149	Pengelolaan Dana Haji	0	750,000,000	750,000,000	0	750,000,000	100	0
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 06	0	834,750,000	750,000,000	0	750,000,000	50	84,750,000
08	Program Bimbingan Masyarakat Islam							
2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	0	13,195,000,000	11,768,694,610	0	11,768,694,610	89.19	1,426,305,390
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 08	0	13,195,000,000	11,768,694,610	0	11,768,694,610	89.19	1,426,305,390
13	Program Kerukunan Umat Beragama							
5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	0	7,100,000,000	7,100,000,000	0	7,100,000,000	100	0
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 13	0	7,100,000,000	7,100,000,000	0	7,100,000,000	100	0
07	Program Pendidikan Islam							
2128	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam	0	32,054,403,000	31,883,882,620	0	31,883,882,620	99.47	170,520,380
2129	Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah	0	60,224,190,000	59,504,656,130	0	59,504,656,130	98.81	719,533,870
2132	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	0	8,587,545,000	8,292,879,001	0	8,292,879,001	96.57	294,665,999
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	0	150,000,000	188,511,730	0	188,511,730	125.67	-38,511,730
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 07	0	101,016,138,000	99,869,929,481	0	99,869,929,481	105.13	1,146,208,519

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2016

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 16/05/17 2:45 PM
Halaman : 11
Prg ID : lap_bel_sdfs_d_baru

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI	0	122,145,888,000	119,488,624,091	0	119,488,624,091	88.714	2,657,263,909
19	SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA							
06	Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah							
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri	390,000,000,000	390,000,000,000	332,469,277,029	13,435,000	332,455,842,029	85.25	57,544,157,971
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 06	390,000,000,000	390,000,000,000	332,469,277,029	13,435,000	332,455,842,029	85.25	57,544,157,971
08	Program Bimbingan Masyarakat Islam							
2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	181,079,576,000	182,900,000,000	176,822,188,821	73,437,818	176,748,751,003	96.64	6,151,248,997
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 08	181,079,576,000	182,900,000,000	176,822,188,821	73,437,818	176,748,751,003	96.64	6,151,248,997
07	Program Pendidikan Islam							
2132	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	895,000,000,000	895,000,000,000	865,048,741,449	3,217,000	865,045,524,449	96.65	29,954,475,551
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 07	895,000,000,000	895,000,000,000	865,048,741,449	3,217,000	865,045,524,449	96.65	29,954,475,551
	JUMLAH BELANJA SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA	1,466,079,576,000	1,467,900,000,000	1,374,340,207,299	90,089,818	1,374,250,117,481	92.847	93,649,882,519
50	Sumber Dana Tidak Ada							
07	Program Pendidikan Islam							
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	0	0	4,620,000	0	4,620,000	null	-4,620,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 07	0	0	4,620,000	0	4,620,000	null	-4,620,000
	JUMLAH BELANJA Sumber Dana Tidak Ada	0	0	4,620,000	0	4,620,000	null	-4,620,000
51	Sumber Dana Tidak Ada							
08	Program Bimbingan Masyarakat Islam							
2125	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	0	0	47,414,338	0	47,414,338	null	-47,414,338

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2016

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 16/05/17 2:45 PM
Halaman : 12
Prg ID : lap_bel_sdfs_d_baru

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 08	0	0	47,414,338	0	47,414,338	null	-47,414,338
	JUMLAH BELANJA Sumber Dana Tidak Ada	0	0	47,414,338	0	47,414,338	null	-47,414,338
52	Sumber Dana Tidak Ada							
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama							
2103	Pembinaan Administrasi Umum	0	0	2,000,000	0	2,000,000	null	-2,000,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 01	0	0	2,000,000	0	2,000,000	null	-2,000,000
	JUMLAH BELANJA Sumber Dana Tidak Ada	0	0	2,000,000	0	2,000,000	null	-2,000,000
	JUMLAH	56,829,042,311,000	56,815,475,045,000	53,198,655,275,775	90,199,367,288	53,108,455,908,487	85.26	3,707,019,136,513

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 16/05/17 5:03 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_es1jb_v6

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	SEKRETARIAT JENDERAL							
51	BELANJA PEGAWAI	1,554,154,945,000	1,234,965,276,000	1,100,810,150,206	4,446,701,015	1,096,363,449,191	88.78	138,601,826,809
52	BELANJA BARANG	979,156,288,000	982,284,887,000	881,036,406,509	4,515,621,895	876,520,784,614	89.23	105,764,102,386
53	BELANJA MODAL	102,556,295,000	104,406,116,000	82,089,641,741	30,240,000	82,059,401,741	78.6	22,346,714,259
	JUMLAH BELANJA (01) SEKRETARIAT JENDERAL	2,635,867,528,000	2,321,656,279,000	2,063,936,198,456	8,992,562,910	2,054,943,635,546	256.61	266,712,643,454
02	INSPEKTORAT JENDERAL							
51	BELANJA PEGAWAI	47,008,701,000	47,008,701,000	46,731,867,633	433,694,637	46,298,172,996	98.49	710,528,004
52	BELANJA BARANG	90,121,154,000	90,106,463,000	85,209,797,164	3,084,113,844	82,125,683,320	91.14	7,980,779,680
53	BELANJA MODAL	2,967,306,000	2,695,000,000	2,382,423,689	0	2,382,423,689	88.4	312,576,311
	JUMLAH BELANJA (02) INSPEKTORAT JENDERAL	140,097,161,000	139,810,164,000	134,324,088,486	3,517,808,481	130,806,280,005	278.03	9,003,883,995
03	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM							
51	BELANJA PEGAWAI	3,194,825,660,000	3,384,358,406,000	3,293,467,551,652	6,847,696,698	3,286,619,854,954	97.11	97,738,551,046
52	BELANJA BARANG	1,488,218,611,000	1,496,941,967,000	938,198,593,123	6,452,632,568	931,745,960,555	62.24	565,196,006,445
53	BELANJA MODAL	333,012,301,000	319,180,146,000	279,985,310,223	238,251,592	279,747,058,631	87.65	39,433,087,369
	JUMLAH BELANJA (03) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM	5,016,056,572,000	5,200,480,519,000	4,511,651,454,998	13,538,580,858	4,498,112,874,140	247.00	702,367,644,860
04	DITJEN PENDIDIKAN ISLAM							
51	BELANJA PEGAWAI	27,967,490,218,000	28,533,344,010,000	27,324,788,892,721	17,140,965,314	27,307,647,927,407	95.7	1,225,696,082,593
52	BELANJA BARANG	12,939,004,134,000	12,279,028,015,000	11,511,572,650,631	25,651,857,692	11,485,920,792,939	93.54	793,107,222,061
53	BELANJA MODAL	2,056,861,339,000	2,168,132,583,000	2,004,873,010,503	377,826,118	2,004,495,184,385	92.45	163,637,398,615
57	BELANJA BANTUAN SOSIAL	1,232,416,250,000	1,259,947,150,000	1,173,780,906,182	306,123,304	1,173,474,782,878	93.14	86,472,367,122
	JUMLAH BELANJA (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM	44,195,771,941,000	44,240,451,758,000	42,015,015,460,037	43,476,772,428	41,971,538,687,609	374.83	2,268,913,070,391
05	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN							
51	BELANJA PEGAWAI	1,056,887,615,000	1,202,934,011,000	1,181,106,528,812	1,191,460,502	1,179,915,068,310	98.09	23,018,942,690
52	BELANJA BARANG	299,945,610,000	236,502,093,000	199,399,535,899	945,850,335	198,453,685,564	83.91	38,048,407,436
53	BELANJA MODAL	48,123,346,000	47,409,378,000	37,843,580,211	0	37,843,580,211	79.82	9,565,797,789
57	BELANJA BANTUAN SOSIAL	8,107,200,000	12,312,835,000	9,904,930,000	0	9,904,930,000	80.44	2,407,905,000
	JUMLAH BELANJA (05) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN	1,413,063,771,000	1,499,158,317,000	1,428,254,574,922	2,137,310,837	1,426,117,264,085	342.26	73,041,052,915
06	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK							
51	BELANJA PEGAWAI	706,584,169,000	712,463,063,000	649,028,731,454	446,455,208	648,582,276,246	91.03	63,880,786,754
52	BELANJA BARANG	104,052,891,000	96,608,779,000	82,602,632,428	242,635,500	82,359,996,928	85.25	14,248,782,072
53	BELANJA MODAL	3,078,162,000	3,031,662,000	1,049,340,403	0	1,049,340,403	34.61	1,982,321,597
57	BELANJA BANTUAN SOSIAL	5,816,000,000	5,815,000,000	5,815,000,000	0	5,815,000,000	100	0
	JUMLAH BELANJA (06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK	819,531,222,000	817,918,504,000	738,495,704,285	689,090,708	737,806,613,577	310.89	80,111,890,423
07	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 16/05/17 5:03 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_es1jb_v6

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI	395,164,469,000	428,390,531,000	417,589,715,228	529,795,385	417,059,919,843	97.36	11,330,611,157
52	BELANJA BARANG	216,772,920,000	194,895,292,000	168,445,387,373	2,902,729,230	165,542,658,143	84.94	29,352,633,857
53	BELANJA MODAL	15,757,770,000	11,378,307,000	9,303,457,442	6,621,078	9,296,836,364	81.71	2,081,470,636
	JUMLAH BELANJA (07) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU	627,695,159,000	634,664,130,000	595,338,560,043	3,439,145,693	591,899,414,350	264.01	42,764,715,650
08	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA							
51	BELANJA PEGAWAI	106,410,523,000	112,119,018,000	108,332,326,265	130,963,361	108,201,362,904	96.51	3,917,655,096
52	BELANJA BARANG	180,427,882,000	165,859,800,000	139,051,270,775	4,880,911,611	134,170,359,164	80.89	31,689,440,836
53	BELANJA MODAL	12,506,956,000	7,978,627,000	5,896,813,794	0	5,896,813,794	73.91	2,081,813,206
57	BELANJA BANTUAN SOSIAL	646,000,000	615,400,000	292,400,000	0	292,400,000	47.51	323,000,000
	JUMLAH BELANJA (08) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA	299,991,361,000	286,572,845,000	253,572,810,834	5,011,874,972	248,560,935,862	298.82	38,011,909,138
09	DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH							
51	BELANJA PEGAWAI	308,872,278,000	340,491,209,000	295,726,646,843	931,641,498	294,795,005,345	86.58	45,696,203,655
52	BELANJA BARANG	359,867,949,000	358,825,671,000	321,192,717,717	2,441,134,492	318,751,583,225	88.83	40,074,087,775
53	BELANJA MODAL	400,812,577,000	401,400,033,000	342,770,990,577	13,435,000	342,757,555,577	85.39	58,642,477,423
	JUMLAH BELANJA (09) DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN	1,069,552,804,000	1,100,716,913,000	959,690,355,137	3,386,210,990	956,304,144,147	260.80	144,412,768,853
11	BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN							
51	BELANJA PEGAWAI	172,020,312,000	162,020,312,000	156,554,492,971	873,385,026	155,681,107,945	96.09	6,339,204,055
52	BELANJA BARANG	415,384,583,000	392,010,092,000	331,416,242,199	5,131,709,235	326,284,532,964	83.23	65,725,559,036
53	BELANJA MODAL	24,009,897,000	20,015,212,000	10,405,333,407	4,915,150	10,400,418,257	51.96	9,614,793,743
	JUMLAH BELANJA (11) BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN	611,414,792,000	574,045,616,000	498,376,068,577	6,010,009,411	492,366,059,166	231.28	81,679,556,834
	JUMLAH BELANJA	56,829,042,311,000	56,815,475,045,000	53,198,655,275,775	90,199,367,288	53,108,455,908,487	84.25	3,707,019,136,513

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016 DAN 2015
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

Tgl. Cetak 29/04/2017 12:19 PM

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2016	2015	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	2,675,693,411	12,466,714,369	(9,791,020,958)	(78.54)
Kas di Bendahara Penerimaan	15,182,173,448	4,689,631,678	10,492,541,770	223.74
Kas Lainnya dan Setara Kas	35,835,312,489	27,119,291,379	8,716,021,110	32.14
Kas pada Badan Layanan Umum	746,624,184,795	620,506,163,294	126,118,021,501	20.33
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	24,154,970,314	22,000,000,000	2,154,970,314	9.80
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	274,207,240	1,935,774,562	(1,661,567,322)	(85.83)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	13,830,032,136	11,368,913,052	2,461,119,084	21.65
Piutang Bukan Pajak	7,173,062,113	27,321,686,073	(20,148,623,960)	(73.75)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(1,934,053,371)	(1,433,713,723)	(500,339,648)	34.90
Piutang Bukan Pajak (Netto)	5,239,008,742	25,887,972,350	(20,648,963,608)	(79.76)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	15,000,000	0	15,000,000	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(75,000)	0	(75,000)	0.00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	14,925,000	0	14,925,000	0.00
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	18,975,977,875	22,844,460,027	(3,868,482,152)	(16.93)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(2,837,499,476)	(1,407,195,110)	(1,430,304,366)	101.64
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)	16,138,478,399	21,437,264,917	(5,298,786,518)	(24.72)
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	2,845,061,482	5,465,610,192	(2,620,548,710)	(47.95)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(944,620,841)	(459,858,064)	(484,762,777)	105.42
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)	1,900,440,641	5,005,752,128	(3,105,311,487)	(62.03)
Persediaan	68,155,779,272	92,213,683,492	(24,057,904,220)	(26.09)
Persediaan Badan Layanan Umum	10,588,917,724	8,948,855,328	1,640,062,396	18.33
JUMLAH ASET LANCAR	940,614,123,611	853,580,016,549	87,034,107,062	10.20
ASET TETAP				
Tanah	12,279,674,359,187	12,066,004,403,231	213,669,955,956	1.77
Tanah Badan Layanan Umum	3,675,865,583,641	3,608,861,460,401	67,004,123,240	1.86
Peralatan dan Mesin	5,159,599,558,394	4,850,510,141,566	309,089,416,828	6.37
Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum	1,823,494,750,742	1,527,707,753,396	295,786,997,346	19.36
Gedung dan Bangunan	17,924,371,686,921	16,636,965,153,797	1,287,406,533,124	7.74
Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum	4,413,693,193,811	3,387,111,494,329	1,026,581,699,482	30.31
Jalan, Irigasi dan Jaringan	326,170,714,206	338,143,940,333	(11,973,226,127)	(3.54)
Jalan,Irigasi, dan Jaringan Badan Layanan Umum	233,264,568,318	173,538,253,567	59,726,314,751	34.42
Aset Tetap Lainnya	1,070,385,200,110	981,525,550,714	88,859,649,396	9.05
Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum	132,540,512,717	148,123,052,581	(15,582,539,864)	(10.52)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	844,211,818,789	744,966,878,706	99,244,940,083	13.32
Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum	512,694,922,591	1,036,776,910,692	(524,081,988,101)	(50.55)

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016 DAN 2015
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

Tgl. Cetak 29/04/2017 12:19 PM

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2016	2015	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Akumulasi Penyusutan	(8,958,116,992,996)	(7,915,511,916,097)	(1,042,605,076,899)	13.17
JUMLAH ASET TETAP	39,437,849,876,431	37,584,723,077,216	1,853,126,799,215	4.93
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	771,071,926	(21,758,102)	792,830,028	(3,643.84)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(92,333)	(742,730)	650,397	(87.57)
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	770,979,593	(22,500,832)	793,480,425	(3,526.45)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	770,979,593	(22,500,832)	793,480,425	(3,526.45)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	89,965,331,268	87,533,022,965	2,432,308,303	2.78
Aset Tak Berwujud- Badan Layanan Umum	39,815,164,793	34,255,714,111	5,559,450,682	16.23
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	1,439,575,404,223	0	1,439,575,404,223	0.00
Dana Kelolaan Badan Layanan Umum	3,406,023,750	0	3,406,023,750	0.00
Aset Lain-lain	175,506,784,055	138,316,764,424	37,190,019,631	26.89
Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum	23,729,640,783	26,203,937,931	(2,474,297,148)	(9.44)
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(225,167,297,766)	(107,330,885,658)	(117,836,412,108)	109.79
JUMLAH ASET LAINNYA	1,546,831,051,106	178,978,553,773	1,367,852,497,333	764.25
JUMLAH ASET	41,926,066,030,741	38,617,259,146,706	3,308,806,884,035	8.57
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	4,637,682,250,697	797,608,133,097	3,840,074,117,600	481.45
Hibah Yang Belum Disahkan	7,955,774,000	35,342,855,000	(27,387,081,000)	(77.49)
Pendapatan Diterima Dimuka	23,515,800,440	19,650,705,177	3,865,095,263	19.67
Uang Muka dari KPPN	2,675,693,411	12,466,714,369	(9,791,020,958)	(78.54)
Utang Jangka Pendek Lainnya	1,339,952,128	165,964,858	1,173,987,270	707.37
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4,673,169,470,676	865,234,372,501	3,807,935,098,175	440.10
JUMLAH KEWAJIBAN	4,673,169,470,676	865,234,372,501	3,807,935,098,175	440.10
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	37,252,896,560,065	37,752,024,774,205	(499,128,214,140)	(1.32)
JUMLAH EKUITAS	37,252,896,560,065	37,752,024,774,205	(499,128,214,140)	(1.32)
JUMLAH EKUITAS	37,252,896,560,065	37,752,024,774,205	(499,128,214,140)	(1.32)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	41,926,066,030,741	38,617,259,146,706	3,308,806,884,035	8.57

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

Kode Lap : LO.KL
Tanggal : 29/04/17 12:20
Halaman : 1
Prg ID : lap_lo_kl

URAIAN	2016	2015	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	1,540,000	(1,540,000)	(100)
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	1,540,000	(1,540,000)	(100)
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,306,116,936,811	1,906,004,742,304	400,112,194,507	20.992
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	2,306,116,936,811	1,906,004,742,304	400,112,194,507	20.992
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	2,306,116,936,811	1,906,006,282,304	400,110,654,507	20.992
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	37,167,875,137,967	32,686,045,892,807	4,481,829,245,160	13.712
Beban Persediaan	286,604,966,611	332,124,014,892	(45,519,048,281)	(13.705)
Beban Barang dan Jasa	11,237,073,422,550	12,477,588,790,387	(1,240,515,367,837)	(9.942)
Beban Pemeliharaan	567,474,854,017	672,822,095,466	(105,347,241,449)	(15.658)
Beban Perjalanan Dinas	1,925,440,174,185	1,640,817,337,061	284,622,837,124	17.346
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	355,071,767,116	561,545,903,106	(206,474,135,990)	(36.769)
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

Kode Lap : LO.KL
Tanggal : 29/04/17 12:20
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_kl

URAIAN	2016	2015	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	1,188,200,289,835	1,599,185,342,852	(410,985,053,017)	(25.7)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,250,966,880,395	1,186,927,433,529	64,039,446,866	5.395
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	354,521,480	4,604,013,428	(4,249,491,948)	(92.3)
Beban Lain-Lain	3,146,900	(37,490,912)	40,637,812	(108.39 4)
JUMLAH BEBAN	53,979,065,161,056	51,161,623,332,616	2,817,441,828,440	5.507
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(51,672,948,224,245)	(49,255,617,050,312)	(2,417,331,173,933)	4.908
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(14,941,602,663)	(11,256,378,864)	(3,685,223,799)	32.739
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	3,769,161,202	2,478,168,506	1,290,992,696	52.095
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	18,710,763,865	13,734,547,370	4,976,216,495	36.231
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	130,297,073,239	130,058,227,412	238,845,827	0.184
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	173,539,965,775	133,376,289,967	40,163,675,808	30.113
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	43,242,892,536	3,318,062,555	39,924,829,981	1,203.2 57
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	115,355,470,576	118,801,848,548	(3,446,377,972)	(2.901)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(51,557,592,753,669)	(49,136,815,201,764)	(2,420,777,551,905)	4.927
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(51,557,592,753,669)	(49,136,815,201,764)	(2,420,777,551,905)	4.927

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT KEMENTERIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 025

KEMENTERIAN AGAMA

Kode Lap : LPE.KL

Tanggal : 29/04/17 12:19 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lpe_kl

URAIAN	2016	2015	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	37,752,024,774,205	34,945,301,997,964	2,806,722,776,241	8.032
SURPLUS/DEFISIT-LO	(51,557,592,753,669)	(49,136,316,480,360)	(2,421,276,273,309)	4.928
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	134,636,039,170	86,905,889,422	47,730,149,748	54.922
PENYESUAIAN NILAI ASET	300,797,775	104,283,703,894	(103,982,906,119)	(99.712)
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	(5,426,787,442)	2,826,008,701	(8,252,796,143)	(292.03)
SELISIH REVALUASI ASET	0	(4,529,615,787)	4,529,615,787	(100)
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	93,691,987,143	(38,145,851,772)	131,837,838,915	(345.61)
LAIN-LAIN	46,070,041,694	22,471,644,386	23,598,397,308	105.014
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	50,923,828,500,359	51,856,133,367,179	(932,304,866,820)	(1.798)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(499,128,214,140)	2,806,722,776,241	(3,305,850,990,381)	(117.78)
EKUITAS AKHIR	37,252,896,560,065	37,752,024,774,205	(499,128,214,140)	(1.322)

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

Tgl. Cetak 29/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	1,477,726,874	0
0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	1,197,966,537	0
0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	15,182,173,448	0
0	111811	Surat Berharga	0	0
0	111819	Setara Kas lainnya	0	0
0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	26,963,730,735	0
0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	464,238,820	0
0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	7,730,298,628	0
0	111826	Kas Lainnya di BLU	592,294,306	0
0	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	84,750,000	0
0	111911	Kas dan Bank - BLU	746,624,184,795	0
0	111929	Setara kas Lainnya - BLU	0	0
0	113311	Deposito - BLU	24,154,970,314	0
0	114111	Belanja Pegawai Dibayar Dimuka (prepaid)	4,176,160	0
0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	270,031,080	0
0	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	13,830,032,136	0
0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	6,809,828,323	0
0	115212	Piutang Lainnya	363,233,790	0
0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	15,000,000	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

Tgl. Cetak 29/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	115712	Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	18,894,073,346	0
0	115713	Piutang BLU Penunjang Konstruksi	0	0
0	115791	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional	81,904,529	0
0	115811	Piutang Sewa Tanah - BLU	1,337,936,417	0
0	115812	Piutang Sewa Gedung - BLU	450,570,284	0
0	115813	Piutang Sewa Ruangan - BLU	387,566,667	0
0	115814	Piutang Sewa Peralatan dan Mesin - BLU	469,400,000	0
0	115819	Piutang Sewa Lainnya - BLU	21,300,000	0
0	115891	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional	178,288,114	0
0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	0	1,933,930,321
0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	123,050
0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0	75,000
0	116612	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	0	2,837,499,476
0	116711	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Tanah BLU	0	299,358,642
0	116712	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Gedung BLU	0	126,215,532
0	116713	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Ruangan BLU	0	49,646,667
0	116714	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU	0	469,400,000
0	117111	Barang Konsumsi	43,137,087,735	0
0	117112	Amunisi	50,000	0
0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1,613,701,818	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

Tgl. Cetak 29/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	117114	Suku Cadang	73,058,047	0
0	117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	82,976,445	0
0	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	170,000,000	0
0	117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0
0	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1,923,909,200	0
0	117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	1,194,320,803	0
0	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	4,366,932,165	0
0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	13,022,553,122	0
0	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0	0
0	117131	Bahan Baku	859,855,912	0
0	117132	Barang dalam Proses	890,530,536	0
0	117141	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	837,250	0
0	117191	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	32,448,960	0
0	117199	Persediaan Lainnya	787,517,279	0
0	117212	Persediaan BLU Pelayanan Pendidikan	10,588,917,724	0
0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0	131111	Tanah	12,279,674,359,187	0
0	131211	Tanah Belum Diregister	0	0
0	131311	Tanah - BLU	3,675,865,583,641	0
0	132111	Peralatan dan Mesin	5,159,599,558,394	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

Tgl. Cetak 29/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	0
0	132311	Peralatan dan Mesin - BLU	1,823,494,750,742	0
0	132411	Peralatan dan Mesin Belum Diregister - BLU	0	0
0	133111	Gedung dan Bangunan	17,924,371,686,921	0
0	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	0	0
0	133311	Gedung dan Bangunan - BLU	4,413,693,193,811	0
0	133411	Gedung dan Bangunan Belum Diregister - BLU	0	0
0	134111	Jalan dan Jembatan	114,695,134,679	0
0	134112	Irigasi	121,486,878,012	0
0	134113	Jaringan	89,988,701,515	0
0	134211	Jalan dan Jembatan Belum Diregister	0	0
0	134212	Irigasi Belum Diregister	0	0
0	134213	Jaringan Belum Diregister	0	0
0	134311	Jalan, Irigasi, dan Jaringan - BLU	233,264,568,318	0
0	134411	Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister - BLU	0	0
0	135111	Aset Tetap Renovasi	117,083,222,279	0
0	135121	Aset Tetap Lainnya	953,301,977,831	0
0	135211	Aset Tetap Lainnya - BLU	132,540,512,717	0
0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	844,211,818,789	0
0	136211	Konstruksi Dalam Pengerjaan - BLU	512,694,922,591	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

Tgl. Cetak 29/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	4,276,851,357,447
0	137121	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin - BLU	0	851,847,983,715
0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	3,137,287,750,771
0	137221	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan - BLU	0	416,404,275,482
0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	99,848,329,167
0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	32,732,431,943
0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	32,855,813,832
0	137321	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	0	49,303,890,874
0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	59,562,211,873
0	137421	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya - BLU	0	1,422,947,892
0	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	0	0
0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	771,071,926	0
0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	92,333
0	162121	Hak Cipta	170,864,000	0
0	162151	Software	68,716,657,967	0
0	162161	Lisensi	1,435,783,892	0
0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	1,585,000	0
0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	19,640,440,409	0
0	162211	Software-Badan Layanan Umum	26,108,007,857	0
0	162291	Aset Tak Berwujud Lainnya-Badan Layanan Umum	13,707,156,936	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

Tgl. Cetak 29/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	0
0	163119	Dana Lainnya	1,439,575,404,223	0
0	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	3,406,023,750	0
0	166111	Aset Lain-lain	761,968,833	0
0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	174,576,848,222	0
0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	167,967,000	0
0	166211	Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum	804,119,200	0
0	166212	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan - BLU	22,925,521,583	0
0	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	0	0
0	169121	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0	67,379,150
0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	139,924,334,290
0	169211	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Badan Layanan Umum	0	0
0	169212	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan Badan	0	4,519,382,712
0	169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	0	7,057,488
0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	62,451,531,687
0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	530,802,533
0	169317	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0
0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	57,489,000
0	169411	Akumulasi Amortisasi Software-Badan Layanan Umum	0	17,592,870,143
0	169412	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta BLU	0	16,450,763

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

Tgl. Cetak 29/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	169415	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya-Badan Layanan Umum	0	0
0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	3,149,295,380,392
0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	15,171,173,546
0	212115	Belanja Bantuan Sosial yang Masih Harus Dibayar	0	99,750,000
0	212116	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Yang Masih Harus Dibayar	0	27,461,200
0	212119	Belanja Lain-lain yang Masih Harus Dibayar	0	17,568,500
0	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	0	7,024,994,361
0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	1,447,234,208,838
0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	15,405,690,110
0	212193	Dana Pihak Ketiga Lainnya - BLU	0	3,406,023,750
0	218211	Hibah Langsung yang belum disahkan	0	7,955,774,000
0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	2,417,489,557
0	219212	Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Dimuka	0	21,098,310,883
0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	2,675,693,411
0	219913	Utang Jangka Pendek Lain-lain	0	592,294,306
0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	236,205,305
0	219964	Utang Pajak Bendahara BLU yang Belum Disetor	0	511,452,517
0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	52,063,145,538,107
0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,285,006,009,646	0
0	313211	Transfer Keluar	303,891,982,188	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

Tgl. Cetak 29/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	313221	Transfer Masuk	0	330,224,839,997
0	391111	Ekuitas	0	37,752,024,774,205
0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	5,426,787,442	0
0	391114	Revaluasi Aset Tetap	0	0
0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	162,460,547,086
0	391117	Penyesuaian Nilai Persediaan	0	300,797,775
0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	68,768,559,943	0
0	391119	Koreksi Lainnya	0	45,522,093,694
0	391121	Ekuitas Transaksi Lainnya	0	547,948,000
0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	120,350,932,428
0	391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	994,818,339	0
3	421111	Pendapatan Minyak Bumi	0	0
3	423119	Pendapatan Penjualan Lainnya	0	5,387,000
3	423121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	275,862,401
3	423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	398,860,410
3	423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	3,095,938,391
3	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	28,857,334,173
3	423142	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	441,126,041
3	423149	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	9,596,000
3	423217	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	0	738,903,284,337

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

Tgl. Cetak 29/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	236,976,421
3	423291	Pendapatan Jasa Lainnya	0	9,570,000
3	423319	Pendapatan Bunga Lainnya	0	341,393
3	423411	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	35,928,500
3	423414	Pendapatan Hasil Denda dan sebagainya	0	910,350
3	423511	Pendapatan Uang Pendidikan	0	435,418,874,336
3	423512	Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan	0	12,620,083,599
3	423513	Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek	0	5,394,348,100
3	423519	Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	28,190,468,961
3	423613	Pendapatan dari Pengembalian Penyalahgunaan Penyelenggaraan Keuangan	0	203,769,088
3	423615	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	0	76,523,995
3	423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	3,915,305,208
3	423921	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	0	2,894,727,072
3	423922	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	0	730,903,529
3	423931	Pendapatan dari Penutupan Rekening	0	2,549,424
3	423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	27,751,433,653
3	423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	49,515,867,096
3	423953	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	25,274,388,498
3	423955	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,929,600
3	423957	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	0	7,833,827,901

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

Tgl. Cetak 29/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	423958	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,276,371,235
3	423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	23,471,042
3	423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	498,242,136
3	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	952,532,051,385
3	424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0	37,295,035,841
3	424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda	0	23,023,382,700
3	424222	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha	0	3,872,412,631
3	424223	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda	0	61,338,005,000
3	424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	0	3,515,634,517
3	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	17,773,177,565
3	424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	0	365,000,000
3	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	24,247,252,318
3	491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	0	2,167,435
3	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	2,344,236,180
3	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	54,913,113,576
3	511111	Beban Gaji Pokok PNS	10,610,913,612,658	0
3	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	196,724,375	0
3	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	739,480,940,060	0
3	511122	Beban Tunj. Anak PNS	246,730,868,419	0
3	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	106,353,430,576	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

Tgl. Cetak 29/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	870,233,088,071	0
3	511125	Beban Tunj. PPh PNS	150,537,670,431	0
3	511126	Beban Tunj. Beras PNS	610,897,198,928	0
3	511127	Beban Tunj. Kemahalan PNS	60,000,000	0
3	511128	Beban Tunj. Lauk pauk PNS	72,837,120	0
3	511129	Beban Uang Makan PNS	1,727,583,052,153	0
3	511131	Beban Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS	0	0
3	511134	Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS	7,750,950	0
3	511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	3,804,575,000	0
3	511137	Beban Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk Mengikuti Pendidikan Pasca	697,090,466	0
3	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	13,905,890,000	0
3	511147	Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri	16,511,904	0
3	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	135,609,840,743	0
3	511152	Beban Tunjangan Profesi Guru	11,521,513,137,565	0
3	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	441,286,925,000	0
3	511154	Beban Tunjangan Kehormatan Profesor	51,012,472,090	0
3	511155	Beban Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS	30,938,790,950	0
3	511156	Beban Tunjangan Khusus Guru/Dosen	3,471,821,956	0
3	511188	Beban Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca	76,700,000	0
3	511192	Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS TNI/POLRI	0	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

Tgl. Cetak 29/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	511196	Beban Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi	12,000,000	0
3	511511	Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS	5,302,560,800	0
3	511512	Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	83,961,330,196	0
3	511519	Beban Tunjangan Lainnya Non PNS	867,000,000	0
3	511521	Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	6,480,081,971,703	0
3	511522	Beban Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	312,398,298,386	0
3	512111	Beban Uang Honor Tetap	184,325,796,586	0
3	512211	Beban Uang Lembur	57,531,005,154	0
3	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2,559,229,315,356	0
3	512412	Beban Pegawai Transito	27,644,904	0
3	521111	Beban Keperluan Perkantoran	581,855,693,732	0
3	521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	383,735,500	0
3	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	2,938,061,992	0
3	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,784,434,689	0
3	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	347,082,846,200	0
3	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	249,972,099,688	0
3	521211	Beban Bahan	927,733,733,309	0
3	521212	Beban Barang Transito	3,850,000	0
3	521213	Beban Honor Output Kegiatan	628,695,206,836	0
3	521214	Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI/Atase Teknis	41,787,572	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

Tgl. Cetak 29/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	7,286,718,634,364	0
3	521723	Beban Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	12,150,000	0
3	522111	Beban Langganan Listrik	147,630,278,263	0
3	522112	Beban Langganan Telepon	23,037,246,305	0
3	522113	Beban Langganan Air	14,205,870,749	0
3	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	40,202,922,067	0
3	522121	Beban Jasa Pos dan Giro	533,035,641	0
3	522131	Beban Jasa Konsultan	6,212,607,234	0
3	522141	Beban Sewa	75,872,791,102	0
3	522151	Beban Jasa Profesi	462,873,548,414	0
3	522191	Beban Jasa Lainnya	31,155,257,726	0
3	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	321,132,603,011	0
3	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	13,060,537,559	0
3	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	181,626,254,994	0
3	523122	Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	1,535,060,235	0
3	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,874,839,625	0
3	523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	161,216,750	0
3	523132	Beban Pemeliharaan Irigasi	47,720,000	0
3	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	4,590,698,201	0
3	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	1,819,059,284	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

Tgl. Cetak 29/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	524111	Beban Perjalanan Biasa	611,153,488,993	0
3	524112	Beban Perjalanan Tetap	9,647,779,660	0
3	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	240,297,584,342	0
3	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	478,090,408,015	0
3	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	448,720,974,406	0
3	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	23,172,382,770	0
3	524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	105,914,510,452	0
3	525111	Beban Gaji dan Tunjangan	251,710,044,111	0
3	525112	Beban Barang	122,051,033,938	0
3	525113	Beban Jasa	38,300,242,002	0
3	525114	Beban Pemeliharaan	22,266,965,525	0
3	525115	Beban Perjalanan	52,685,822,611	0
3	525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	248,678,204,354	0
3	526111	Beban Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	91,197,220,800	0
3	526112	Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	24,627,510,982	0
3	526113	Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	1,253,100,000	0
3	526114	Beban Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	3,150,000	0
3	526115	Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	111,459,697,703	0
3	526311	Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	123,822,088,207	0
3	526312	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	0	112,848,592

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

Tgl. Cetak 29/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	571111	Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang	0	33,958,552
3	572111	Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang	40,724,700,000	0
3	573111	Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang	54,048,325,000	0
3	573112	Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa	627,535,509	0
3	574111	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	1,045,808,386,182	0
3	575111	Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang	47,331,425,000	0
3	581114	Beban Cadangan Tunjangan Beras PNS/TNI/Polri	0	0
3	581919	Beban Lain-lain	3,146,900	0
3	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	686,533,702,036	0
3	591121	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - BLU	8,675,606,788	0
3	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	498,167,879,008	0
3	591221	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - BLU	4,464,859,193	0
3	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	16,723,959,091	0
3	591312	Beban Penyusutan Irigasi	7,605,952,607	0
3	591313	Beban Penyusutan Jaringan	5,320,222,470	0
3	591321	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	1,223,082,261	0
3	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	8,509,549,653	0
3	592112	Beban Amortisasi Hak Cipta	2,440,916	0
3	592115	Beban Amortisasi Software	9,679,730,278	0
3	592116	Beban Amortisasi Lisensi	101,947,149	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

Tgl. Cetak 29/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	4,198,000	0
3	592121	Beban Amortisasi Software-Badan Layanan Umum	361,419,250	0
3	592122	Beban Amortisasi-Hak Cipta BLU	9,077,266	0
3	592221	Beban Penyusutan Aset Lain-lain	0	0
3	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	3,542,019,945	0
3	592242	Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan BLU	41,234,484	0
3	593111	Beban Persediaan konsumsi	253,090,043,899	0
3	593112	Beban Persediaan amunisi	0	0
3	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	13,888,776,499	0
3	593114	Beban Persediaan suku cadang	1,585,017,031	0
3	593121	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	1,017,201,824	0
3	593122	Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	2,287,819,920	0
3	593125	Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	473,665	0
3	593126	Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	168,441,800	0
3	593127	Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	8,735,500	0
3	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	243,528,539	0
3	593131	Beban Persediaan bahan baku	14,094,106,220	0
3	593141	Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	135,460,645	0
3	593149	Beban Persediaan Lainnya	18,268,154,023	0
3	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	42,082,327,110	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

Tgl. Cetak 29/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	594211	Beban Penyisihan Piutang PNPB	1,086,406,785	0
3	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	66,100	0
3	594411	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	134,000	0
3	594612	Beban Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	0	1,304,886,035
3	594711	Beban Penyisihan Piutang Sewa Tanah BLU	77,216,855	0
3	594712	Beban Penyisihan Piutang Sewa Gedung BLU	0	9,035,391
3	594713	Beban Penyisihan Piutang Sewa Ruangan BLU	35,185,833	0
3	594714	Beban Penyisihan Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU	469,400,000	0
3	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan	33,333	0
3	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	8,993,324,074	0
3	595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	19,006,500	0
3	595114	Beban Aset Ekstrakomtabel Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,709,000	0
3	595115	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	266,754,989	0
3	595116	Beban Aset Ekstrakomtabel Konstruksi Dalam Pengerjaan	61,625,400	0
3	595117	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tak Berwujud	38,280,000	0
3	595122	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin - BLU	349,159,593	0
3	595123	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan - BLU	7,634,000	0
3	595127	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tak Berwujud - BLU	371,867,622	0
3	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	18,710,763,865	0
3	596121	Kerugian Persediaan Rusak/Usang	1,116,610,419	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

Tgl. Cetak 29/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	2,167,435	0
3	423129	Pengembalian Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1,500,000	0
3	423217	Pengembalian Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	26,200,000	0
3	423511	Pengembalian Pendapatan Uang Pendidikan	72,650,000,000	0
3	423999	Pengembalian Pendapatan Anggaran Lain-lain	12,905,250	0
3	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	1,943,795,408
3	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	26,768,057
3	511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0	248,104,000
3	511122	Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	0	67,801,343
3	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	152,414,290
3	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	578,110,320
3	511125	Pengembalian Beban Tunj. PPh PNS	0	17,017,111
3	511126	Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	0	73,621,753
3	511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS	0	902,356,544
3	511135	Pengembalian Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	0	3,750,000
3	511138	Pengembalian Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	0	7,650,000
3	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	474,509,881
3	511152	Pengembalian Beban Tunjangan Profesi Guru	0	4,696,991,685
3	511153	Pengembalian Beban Tunjangan Profesi Dosen	0	126,258,880
3	511154	Pengembalian Beban Tunjangan Kehormatan Profesor	0	84,005,160

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

Tgl. Cetak 29/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	511155	Pengembalian Beban Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS	0	378,776,435
3	511512	Pengembalian Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	0	2,850,000
3	511521	Pengembalian Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	0	3,505,284,787
3	511522	Pengembalian Beban Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	0	22,626,000
3	512111	Pengembalian Beban Uang Honor Tetap	0	232,442,529
3	512211	Pengembalian Beban Uang Lembur	0	121,706,050
3	512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	19,305,918,411
3	521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	0	206,172,212
3	521114	Pengembalian Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	32,000
3	521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	272,715,800
3	521119	Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	0	173,234,268
3	521211	Pengembalian Beban Bahan	0	620,828,296
3	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	1,411,417,469
3	521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	6,133,879,237
3	522111	Pengembalian Beban Langganan Listrik	0	6,469,765
3	522112	Pengembalian Beban Langganan Telepon	0	9,743,183
3	522113	Pengembalian Beban Langganan Air	0	4,026,820
3	522119	Pengembalian Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	1,079,980
3	522121	Pengembalian Beban Jasa Pos dan Giro	0	2,740
3	522141	Pengembalian Beban Sewa	0	46,555,800

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

Tgl. Cetak 29/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	0	2,971,416,571
3	523111	Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	66,160,487
3	523121	Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	47,734,210
3	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	10,520,043,181
3	524112	Pengembalian Beban Perjalanan Tetap	0	2,040,000
3	524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	1,119,236,595
3	524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	8,323,247,162
3	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	22,220,904,924
3	524211	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	345,309,394
3	524219	Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	1,711,995,808
3	573111	Pengembalian Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang	0	16,699,412
3	574111	Pengembalian Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	0	288,923,892
3	575111	Pengembalian Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang	0	500,000
JUMLAH			106,983,818,099,209	106,983,818,099,209



IKHTISAR BLU

A. PENJELASAN UMUM

Paket undang-undang bidang keuangan negara merupakan paket reformasi yang signifikan di bidang keuangan negara yang kita alami sejak kemerdekaan. Salah satu dari reformasi yang paling menonjol adalah pergeseran dari penganggaran tradisional ke penganggaran berbasis kinerja. Dengan basis kinerja ini, mulai dirintis arah yang jelas bagi penggunaan dana pemerintah, berpindah dari sekedar membiayai masukan (inputs) atau proses ke pembayaran terhadap apa yang akan dihasilkan (outputs).

Perubahan ini penting dalam rangka proses pembelajaran yang lebih rasional untuk mempergunakan sumber daya yang dimiliki pemerintah mengingat tingkat kebutuhan dana yang makin tinggi, sementara sumber dana yang tersedia tetap terbatas. Orientasi pada outputs semakin menjadi praktik yang dianut luas oleh pemerintahan modern di berbagai negara. Mewiraswastakan pemerintah (*enterprising the government*) adalah paradigma yang memberi arah yang tepat bagi keuangan sektor publik. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menekankan basis kinerja dalam penganggaran, memberi landasan yang penting bagi orientasi baru tersebut di Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja ini di lingkungan pemerintah. Dengan Pasal 68 dan Pasal 69 dari undang-undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Instansi demikian, dengan sebutan umum sebagai Badan Layanan Umum (BLU), diharapkan menjadi contoh konkrit yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil (kinerja). Peluang ini secara khusus disediakan kesempatannya bagi satuan-satuan kerja pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan, dan lisensi), untuk membedakannya dari fungsi pemerintah sebagai regulator dan penentu kebijakan. Praktik ini telah berkembang luas di manca negara berupa upaya pengagenan (*agencification*) aktivitas yang tidak harus dilakukan oleh lembaga birokrasi murni, tetapi diselenggarakan oleh instansi yang dikelola ala bisnis (*business like*) sehingga pemberian layanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif.

Suatu instansi dapat menjadi satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum (PPK-BLU), harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, yang terdiri dari:

1. Persyaratan Substantive;

Persyaratan substantive dapat dipenuhi apabila satuan kerja pemerintah menyelenggarakan pelayanan umum yang berhubungan dengan:

- a. Penyediaan barang dan/jasa layanan umum;
- b. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat
- c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat

2. Persyaratan Teknis.

Persyaratan teknis dapat terpenuhi apabila:

- a. kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri sesuai dengan kewenangannya
- b. kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.

3. Persyaratan Administrative

Persyaratan administrative terpenuhi, apabila satuan kerja pemerintah dapat menyajikan dokumen sebagai berikut:

- a. pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat
- b. pola tata kelola;
- c. rencana strategis bisnis;
- d. laporan keuangan pokok;
- e. standar layanan minimum
- f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia diaudit secara independen.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi landasan pembentukan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri sebagai satuan kerja dengan PPK-BLU antara lain adalah :

1. UU RI nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 68 dan Pasal 69);
3. Peraturan Pemerintah RI nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Menteri Keuangan nomor 07/PMK.02/2006 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Menteri Keuangan nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada BLU;
6. Peraturan Menteri Keuangan nomor 10/PMK.02/2006 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 73/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Keuangan nomor 66/PMK.02/2006 tentang Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran

- Badan Layanan Umum yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (sebagai Pengganti Peraturan Menteri Keuangan;
8. Peraturan Menteri Keuangan nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas BLU;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/KMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
 10. Peraturan Menteri Keuangan nomor 05/PMK.05/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
 11. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan PNBPN oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan PK BLU;
 12. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
 13. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-08/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum di Lingkungan Pemerintah Pusat;
 14. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2008 tentang Format Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU);
 15. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-58/PB/2008 tentang Mekanisme Pengembalian Sisa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang diterima sebelum ditetapkan sebagai Satuan Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU);
 16. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2010 tentang Tata Cara Revisi Rencana Bisnis dan Anggaran dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.

C. PROFIL PEGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI YANG MENERAPKAN PPK-BLU

Perguruan Tinggi Agama dalam perjalanannya telah menjadi center of excellence dalam bidang ilmu-ilmu keislaman serta dijuluki sebagai feeder bagi perguruan tinggi lainnya.

Program studi dan kurikulum yang ada terus dievaluasi serta disempurnakan agar semakin relevan dengan tuntutan zaman. PTAIN membekali dan mengantarkan alumnusnya ke berbagai Kementerian/Lembaga dan bidang pengabdian, seperti sebagai dosen, guru, pegawai negeri, tokoh politik, TNI/Polri, wiraswasta, pengusaha, dan bahkan diplomat.

Kebijakan kearah pengembangan PTAIN sebagai universitas bertumpu pada paradigma baru yaitu bertumpu pada tiga pilar utama; kemandirian (autonomy), akuntabilitas (accountability) dan jaminan mutu (quality assurance).

Sejalan dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara khususnya pasal 68 dan 69 yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pola Pengelolaan Keuangan - Badan Layanan Umum (PPK-BLU) maka Perguruan Tinggi Agama Islam sebagai instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas selayaknya dapat menyesuaikan sistem pengelolaan keuangannya sebagaimana dimaksud dalam PP RI Nomor 23 Tahun 2005.

Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut diatas Perguruan Tinggi Agama Islam di lingkungan Kementerian Agama mulai tahun 2005 melakukan persiapan-persiapan untuk menjadi instansi pemerintah dengan PPK-BLU sebagai upaya perbaikan dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk memajukan pendidikan dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas dan penerepan praktek bisnis yang sehat.

Sebagai langkah awal proses pengajuan menjadi satuan kerja yang menerapkan PPK-BLU, pada bulan Februari 2006 dilaksanakan Workshop Sosialisasi PPK-BLU dengan mengundang Tim Evaluasi BLU Kementerian Keuangan sebagai pembicara. Dalam Workshop tersebut diperoleh informasi bahwa untuk menjadi instansi dengan PPK-BLU, Perguruan Tinggi Agama Islam harus mengajukan proposal terlebih dahulu ke Kementerian Keuangan. Proposal tersebut selanjutnya akan diuji dan dinilai oleh Tim Penilai Kementerian Keuangan untuk menentukan apakah Perguruan Tinggi Agama Islam tersebut layak menjadi satuan kerja dengan PPK-BLU.

Setelah mendapat persetujuan Menteri Agama RI, proposal tersebut selanjutnya dikirim ke Tim Evaluasi BLU Kementerian Keuangan untuk dimintakan pengesahan. Bagi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang sudah mengajukan untuk menjadi satuan kerja PPK-BLU, mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan proposal tersebut dihadapan Tim Penilai BLU Kementerian Keuangan.

Akhirnya setelah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan RI maka status BLU Penuh resmi disandang oleh Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri untuk menjalankan ketentuan-ketentuan pengelolaan keuangan dengan PPK-BLU.

Sampai dengan tahun 2013, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) ada lima belas Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang terdiri dari 8 (delapan) Universitas Islam Negeri dan 7 (tujuh) Institut Agama Islam Negeri di lingkungan Kementerian Agama. Dalam perkembangan terakhirnya, perguruan tinggi agama Islam yang menerapkan PPK-BLU memiliki fakultas-fakultas, yaitu:

- a. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Ditetapkan menjadi BLU yakni pada tanggal 2 Juli 2007 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007.
- b. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Ditetapkan menjadi BLU yakni pada tanggal 26 Februari 2008 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008.
- c. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Ditetapkan menjadi BLU yakni pada tanggal 31 Maret 2008 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008.
- d. UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Ditetapkan menjadi BLU yakni pada tanggal 10 September 2008 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.05/2008.
- e. UIN Alauddin Makassar
Ditetapkan menjadi BLU yakni pada tanggal 20 November 2008 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 330/KMK.05/2008.
- f. UIN Walisongo Semarang
Ditetapkan menjadi BLU yakni pada tanggal 5 Maret 2009 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009.
- g. UIN Sumatera Utara
Ditetapkan menjadi BLU yakni pada tanggal 13 Maret 2009 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KMK.05/2009.
- h. UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Ditetapkan menjadi BLU yakni pada tanggal 13 Maret 2009 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/KMK.05/2009.
- i. IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Ditetapkan menjadi BLU yakni pada tanggal 17 November 2009 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 429/KMK.05/2009.

- j. UIN Sunan Ampel Surabaya
Ditetapkan menjadi BLU yakni pada tanggal 28 Desember 2009 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 511/KMK.05/2009.
- k. IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Ditetapkan menjadi BLU yakni pada tanggal 12 Februari 2010 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 67/KMK.05/2010.
- l. IAIN Raden Intan Lampung
Ditetapkan menjadi BLU yakni pada tanggal 5 Juli 2010 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 277/KMK.05/2010.
- m. UIN Raden Fatah Palembang
Ditetapkan menjadi BLU yakni pada tanggal 30 September 2010 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 401/KMK.05/2010.
- n. IAIN Mataram
Ditetapkan menjadi BLU yakni pada tanggal 14 Maret 2011 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.05/2011.
- o. UIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh
Ditetapkan menjadi BLU yakni pada tanggal 5 September 2011 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011.
- p. IAIN Imam Bonjol, Sumatera Barat
Ditetapkan menjadi BLU yakni pada tanggal 5 September 2011 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011.

D. PELAPORAN KEUANGAN

Sebagai instansi pemerintah dengan PPK - BLU, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri wajib menyusun Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya kepada masyarakat. Laporan keuangan yang disusun paling sedikit terdiri dari : (1) Neraca; (2) Laporan Operasional/Aktivitas; (3) Laporan Arus Kas. Laporan Keuangan yang disusun tersebut selanjutnya dikirim secara berjenjang kepada Menteri/Pimpinan lembaga serta kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan secara periodik setiap triwulan, semesteran dan tahunan. Berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Badan Layanan Umum, system akuntansi BLU terdiri dari :

1. Sistem akuntansi keuangan, yang menghasilkan Laporan Keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi;
2. Sistem akuntansi aset tetap, yang menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan manajemen aset tetap; dan

3. Sistem akuntansi biaya, yang menghasilkan informasi biaya satuan (unit cost) per unit layanan, pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain untuk kepentingan manajerial.

BLU dapat mengembangkan sistem akuntansi lain yang berguna untuk kepentingan manajerial selain sistem akuntansi sebagaimana tersebut diatas dan ditetapkan oleh Menteri. Sistem akuntansi keuangan BLU dirancang agar paling sedikit menyajikan:

1. Informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu;
2. Informasi tentang kemampuan BLU untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban yang terjadi selama suatu periode;
3. Informasi mengenai sumber dan penggunaan dana selama suatu periode;
4. Informasi tentang pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu; dan
5. Informasi tentang ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Ciri dasar akuntansi keuangan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri adalah akuntansi dana (fund accounting). Akuntansi dana terkait dengan karakteristik operasional Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang menunjukkan adanya penerimaan dan pengeluaran operasional yang rutin dengan penerimaan dan pengeluaran yang disesuaikan tujuannya sesuai dengan acuan dari pemberi dana (donor).

Dana untuk operasional pengelolaan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri bersumber dari pemerintah (APBN) yang didroping secara kontinyu melalui prosedur keuangan negara dan penerimaan PNPB BLU yang berupa penerimaan pendidikan, hibah, dan lain-lain. Sedangkan dana non operasional yang berkaitan dengan donor disesuaikan dengan tujuan pemberi dana (donatur). Kegiatan-kegiatan non operasional Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri mencakup kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, penerimaan bea siswa, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan non operasional tersebut dalam pelaksanaannya lebih banyak ditangani oleh Lembaga-lembaga/unit non struktural yang dibentuk oleh Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri.

1. Satuan Akuntansi

Satuan akuntansi dalam lingkup Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri merupakan satuan organisasi struktural dan non struktural yang dalam operasionalnya mengelola dana atau keuangan. Sumber dana yang dikelola tidak terbatas pada dana pemerintah (APBN) namun mencakup seluruh dana yang masuk berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan. Sumber dana berasal dari berbagai sumber antara lain hasil kerjasama, pungutan pelayanan, penjualan, sewa-menyewa, bunga bank, dan sumber-sumber lain. Satuan akuntansi bertugas melakukan pengelolaan keuangan dilingkungannya dan melaporkan secara periodik kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri sebagai bentuk pertanggungjawaban.

2. Lingkup Laporan

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang menerapkan PPK-BLU menyusun dan menyajikan: Laporan Keuangan Pokok yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus dan disampaikan secara berjenjang kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Perbendaharaan

3. Kebijakan Akuntansi BLU

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

4. Laporan Keuangan BLU

Laporan Keuangan BLU disusun dengan dua tujuan yaitu:

- a. Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya
- b. Dalam rangka konsolidasi.

Untuk tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a, BLU menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran/Laporan operasional, Neraca, Laporan Arus Kas dan Laporan Kinerja. Sedangkan untuk tujuan konsolidasi, BLU menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan standar SAP yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan di lampiri dengan Laporan Keuangan yang sesuai dengan standar SAK/Industri yang spesifik.

5. Periode Akuntansi

Periode akuntansi adalah satu semester dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

6. Penjabaran Kurs Valuta Asing

Elemen laporan keuangan dalam valuta asing, dilaporkan dalam nilai Rupiah. Konversi didasarkan atas Kurs Tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan posisi keuangan.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI YANG MENERAPKAN PPK-BLU.

Neraca merupakan laporan yang menyajikan hak dan kewajiban BLU, sehingga dapat diketahui seberapa besar kekayaan dari pada BLU tersebut. Neraca Badan Layanan Umum ini merupakan Neraca Gabungan dari Satuan Kerja Perguruan Tinggi Agama Islam yang telah menerapkan PPK-BLU dan telah menyampaikan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan.

1. ASET

a). ASET LANCAR

1). KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM ATAU KAS DAN SETARA KAS

Kas pada BLU per 31 Desember 2016 senilai Rp. 695,047,807,716,-

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLU. Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro.

Setara kas (cash equivalent) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 s.d. 3 bulan tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan.

2) KAS LAINNYA SETARA KAS

PTKN BLU per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 19,898,194,095,- dan per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 1,709.735.750,-. Terdapat Peningkatan yang significant sebesar Rp. 18,188,458,345 atau 1063,82%.

3) INVESTASI JANGKA PENDEK

Investasi Jangka Pendek yang telah dilakukan PTKAN BLU per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 76.617,795,527,- dan per 31 Desember 2015 senilai Rp153.965.732.649,-

4) Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Pada PTKN BLU per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 224.163.750,- dan per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 358.662.000,-

5) PIUTANG USAHA

Piutang Usaha yang masih dimiliki Satker BLU per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 28.580.220.252,- dan per 31 Desember 2015 senilai Rp30.871.214.618,- . Terdapat Penurunan sebesar Rp. 2.290.994.366,- atau 7.42%.

1. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Piutang Lain-Lain yang masih dimiliki Satker BLU per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar (Rp. 4.741.850.749,-) dan per 31 Desember 2015 senilai Rp. (901.296.667),- . Terdapat Peningkatan yang significant sebesar (Rp. 3.840.554.082,-) atau 200%.

2. PIUTANG LAIN-LAIN

Piutang Lain-Lain yang masih dimiliki Satker BLU per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 790.853.586,- dan per 31 Desember 2015 senilai Rp1.847.026.681,-. Terdapat Penurunan sebesar Rp. 1.056.173.095,- atau 57.18%.

3. PERSEDIAAN

Persediaan yang masih dimiliki Satker BLU per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 10.825.322.428,- dan per 31 Desember 2015 senilai Rp 10.495.708.644,-. Terdapat Peningkatan sebesar Rp. 329.613.784,- atau 3.14%.

4. ASET LANCAR LAINNYA

Aset Lancar Lainnya Satker BLU per tanggal 31 Desember 2016 adalah Rp. 0,- dan per 31 Desember 2015 senilai Rp2.237.020.197,-

5. UANG MUKA

Uang Muka Satker BLU per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 90.965.719,- dan per 31 Desember 2015 senilai Rp. 70.641.450,-. Terdapat Peningkatan sebesar Rp. 20.323.269,- atau 28.77%.

6. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Satker BLU per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 1.523.121.974,- dan per 31 Desember 2015 senilai Rp1.465.698.726. Terdapat peningkatan sebesar Rp. 57.423.250,- atau 3.92%.

6) ASET TETAP

Aset Tetap Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri merupakan harta benda berbentuk fisik yang digunakan untuk sarana dan prasarana proses belajar mengajar dan administrasi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2016 terdiri dari:

1. TANAH

Nilai aset tanah BLU per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 3.675.865.583.641,-

2. GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BLU per 31 Desember 2016 sebesar Rp.4.408.390.425.989,-.

3. PERALATAN DAN MESIN
Nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 1.782.130.013.566,-.
 4. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
Nilai aset Jaringan Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BLU per 31 Desember 2016 sebesar Rp.237.005.223.918,-.
 5. ASET TETAP LAINNYA
Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 senilai Rp. 133.838.826.827,-
 6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2016 senilai Rp. 557.914.619.375,-.
 7. AKUMULASI PENYUSUTAN
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2016 senilai Rp.1.865.918.030.957,-.
- 7) ASET LAINNYA
- 1). ASET KERJASAMA OPERASI
Aset Kerjasama Operasi yang didapat oleh BLU per 31 Desember 2015 adalah RpNIHIL.
 - 2). ASET SEWA GUNA USAHA
Aset Sewa Guna Usaha BLU per 31 Desember 2015 adalah sebesar RpNIHIL.
 - 3). ASET TIDAK BERWUJUD
Aset Tidak Berwujud yang dimiliki oleh BLU per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 41.354.607.656,-.
 - 4). ASET LAIN-LAIN
Aset Lain-Lain BLU per 31 Desember 2015 sebesar Rp35.547.936.953,-
 - 5). AKUMULASI AMORTISASI
Aset Akumulasi Amortisasi BLU per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 1.865.918.030.957,-

g. KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

1. UTANG USAHA

Utang Usaha yang dimiliki oleh BLU per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 1.115.725.000,- dan per 31 Desember

2015 sebesar Rp4.422.374,309,-. Terdapat Penurunan sebesar Rp. 3.306.649.309,- atau 74.77%.

2. UTANG PAJAK

Utang Pajak yang dimiliki oleh BLU per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,-.

3. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Utang Kepada Pihak Ketiga yang dimiliki oleh BLU per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 42.705.286.768,-.

4. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Biaya Yang Masih Harus Dibayar yang dimiliki oleh BLU per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 5.325.960.873,-.

5. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Pendapatan Diterima Dimuka yang dimiliki oleh BLU per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 17.991.426.239,-.

6. PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN

Pendapatan Yang Ditangguhkan Diterima Dimuka yang dimiliki oleh BLU per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 3.693.637.902,-.

7. UANG MUKA DANA KELOLAAN

Uang Muka Dana Kelolaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 3.887.586.965,-.

8. BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang dimiliki oleh BLU per 31 Desember 2015 adalah NIHIL

9. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Utang Jangka Pendek Lainnya yang dimiliki oleh BLU per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 592.294.306,-.

10. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Pendapatan Diterima Dimuka yang dimiliki oleh BLU per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,-.

11. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG LAINNYA

Kewajiban Jangka Panjang Lainnya yang dimiliki oleh BLU per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 0,-.

h. EKUITAS

Ekuitas adalah hak residual BLU atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban yang dimiliki. Ekuitas yang dimiliki PTKN BLU per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 9.621.008.520.764,-

dan per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 8.190.399.634.554,-. Terdapat peningkatan yang significant sebesar Rp. 1.430.608.886.210,- atau 17.47%.- .

b. LAPORAN AKTIVITAS

a. PENDAPATAN

1) Pendapatan dari Usaha Jasa Layanan

Pendapatan Usaha dan Jasa Layanan BLU terdiri dari pendapatan operasional perkuliahan, pendapatan jasa pelayanan pendidikan lainnya, pendapatan pendidikan, pendapatan jasa layanan lainnya, pendapatan jasa layanan pendidikan, pendapatan jasa penyedia barang dan jasa lainnya, pendapatan hasil kerjasama lembaga/badan usaha, pendapatan jasa layanan perbankan, pendapatan usaha dari jasa layanan, pendapatan operasional dari jasa layanan.

- 1) Pendapatan operasional perkuliahan periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016 sebesar Rp. 740.361.410.321,-
- 2) Pendapatan jasa pelayanan pendidikan lainnya periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016 sebesar Rp. 41.720.834.347,-.
- 3) Pendapatan Pendidikan periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,-
- 4) Pendapatan jasa layanan lainnya periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016 sebesar Rp 121.822.032,-.
- 5) Pendapatan jasa layanan pendidikan periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,-.
- 6) Pendapatan jasa penyedia barang dan jasa lainnya periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,- .
- 7) Pendapatan hasil kerjasama lembaga/badan usaha periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016 sebesar Rp. 553.926.910,-
- 8) Pendapatan Jasa Layanan Perbankan periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,-
- 9) Pendapatan usaha dari jasa layanan periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,-.
- 10) Pendapatan operasional dari jasa layanan periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016 sebesar Rp 0,-.

- 3) Hibah
Pendapatan Hibah terdiri dari Hibah terikat dan hibah tidak terikat.
 - 1) Pendapatan hibah terikat periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,-.
 - 2) Pendapatan hibah tidak terikat periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016 sebesar Rp. 24.166.767.700,-.
- 4) Pendapatan APBN
Realisasi Pendapatan APBN terdiri dari Pendapatan Operasional dan Pendapatan APBN Investasi.
 - 1) Pendapatan APBN operasional periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 1.146.463.358.313,-.
 - 2) Pendapatan APBN investasi periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 185.443.492.595,-.
- 5) Pendapatan usaha lainnya
 - 1) Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain
Pendapatan Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016 sebesar Rp. 16.814.344.808,-.
 - 2) Sewa
Pendapatan BLU dari sumber Sewa periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016 sebesar Rp. 2.192.536.968,-.
 - 3) Jasa Lembaga Keuangan
Pendapatan BLU dari Jasa Lembaga Keuangan periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016 sebesar Rp. 6.315.518.757,-.
 - 4) Pendapatan PNBPN Lainnya
Pendapatan PNBPN lainnya periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016 sebesar Rp. 134.750.389.634,-.
 - 5) Pendapatan Usaha Lain-Lain
Pendapatan usaha lainnya periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016 sebesar Rp. 16.296.318.798,-.

b. BIAYA

a). Biaya Layanan

Merupakan seluruh biaya yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, antara lain meliputi biaya pegawai, biaya bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan,

biaya daya dan jasa, biaya barang, biaya jasa, biaya penyusutan, biaya perjalanan, biaya penyediaan barang dan jasa, biaya barang dan jasa lainnya, biaya lainnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh BLU. Biaya layanan BLU periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016 sebesar Rp. 2.073.863.014.865,-.

b). Biaya Umum dan Administrasi

Merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk administrasi dan biaya yang bersifat umum dan tidak terkait secara langsung dengan kegiatan pelayanan BLU. Biaya ini antara lain meliputi biaya pegawai, biaya administrasi perkantoran, biaya pemeliharaan, biaya langganan daya dan jasa, biaya promosi, biaya barang, biaya jasa, biaya penyusutan, biaya perjalanan, biaya penyediaan barang dan jasa, biaya barang dan jasa lainnya, biaya bantuan, biaya lainnya. Biaya Umum dan Administrasi BLU periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016 sebesar Rp. 280.459.329.853,-.

c) Beban Bunga

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2016 sebesar Rp. 1.131.757.274,-.

c). Beban Pajak

Biaya Pajak periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016 sebesar Rp. 226.299.323,-.

d). Biaya Lainnya

Merupakan biaya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam biaya layanan dan biaya umum dan administrasi. Biaya ini antara lain meliputi biaya bunga, biaya administrasi bank, biaya investasi, dan biaya lain-lain. Biaya Lainnya BLU periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016 sebesar Rp. 32.872.214.804,-.

c. SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS KEUNTUNGAN/KERUGIAN

1) Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar

Periode 1 Januari s,d 31 Desember 2016 sebesar Rp. 1.177.581.718,-.

2) Rugi Penjualan Aset-Aset Non Lancar

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2016 sebesar Rp. (Rp. 1.087.695.013,-).

3) Dan Lain Lain

Dan Lain Lain merupakan keuntungan atau kerugian lainnya. pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2016 sebesar Rp. 5.122.861.156,-.

2. SURPLUS/DEFISIT DARI POS-POS LUAR BIASA

a). Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa

Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,-.

3. SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN BERSIH

Surplus & Defisit Tahun Lalu merupakan akumulasi Surplus & Defisit pada periode-periode sebelumnya sedangkan Surplus & Defisit Tahun Berjalan berasal dari seluruh pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya pada tahun berjalan.

Surplus/defisit BLU dari 1 Januari s.d 31 Desember 2016 sebesar Rp. (Rp. 219.331.640.018,-).

4. SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN DI LUAR PENDAPATAN APBN

Pada periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016 sebesar (Rp. 1.551.238.490.926,-).

LAPORAN ARUS KAS

B. LAPORAN ARUS KAS

1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

a). ARUS MASUK

1) Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan

Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Realisasi Pendapatan Usaha dari Jasa Lainnya BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 336.958.092.581,-

2) Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 54.427.390.642,-

3) Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 22.023.417.700,-

4) Pendapatan APBN (Rupiah Murni)

Pendapatan APBN BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 1.550.171.679.682,-

5) Pendapatan PNBP Lainnya

Pendapatan PNBP Lainnya BLU periode 1 Januari sampai

dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 37.508.405.700,-

6) Pendapatan Jasa Layanan Perbankan

Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 2.392.326.076,-

7) Dana Titipan

Dana Titipan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 1.576.161.053,-

b). ARUS KELUAR

1) Biaya Layanan

Realisasi Biaya Layanan BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 447.205.841.906,-

2) Biaya Umum dan Administrasi

Biaya Umum dan Administrasi BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 374.693.780.385,-

3) Setoran Ke Kas Negara

Setoran Ke Kas Negara periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 250.354.958,-

4) Biaya Lainnya

Biaya Lainnya BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 10.129.572.424,-

5) Beban Pegawai

Beban Pegawai BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 455.945.110.400,-

6) Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 244.367.349.540 –

7) Beban Barang yang Menghasilkan Persediaan

Beban Barang yang Menghasilkan Persediaan BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 2.514.634.643,-

8) Beban Bunga

Beban Bunga BLU periode 1 Januari sampai dengan 31

Desember 2016 adalah Rp. 513.853.714,-

- 9) Beban Hibah
Beban Hibah BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 adalah Rp. 22.023.417.700,-
- 10) Beban Bansos
Beban Bansos BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 4.770.000.000,-
- 11) Beban Perjalanan
Beban Perjalanan BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 adalah Rp. 21.211.305.122,-
- 12) Beban Lain-lain
Beban Lain-lain BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 10.129.572.424,-
- 13) Beban Akruwal Murni
Beban Akruwal Murni BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 11.693.082.343,-
- 14) Penerimaan Pencairan Deposito
Penerimaan Pencairan Deposito periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 7.000.000.000,-
- 15) Perolehan Atas Tanah
Perolehan Atas Tanah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 3.433.990.000,-
- 16) Perolehan Atas Peralatan dan Mesin
Perolehan Atas Peralatan dan Mesin periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 adalah Rp. 22.934.734.923,-
- 17) Perolehan Atas Gedung dan Bangunan
Perolehan Atas Gedung dan Bangunan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 adalah Rp. 51.532.842.778,-,-
- 18) Perolehan Atas Aset Tetap Lainnya
Perolehan Atas Aset Tetap Lainnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 adalah Rp. 3.723.398.856,-
- 19) Perolehan Atas Aset Lainnya
Perolehan Atas Aset Lainnya periode 1 Januari sampai

dengan 31 Desember 2016 adalah Rp. 2.710.084.510,-

- 20) Pengeluaran Deposito
Pengeluaran Deposito periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 adalah Rp. 3.000.000.000,-
- 21) Perolehan Aset Tetap
Perolehan Aset Tetap periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 adalah Rp. 370.607.661.468,-
- 22) Beban Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya
Beban Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 adalah Rp. 18.801.373.629,-
- 23) Penyetoran PNBPN ke kas Negara
Penyetoran PNBPN ke kas negara periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 adalah Rp. 749.916.692,-,
- 24) Kenaikan Aset Lancar Selain Kas
Kenaikan Aset Lancar Selain Kas periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 adalah Rp. 927.494.611,-
- 25) Penurunan Kewajiban Jangka Pendek
Penurunan Kewajiban Jangka Pendek periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 adalah Rp. 4.390.709.988,-

2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

a). ARUS MASUK

1) Pendapatan dari Pusat bisnis

Kas Masuk dari Pendapatan dari Pusat Bisnis BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 4.712.281.473,-

2) Lainnya

Kas Masuk dari Lainnya BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 255.190.294,-

Lainnya merupakan transaksi yang tidak termasuk tiga transaksi dalam arus masuk.

b). ARUS KELUAR

1) Penyetoran Laba dari Pusat Bisnis Perolehan Aset Tetap

Kas untuk Penyetoran Laba dari Pusat Bisnis BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 4.712.281.473,-

3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

a). ARUS MASUK

1) Modal Awal Pusat Bisnis

Kas Masuk dari Modal Awal Pusat Bisnis BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 438.628.022,-

4. KENAIKAN BERSIH KAS

Kenaikan Bersih Kas BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 1.996.376.704.832,-

5. KAS DAN SETARA KAS AWAL

Kas dan Setara Kas Awal BLU periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 165.420.708.833,-

